

ISSN: 1979-6013
TERAKREDITASI : B
No. 60/AKRED-LIPI/P2MBI/12/2006

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

Forestry Socio and Economic Research Journal

Volume 7 Nomor 1, Maret Tahun 2010



DEPARTEMEN KEHUTANAN
Ministry of Forestry
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
Forestry Research and Development Agency
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN
Centre for Forestry Socio Economic and Policy Research
BOGOR INDONESIA

JURNAL SOSEK	Vol. 7	No. 1	Hal 1 - 91	Bogor 2010	ISSN 1979-6013
--------------	--------	-------	------------	---------------	-------------------

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

Forestry Socio and Economic Research Journal

Volume 7 Nomor 1, Maret Tahun 2010

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No. 1563/D/2006 dengan kategori B. Memuat Karya Tulis Ilmiah dari hasil-hasil penelitian di bidang Sosial dan Ekonomi Kehutanan dan terbit secara berkala empat kali dalam setahun.

Forestry Social and Economic Journal is an accredited journal (B category). Based on the decree of Director of Indonesian Science Institute (LIPI) No. 1563/D/2006. This Journal Publishes result of research in Socioeconomic Forestry and released four times annually.

PENANGGUNG JAWAB (*Editor in Chief*) : Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

DEWAN REDAKSI (*Editorial Board*)
Ketua (*Chairman*) merangkap Anggota : Dr. Ir. Haryatno Dwiprabowo, M.Sc.

Anggota (*Members*) : 1. Drs. Edi Basuno, M.Phil, PhD
2. Dr. Handewi P. Salim, MS
3. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS
4. Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc.

SEKRETARIAT REDAKSI (*Editorial Secretariat*)
Ketua (*Chairman*) merangkap Anggota : Kepala Bidang Pelayanan dan Evaluasi Penelitian

Anggota (*Members*) : 1. Kepala Sub. Bidang Pelayanan Penelitian
2. Galih Kartika Sari, S.Hut

Diterbitkan oleh (*Published by*) :

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

(*Centre for Socio Economic and Policy on Forestry Research*)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

(*Forestry Research and Development Agency*)

Alamat (*Address*) : Jalan Gunung batu No. 5, PO. BOX 272 Bogor 16610, Indonesia

Telepon (*Phone*) : 62-0251-8633944

Fax (*Fax*) : 62-251-8634924

Email : publikasi_puslitsosek@yahoo.com

ISSN: 1979-6013

TERAKREDITASI : B

No. 60/AKRED-LIPI/P2MBI/12/2006

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

Forestry Socio and Economic Research Journal

Volume 7 Nomor 1, Maret Tahun 2010



DEPARTEMEN KEHUTANAN

Ministry of Forestry

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Forestry Research and Development Agency

PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

Centre for Forestry Socio Economic and Policy Research

BOGOR INDONESIA

JURNAL SOSEK	Vol. 7	No. 1	Hal 1 - 91	Bogor 2010	ISSN 1979-6013
--------------	--------	-------	------------	---------------	-------------------

JURNAL PENELITIAN

SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

Forestry Socio and Economic Research Journal

Volume 7 Nomor 1, Maret Tahun 2010

DAFTAR ISI

ANALISIS FINANSIAL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KEMITRAAN DI KABUPATEN BULUKUMBA, PROPINSI SULAWESI SELATAN (<i>Financial Analysis of Private Forest Management Partnership in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province</i>) Priyo Kusumedi & Ani Nawir	1 - 21
ANALISIS KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT PADA TINGKAT MIKRO DI KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN (<i>Institutional Analysis of Community Forest at Macro Level in the District of Pandeglang, Province of Banten</i>) Ismatul Hakim	23 - 40
POTENSI DAN PERAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) (<i>Potency and Role of the Muslim Boarding School as an Institution to Execute for Land and Forest Rehabilitation Activity</i>) Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Budiman Achmad	41 - 54
KONTRIBUSI EKONOMI DAN SISTEM PEMASARAN HASIL HUTAN RAKYAT POLA WANAFARMA DI KECAMATAN MAJENANG, KABUPATEN CILACAP (<i>Economic Contribution and Marketing System of Wanafarma Pattern in Privately Owned Forest Product at Majenang Sub District, Cilacap District</i>) Tri Sulistyati Widyarningsih & Dian Diniyati	55 - 71
KAJIAN POTENSI, TATA NIAGA DAN KELAYAKAN USAHA BUDI DAYA TUMBUHAN LITSEA (<i>Study of Potencial, Distribution and Feasibility of Litsea Cultivation</i>) Sylviani & Elvida YS	73 - 91

JURNAL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KEHUTANAN

ISSN: 1979 - 6013

Terbit : Maret 2010

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya.

UDC (OSDCF) 630*619 (594.27)
Priyo Kusumedi & Ani Nawir

Analisis Finansial Pengelolaan Hutan Rakyat Kemitraan di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 1, hal. 1 - 21

Analisa biaya-manfaat digunakan untuk menemukan berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan rakyat, serta memberi masukan dalam pelaksanaan program kemitraan yang saling menguntungkan. Penelitian dilaksanakan secara partisipatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan data primer melalui wawancara terstruktur dan Fokus Group Diskusi, serta data sekunder dari instansi terkait, analisa finansial difokuskan untuk menganalisa biaya dan manfaat yang mempunyai nilai pasar. Hasil kelayakan usaha hutan rakyat di tiga sampel Kelompok Tani Penghijauan (KTP) di dua desa dan dua kecamatan, Kab. Bulukumba yang layak secara finansial adalah KTP Pembangunan Bersama desa Balong Kec. Ujungloe meskipun hasil perhitungannya belum menguntungkan atau masih sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan, sedangkan KTP Suka Maju dan Suka Makmur di desa Karasing, Kec. Herlang tidak layak secara finansial.

Kata kunci: Kemitraan, analisis manfaat-biaya, hutan rakyat

UDC (OSDCF) 630*922.2 (594.53)
Ismatul Hakim

Analisis Kelembagaan Hutan Rakyat pada Tingkat Mikro di Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten

Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 1, hal. 23 - 40

Dalam rangka proses penguatan kelembagaan hutan rakyat di kabupaten Pandeglang, perlu adanya : 1) kesamaan pemahaman antar para pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten (PEMKAB) Pandeglang, Pemerintah Propinsi (PEMPROV) Banten dan Perhutani tentang definisi, luasan dan potensi hutan rakyat, 2) kebersamaan manajemen (kolaborasi) antara PEMKAB) Pandeglang, PEMPROV dan Perum Perhutani (Administratur) dalam membuat program dan mengembangkan kelembagaan Hutan Rakyat agar tidak terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat dalam program pengelolaan pohon (hutan rakyat) dan 3) koordinasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang dalam kaitannya dengan pemanfaatan Hutan Rakyat dari sisi penyediaan bahan baku dan pengembangan unit-unit usaha pengolahan (industri) kayu dari Hutan Rakyat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penyeimbangan antara sisi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) kayu untuk masyarakat dan industri kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan rakyat. Di tingkat Desa (kelompok tani atau *on-farm forestry*) diperlukan adanya kemitraan dengan pihak swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti Perum Perhutani untuk menunjukkan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, operasional pengelolaan (bibit, pupuk, sarana-prasarana dan permodalan), pengolahan dan pemasaran hasil Hutan Rakyat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan petani di lapangan. Membuat lembaga baru dalam usaha kayu dari Hutan Rakyat akan lebih mahal dan dapat menimbulkan masalah baru.

Kata kunci: Analisis kelembagaan, hutan rakyat, perda, manajemen kolaborasi, pasokan dan permintaan kayu

<p>UDC (OSDCF) 630*914 Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Budiman Achmad</p> <p>Potensi dan Peran Pesantren sebagai Lembaga Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)</p> <p>Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 1, hal. 41 - 54</p> <p>Pesantren merupakan suatu komunitas sosial yang cukup dominan dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya dalam menghadapi kehidupan sehingga dapat memberikan arahan dan pedoman. Komponen pesantren terdiri dari: pondok, mesjid, satri, kitab Islam klasik, dan faktor dominan adalah Kyai. Kyai yang kharismatik serta adanya norma merupakan suatu kekuatan yang menonjol di pesantren, yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan RHL. Apalagi kegiatan RHL, diutamakan adalah massa yang banyak untuk melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya hutan rakyat. Lokasi pesantren umumnya berada di pedesaan sekitar hutan, sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut menjadi dasar melibatkan pesantren agar berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan seperti menanam lahan yang dimilikinya untuk menghijaukan wilayah sekitarnya, sekaligus bisa memperoleh pendapatan dari kayunya. Maka perlu diuraikan peranan serta keunggulan komparatif yang dimiliki pesantren dalam kegiatan RHL. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Luhur Alwasilah (Kabupaten Garut, Kecamatan Cibuk Desa Majasari) serta Pesantren Cintawana (Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Tanjungjaya Desa Cilolahan) dilaksanakan bulan Mei Desember 2007. Unit Analisisnya adalah pondok pesantren dengan responden Kyai (2 orang), pengurus pesantren (6 orang) dan mustame sebanyak 29 orang. Data dikumpulkan dengan metode wawancara menggunakan kuisioner, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa pesantren terlibat pada kegiatan kehutanan sebagai pelaksana pembuatan persemaian, dan fasilitator mediasi antara petani dengan pihak swasta dan pemerintah. Keunggulan komparatif yang dimiliki pesantren terbagi atas aspek jaringan kerja, sumber daya manusia, sosial, demografi dan ekonomi.</p> <p>Kata kunci: Pesantren, santri, RHL, Norma, keunggulan komparatif</p>	<p>UDC (OSDCF) 630*719 (594.55) Tri Sulistyati Widyarningsih & Dian Diniyati</p> <p>Kontribusi Ekonomi dan Sistem Pemasaran Hasil Hutan Rakyat Pola Wanafarma di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap</p> <p>Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 1, hal. 55 - 71</p> <p>Kajian ini bertujuan mengetahui kontribusi ekonomi dan sistem pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma yaitu pengembangan tanaman kayu dan obat-obatan. Kajian dilaksanakan bulan Mei-Juni 2006 di Desa Bener, Sepatnunggal, dan Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Responden adalah 57 orang petani hutan rakyat yang dipilih secara sengaja, pengepul kayu, dan tanaman obat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa jenis kayu yang memiliki peluang pasar tinggi yaitu albasia, mahoni, dan jati. Mata pencaharian utama responden sebagai petani dan buruh tani dengan lahan rata-rata 0,95 ha yang ditanami kayu albasia, mahoni, kayu tahunan, dan tanaman obat-obatan. Kontribusi hasil hutan rakyat terhadap pendapatan keluarga masih rendah sebesar 4,69% (kayu) dan 12,06% (tanaman obat). Alur pemasaran kedua hasil hutan rakyat melibatkan petani, pengepul tingkat I (desa), pengepul tingkat II (kecamatan), pengepungan, industri, dan konsumen rumah tangga. Margin keuntungan kayu albasia 10-15 cm sebesar 44,05% (tingkat petani), 12% (pengepul tingkat I), dan 23,91% (pengepul tingkat II). Margin keuntungan tanaman kapulaga di tingkat petani 85,45%, pengumpul tingkat desa 13,64%, dan pengumpul tingkat kecamatan 5,63%. Peluang pasar kedua jenis hasil hutan ini cukup terbuka terutama untuk kebutuhan industri.</p> <p>Kata kunci: Hutan rakyat wanafarma, tanaman kayu, tanaman obat, kontribusi ekonomi, pemasaran</p>
<p>DC (OSDCF) 630*717 Sylviani & Elvida YS</p> <p>Kajian Potensi, Tata Niaga dan Kelayakan Usaha Budi Daya Tumbuhan Litsea</p> <p>Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 1, hal. 73 - 91</p> <p>Lemo (<i>Litsea cubeba</i> Persoon L.) termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang sudah semakin langka. Sebagian besar komponen pohon lemo (bunga, buah, daun, dan kulit kayu) dapat dimanfaatkan sebagai minyak atsiri. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum tersedianya informasi potensi dan sebaran tegakan alam lemo, tata niaga lemo dan belum ada masyarakat yang membudidayakannya.</p> <p>Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji sebaran dan potensi pohon lemo, pemanfaatan kulit batang lemo, tata niaga serta kelayakan usaha budidaya pohon lemo. Penelitian sebaran dilakukan di sekitar kawasan hutan lindung Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan kawasan hutan konservasi di Jawa Tengah. Penelitian pemanfaatan dilakukan dengan mencari data dan informasi pada beberapa industri jamu di Jawa Tengah dan para pedagang pengumpul kulit lemo. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa margin pemasaran dan analisa kelayakan budidaya lemo.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran lemo bersifat sporadis dan masih terbatas di hutan alam. Di Jawa Barat, pengembangan lemo di alam dibantu oleh angin dan hewan yang memakan bijinya. Pemanfaatan lemo banyak digunakan oleh industri jamu (hilir) sebagai bahan pengharum jamu yaitu kulit batang lemo yang diperoleh dari masyarakat (hulu) melalui pedagang pengumpul. Ada 3 tipe saluran tataniaga kulit lemo dengan pelaku tataniaga, antara lain masyarakat pemungut kulit lemo; pedagang pengumpul; industri rumah tangga (jamu godokan), dan industri jamu. Berdasarkan analisis margin pemasaran, diketahui bahwa pelaku tataniaga yang memperoleh bagian terbesar adalah pedagang pengumpul I (pertama) yaitu sebesar Rp 6.000,-/kg.</p> <p>Hasil analisis kelayakan usaha budidaya menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan dari setiap ha tumbuhan lemo pada panen tahun ke 8 adalah sebesar Rp 41.402.500,- terdiri dari nilai kulit batang Rp 14.577.500,-, nilai kayu bakar Rp 20.825.000,- dan nilai daun Rp 6.000.000,-. Pada suku bunga 10% dan 12% nilai NPV positif, BCR lebih besar dari 1(satu) dan IRR lebih dari tingkat suku bunga. Sehingga usaha budidaya lemo layak untuk dilakukan. Lemo yang sudah langka diharapkan didorong budidaya dan pengembangan pemanfaatannya baik kulit batang, daun, buah dan akarnya.</p> <p>Kata kunci: Potensi, tata niaga, kelayakan usaha, budidaya, lemo</p>	

FORESTRY SOCIO AND ECONOMIC RESEARCH JOURNAL

ISSN: 1979 - 6013

Date of issue : March 2010

The discriptors given are keywords. The abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC (OSDCF) 630*619 (594.27)
Priyo Kusumedi & Ani Nawir

Financial Analysis of Private Forest Management Partnership in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province

Forestry Socio Economic Journal Vol. 7 No. 1, p. 1 - 21

Cost-benefit analysis (CBA) was used to find the essential problems in private forest management, as well as to provide input in implementing a mutual benefit partnership program. The research was conducted in participative means in order to collect deep information with a case study approach. Primary data was collected through structural interviews and Focus Group Discussion (FGD), also secondary data was collected from related institution, financial analysis was focused to analyze cost-benefit with market value. Result of business feasibility of community forest in three samples of Forest Farmer Groups (KTP) in two villages and two subdistrict of Bulukumba showed that 'KTP Pembangunan Bersama' from Balong Village, Ujungloe Subdistrict was financially suitable despite the fact that calculation result wasn't profitable or equivalent of cost spent and the result gained, on the other hand, 'KTP Suka Maju' and 'Suka Makmur' in Karasing Village, Herlang Subdistrict, was financially unsuitable.

Keyword: *Partnership, private forest, cost-benefit analysis*

UDC (OSDCF) 630*922.2 (594.53)
Ismatul Hakim

Institutional Analysis of Community Forest at Macro Level in the District of Pandéglang, Province of Banten

Forestry Socio Economic Journal Vol. 7 No. 1, p. 23 - 40

The process on institutional strengthening for the community forest in The District of Pandéglang, The Province of Banten, it is necessary to get: 1) an equal understanding and vision of stakeholders involved like The Regional District Government of Pandéglang, The Provincial Government of Banten and Perum Perbutani on the definition of land areas and volume of community forest, 2) The spirit of collaboration among the District Government of Pandéglang, The Provincial Government of Banten and Perum Perbutani (Administratur) on developing the programme and the institution of the community forest to leave out the situation of the groups-building of tight bureaucracy, 3) Improving coordination between the public service on forestry and estate crops and the public service on industrial and trade within the district government of Pandéglang on the utilization of community forest as a supplier of raw material for wood industries. It is necessary to support the policy on sustainable forest management and regional economic growth to the district government. The district government is expected to be able to create the equilibrium of wood raw material supply and the people and industrial demands from the community forest. At the village level (the farmer's group or the on-farm level) it is necessary to create the partnerships between the farmers and the private wood business parties or state owned forest company like Perum Perbutani giving a better professionalism on public service on the planning, management operation (seedlings, infrastructure and financing), product processing and trade of the community forest meet to the farmer's needs. Building new institution on wood based bussines from the community forest will be relatively high cost and it will raise a new problem.

Keywords: *Institutional analysis, community forest, local government rules, collaborative management, supply-demand of wood*

<p>UDC (OSDCF) 630*914 Dian Diniyati, Etna Fauziah & Budiman Achmad</p> <p><i>Potency and Role of the Muslim Boarding School as an Institution to Execute for Land and Forest Rehabilitation Activity</i></p> <p><i>Forestry Socio Economic Journal Vol. 6 No. 1, p. 41 - 54</i></p> <p><i>Pesantren as the Moslem boarding school is defined as a social community with high contribution in governing santri for their life surround which provides a direction and a guideline to societies. The board's component consist of : lodgings, mosque, santri, classical Islamic book and the kyai as a dominant factor. As the forest and land rehabilitation activities need mass people involved, the charismatic kyai and norms are two energy which can mobilize people. The Moslem boarding school is usually located in villages surrounding the forest, so that it would be easier to gather and involve local people. That's why the Moslem boarding school is properly playing more actively role in any environmental conservation efforts, such as greening their own lands and surrounding including the privately owned forest which is able to increase their income. For that reason, the role and comparative advantages of the board need to be promoted especially in relation to the rehabilitation. The study was conducted in Labur Al-wasilah (Garut district, Cibinuk subdistrict, Majasari village) and Cintawana Moslem school boards (Tasikemalaya district, Tanjungjaya subdistrict, Cilolohan village) during May to December 2007. Data were collected by interviewing 2 kyais, 6 the board officers and 29 students supported by questionnaire and then descriptively analyzed. The result showed that the boards have been actively involved in the forestry activities such as building the nursery and facilitating the network between farmers, privates and government sectors. The comparative advantages of the boards comprises of job networking, human resources, social, demography and economics aspects.</i></p> <p>Keywords: Moslem boarding school, santri, forest and land rehabilitation, norms, comparative advantages</p>	<p>UDC (OSDCF) 630*719 (594.55) Tri Sulistyati Widyaningsih & Dian Diniyati</p> <p><i>Economic Contribution and Marketing System of Wanafarma Pattern in Privately Owned Forest Products at Majenang Sub District, Cilacap District</i></p> <p><i>Forestry Socio Economic Journal Vol. 7 No. 1, p. 55 - 71</i></p> <p><i>This study aims at finding out the economic contribution and marketing system of wanafarma (the development of timber and medicinal plants) products. This study was conducted in May-June 2006 in Bener, Sepatnunggal, and Sadabayu Villages, Majenang Sub District, Cilacap District. The number of respondents of this study were 57 farmers, consisting of timber and medicinal plants gatherer. Data were collected through interviews and documentation, and then analyzed by qualitative and quantitative descriptive approach. The results showed that there were several types of wood that had a high market opportunity that was albasia, mahogany, and teak. The main livelihoods of respondents were as farmers and farm laborers in the average area of 0.95 ha planted with albasia, mahogany, annual timber, and medicinal plants. The forests contribution for families income was still low amount 4.69% (timber) and 12.06% (medicinal plants). The flow marketing of two forest products involved farmer, gatherer level I-II, lumber, industrial, and households consumer. The profit margin of albasia timber 10-15 cm amounted 44.05% (farmer), 12% (gatherer I), and 23.91% (gatherer II). The profit margin of cardamon amount 85.45% (farmers), 13.64% (village level collector), and 5.63% (sub district level collectors). Market opportunities for both types of forest products is quite open, especially for industry needs.</i></p> <p>Keywords: Wanafarma privately owned forest, timber plants, medicinal plants, economic contributions, marketing</p>
<p>DC (OSDCF) 630*717 Sylviani & Elvinda YS</p> <p><i>Study of Potencial, Distribution and Feasibility of Litsea Cultivation</i></p> <p><i>Forestry Socio Economic Journal Vol. 7 No. 1, p. 73 - 91</i></p> <p><i>Lemo (Litsea cubeba Persoon L.) belongs to the category of non-timber forest products (NFFP). Most of the components of lemo tree (flowers, fruits, leaves, and bark) can be used as essential oil. However information about potential and distribution in natural stands, trade is not available. Furthermore forest community haven't yet cultivate this plant.</i></p> <p><i>The objective of this research was to assess the distribution and potential of Lemo tree, utilization of Lemo's bark, trade distribution, and the feasibility of Lemo cultivation. The research was conducted around the protected forest areas of Perum Perbutani Unit III West Java and conservation forest areas in Central Java. Meanwhile, research carried out by finding use of data and information on some herbal medicine industry in Central Java and the traders. Research method used was the marketing margin analysis and feasibility analysis Lemo cultivation.</i></p> <p><i>The results showed that the potential and distribution were sporadic and limited in natural forests. In West Java (Perum Perbutani), its natural breeding assisted by wind and eating seeds-animals. Its plant utilization is widely used by the herbal medicine industry as a medicinal ingredient of fragrances, Its bark obtained from the traders. There are 3 types of distribution line of the bark which by industries actors involved: forest community that collect Lemo's bark; traders; household industries (godokan herbs), and herbal medicine industries. Based on the marketing margin analysis that the actors who earns the biggest value of Rp 6000/ kg traders I.</i></p> <p><i>The results of the calculation of the cultivation feasibility analysis shows that the estimated revenue can be obtained from each ha of crops at harvest Lemo to 8 years is Rp 41,402,500 which consists of the value of bark Rp 14,577,500, firewood value Rp 20,825,000 and the value of leaves Rp 6.000.000. With interest rates 10% and 12%, NPV indicates a positive value, BCR greater than 1 and the IRR is more than the interest rates. This results shows that the cultivation of Lemo was feasible. The existence of Lemo is going to be rare, so it is important to encourage the cultivation and development of better utilization of Lemo among bark, leaves, fruits and roots.</i></p> <p>Keywords: Potential, distribution, business feasibility, cultivation, Lemo</p>	

ANALISIS PENGELOLAAN DAN FINANSIAL HUTAN RAKYAT KEMITRAAN DI KABUPATEN BULUKUMBA, PROPINSI SULAWESI SELATAN

*(Analysis of Private Forest Management Partnership and Financial in
Bulukumba Regency, South Sulawesi Province)*

Oleh/By :

Priyo Kusumedi¹&Ani Nawir²

¹BPK Solo, Jl.Jend.Ahmad Yani-Pabelan Kartasura. Tlp. (0271) 716709, Fax 716959

e-mail: p_kusumedi@yahoo.com

²CIFOR, Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia, Tlp.(0251) 622 622, Fax 622 100

e-mail: a.nawir@cgiar.org & adiwinata@anu.edu.au

ABSTRACT

Cost-benefit analysis (CBA) was used to find the essential problems in private forest management, as well as to provide input in implementing a mutual benefit partnership program. The research was conducted in participative means in order to collect deep information with a case study approach. Primary data was collected through structural interviews and Focus Group Discussion (DKT), also secondary data was collected from related institution, financial analysis was focused to analyze cost-benefit with market value. Result of business feasibility of community forest in three samples of Forest Farmer Groups (KTP) in two villages and two subdistrict of Bulukumba showed that 'KTP Pembangunan Bersama' from Balong Village, Ujungloe Subdistrict was financially suitable despite the fact that calculation result wasn't profitable or equivalent of cost spent and the result gained, on the other hand, 'KTP Suka Maju' and 'Suka Makmur' in Karasing Village, Herlang Subdistrict, was financially unsuitable.

Keyword: *Partnership, private forest, cost-benefit analysis*

ABSTRAK

Analisa biaya-manfaat digunakan untuk menemukan berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan rakyat, serta memberi masukan dalam pelaksanaan program kemitraan yang saling menguntungkan. Penelitian dilaksanakan secara partisipatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan data primer melalui wawancara terstruktur dan Diskusi Kelompok Terpokus (DKT), serta data sekunder dari instansi terkait, analisa finansial difokuskan untuk menganalisa biaya dan manfaat yang mempunyai nilai pasar. Hasil kelayakan usaha hutan rakyat di tiga sampel Kelompok Tani Penghijauan (KTP) di dua desa dan dua kecamatan, Kab. Bulukumba yang layak secara finansial adalah KTP Pembangunan Bersama desa Balong Kec. Ujungloe meskipun hasil perhitungannya belum menguntungkan atau masih sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan, sedangkan KTP Suka Maju dan Suka Makmur di desa Karasing, Kec. Herlang tidak layak secara finansial.

Kata kunci: Kemitraan, analisis manfaat-biaya, hutan rakyat

I. PENDAHULUAN

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dan secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 125 desa dan kelurahan. Secara keseluruhan luas hutan berdasarkan penggunaan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari hutan lindung seluas 3.553 ha (11%), hutan produksi terbatas seluas 509 ha (2%), hutan suaka alam seluas 3.475 ha (11%), hutan produksi seluas 931 ha (3%), hutan rakyat seluas 21.843 ha (71%), dan hutan bakau (mangrove) yaitu jalur perlindungan 503,1 ha dan jalur budidaya 262,15 ha atau sekitar 2% (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005). Dari distribusi luas lahan di atas yang terbesar adalah hutan hak atau hutan rakyat, dimana hampir 71% luas kawasan hutan merupakan lahan milik. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik agar kelestarian hasil hutan rakyat dapat tercapai untuk menopang hutan negara sebesar 29% dan kebutuhan industri primer/sekunder serta kebutuhan masyarakat secara luas.

Sekitar 83% dari total luas kawasan hutan dalam keadaan kritis dan telah dirambah, terdapat lahan kritis di dalam dan diluar kawasan seluas 20.197 ha, sementara lahan kritis yang ada di hutan rakyat seluas 5.680 ha dan hutan bakau seluas 125 Ha. Kondisi tersebut membutuhkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dari dinas terkait dan pihak terkait lainnya untuk mengembalikan tata guna lahan dan menjaga fungsi hutan tetap lestari. Hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba sampai tahun 2005, terdapat pada 9 kecamatan yaitu ; 1) Gantarang seluas 1.591,50 ha (7%), 2) Ujung Loe seluas 1.267,90 ha (7%), 3) Bontobahari seluas 4.280,85 ha (20%), 4) Bontotiro seluas 1.576,15 ha (7%), 5) Herlang seluas 1.684,65 ha (8%), 6) Kajang seluas 2.289,35 ha (10%), 7) Bulukumpa seluas 3.448,90 ha (16%), 8) Rilau Ale seluas 2.826,1 ha (13%) dan 9) Kindang seluas 2.667,60 ha (12%) (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005).

Dari kondisi tersebut pasokan kayu rimba campuran di Kabupeten Bulukumba sebagian besar berasal dari hutan rakyat dan sisanya berasal dari luar Kabupaten. Perkiraan jumlah kayu hasil hutan rakyat dengan luas 21.843 ha sebesar 22.942 m³ dari luas 267,6 ha yang merupakan Ijin Pemungutan Kayu Hutan Rakyat (IPKHR). Kebutuhan bahan baku industri kayu (saw mill) sebesar 24.228 m³ dan kebutuhan PT.Palopo Alam Lestari (PT.PAL./industri veneer) sebesar 3.200 m³ yang berasal dari hasil hutan kayu rakyat di Bulukumba. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan pasokan sebesar kurang lebih 5.585 m³/th. Sisa kekurangan bahan bakunya berasal dari re-planting kayu karet dari PT.Londsum sekitar 15.200 m³ – 12.000 m³.

Disisi lain kondisi tersebut tidak didukung oleh ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas. Selain itu penatausahaan hasil hutan rakyat (peredaran kayu) menjadi kendala tersendiri karena banyaknya peraturan daerah yang membuat disinsentif untuk perkembangan pembangunan hutan rakyat. Dari kondisi tersebut maka diperlukan analisis untuk mengetahui apakah pengelolaan hutan rakyat kemitraan di Kabupaten Bulukumba menguntungkan atau tidak. Kajian ini bertujuan untuk menghitung keuntungan dalam usaha hutan rakyat, faktor-faktor apa yang mempengaruhi usaha HR menjadi (lebih) menguntungkan semua pihak secara merata dan biaya-biaya apa saja yang harus di tanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hutan rakyat, dan bagaimana mengatasi biaya yang tinggi.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat

Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama ACIAR-FORDA dan CIFOR pada tahun 2005-2007. Penelitian aspek analisis finansial dilaksanakan pada tahun 2007 dan mengambil lokasi di 3 Kelompok Tani Penghijauan (KTP) yaitu di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe (KTP Pembangunan Bersama), Desa Karassing Kecamatan Herlang (KTP Suka Maju dan KTP Suka Makmur), Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive pada tiga Kelompok Tani Penghijauan (KTP) yang ada di dua desa lokasi kajian yang dianggap mewakili karakteristik dari pengelolaan hutan rakyat yang ada di Kabupaten Bulukumba sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Sampling dilakukan untuk semua pihak yang bermitra: masyarakat, perusahaan, mitra antara, Dinas Kehutanan dan juga non-peserta mitra

B. Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut; alat tulis menulis, alat perekam (minitape recorder), peta lokasi, kuisisioner, kamera, monografi Desa Balong dan Desa Karassing, Bulukumba Dalam Angka tahun 2006 serta perlengkapan lapangan lainnya.

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi :

- a) *Desk study* dengan bahan referensi hasil-hasil penelitian yang telah ada tentang pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba serta produk-produk peraturan perundangan yang berkaitan dengan hutan rakyat.
- b) Survei dalam rangka pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif berupa pendapat pejabat kunci pada instansi terkait seperti KTP Suka Maju, KTP Suka Makmur dan KTP Pembangunan Bersama dan masyarakat, Mitra Antara, PT. PAL, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya dalam rangka validasi. Survei dilakukan dengan instrumen kuesioner dengan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan responden. Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan kerangka sampling (*sampling frame*) yakni anggota kelompok tani penghijauan (KTP) di dua desa sebanyak tiga KTP (2 KTP di Desa Karassing, Kecamatan Herlang dan 1 KTP di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe) yang terlibat dalam embrio kemitraan, dengan tetap memperhatikan peluang keterwakilan masing-masing kelompok masyarakat melalui stratifikasi sampling pada responden yang terpilih dengan intensitas sampling yang digunakan yakni 5% dari total populasi.
- c) Wawancara (konsultasi) dan DKT (*Focus Group Discussion*) dengan pihak terkait (*stakeholder*) yang berkaitan langsung dengan pembangunan hutan rakyat. Langkah pertama dalam upaya untuk mulai melibatkan warga desa dalam kajian kritis keberadaan mereka dalam kawasan itu adalah pengkajian lapangan yang akan dilakukan dengan berbagai teknik misalnya DKT dan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Selain sebagai penelitian untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kegiatan PRA ini juga merupakan proses belajar bagi masyarakat dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk proses perundingan dan perencanaan yang selanjutnya.

Untuk melakukan triangulasi (chek and re-check) terhadap temuan sementara survai, dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT). Disamping itu, analisis ekonomi dilakukan secara bersama-sama antara tim peneliti dengan masyarakat melalui DKT.

d) Workshop

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan oleh tim peneliti dan peneliti lokal (Dinas Kehutanan). Beberapa jenis data yang diambil dalam penelitian antara lain;

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber data pertama, baik melalui wawancara, maupun teknik survei maupun non-survai dan memerlukan validitas (keabsahan) yang harus dibandingkan dengan sumber data primer lainnya maupun data sekunder. Data primer yang diambil meliputi identitas responden, kepemilikan lahan, jenis tanaman, jumlah tanaman per ha, cara pengelolaan lahan, harga jual produk (kayu), harga bibit, tenaga kerja, biaya transport, biaya angkut, biaya dokumen dan lain-lain. Sedangkan data sekunder yang diambil dari monografi desa, luas hutan rakyat dan lain-lain yang mendukung kajian.

2. Data sekunder

Selain data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam maupun FGD, juga dilakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan kajian ini sebagai data sekunder. Data sekunder diperoleh berupa data monografi desa kajian, data demografi/kecamatan dalam angka dan kabupaten dalam angka dari BPS, data base kawasan hutan dan lahan (hutan hak/hutan rakyat) dari Dishut Kab. Bulukumba, serta hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan baik mengenai tabel volume pohon maupun hasil penelitian lainnya.

Tabel 1. Responden survei dan luas areal kelola kelompok tani penghijauan
Table 1. Responden survey and area manage by forest farmer group

Desa (Village)	Kelompok Tani Penghijauan (Forest Farmer Group)	Responden survey (Responden survey)			Peserta FGD (participant FDG)
		Jumlah responden (total responden)	Luas areal sampling (Ha) ^{a)} (sampling area)	Luas wilayah kajian (Ha) ^{a)} (areal of reseacr)	
Karassing	Suka Maju	31	68	199,47	40
	Suka Makmur	31	49	292,75	40
Balong	Pembangunan Bersama	31	34,13	54,75	40

Keterangan:

a) Luas areal kelola dijadikan dasar untuk perhitungan dalam analisa finansial

b) FGD (Focus Group Discussion)

D. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa dengan Analisa Biaya dan Manfaat (*Cost Benefit Analysis*) secara finansial. Analisa finansial difokuskan untuk menganalisa biaya dan manfaat yang mempunyai nilai pasar. Pendekatan harga bayangan (*shadow price*) akan dilakukan untuk memperoleh nilai ekonomi terhadap biaya dan manfaat yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Teknik analisa data dilaksanakan dengan tahapan rekapitulasi data, entri data dan tabulasi. Analisis finansial adalah salah satu cara untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan investasi yang berhubungan dengan perusahaan hutan, dalam hal ini adalah pengelolaan hutan rakyat kemitraan di Kabupaten Bulukumba. Fokus dari analisa finansial adalah menghitung manfaat bersih dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan suatu luasan areal tertentu yang dikelola secara kemitraan dalam jangka waktu kemitraan tertentu. Nilai manfaat bersih ini merupakan nilai sekarang dari manfaat yang akan diperoleh dimasa yang akan datang pada saat panen atau pada saat program kemitraan telah memberikan manfaat tertentu. Mengubah nilai manfaat masa datang ke masa sekarang memerlukan *discount rate* atau tingkat diskonto tertentu yang biasanya berdasarkan tingkat bunga bank yang berlaku.

Kriteria-kriteria ukuran kelayakan proyek dalam analisis finansial (Perkins, 1994) yang digunakan antara lain :

1. Net Present value (NPV)

NPV yaitu nilai manfaat masa akan datang yang dinilai dengan harga-harga pada masa kini, yang didapat dengan mendiskonto semua biaya dan pendapatan pada suku bunga diskonto dan kemudian hasil diskonto pendapatan dikurangi hasil diskonto biaya. Suatu kegiatan dikatakan layak jika NPV Positif.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

Keterangan : B_t : Benefit (Manfaat atau penerimaan) pada tahun ke-t

C_t : Cost (Biaya) pada tahun ke-t

i : interest (suku bunga) yang merupakan faktor diskonto

t : satuan waktu dalam tahun

n : tahun ke n

2. Benefit Cost Ratio (BCR)

BCR atau rasio penerimaan dengan biaya, yang didapat dengan membagi jumlah hasil diskonto pendapatan dengan jumlah hasil diskonto biaya. Kegiatan dikatakan layak jika BCR lebih besar dari satu.

$$BCR = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}$$

Keterangan:

B_t : Benefit (Manfaat atau penerimaan) pada tahun ke-t

C_t : Cost (Biaya) pada tahun ke-t

i : interest (suku bunga) yang merupakan faktor diskonto

t : satuan waktu dalam tahun

n : tahun ke n

3. Internal Rate of Return (IRR)

IRR adalah tingkat bunga dimana bila digunakan untuk mendiskonto seluruh selisih kas masuk pada tahun-tahun operasi proyek akan menghasilkan jumlah kas yang sama dengan jumlah investasi proyek. Pada dasarnya IRR menggambarkan presentase laba senyatanya yang dapat dihasilkan oleh proyek (Husnan dan Suwarsono, 1994). Nilai IRR ditentukan dengan mencari nilai faktor diskonto (*discount rate*) yang membuat nilai NPV sama dengan nol. Untuk menentukan berapa tepatnya tingkat bunga tersebut adalah dengan menggunakan metoda interpolasi, yakni dengan menyisipkan tingkat bunga diantara bunga yang menghasilkan NPV positif dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. Suku bunga diskonto yang menyebabkan jumlah hasil diskonto pendapatan sama dengan jumlah hasil diskonto biaya, atau suku bunga yang membuat NPV sebesar nol. Suatu proyek dikatakan layak bila IRR lebih besar dari suku bunga diskonto.

4. Asumsi-asumsi yang digunakan

Beberapa asumsi untuk melakukan analisa kelayakan finansial dalam penelitian ini, antara lain:

- Unit analisa untuk pengelolaan model kemitraan adalah Kelompok Tani Penghijauan (KTP) di dua desa dan dua kecamatan (Desa Karasing, Kec. Herlang dan Desa Balong, Kec. Ujungloe) yaitu total luasan areal kelola responden sample dan total luas wilayah kerja KTP.
- Jangka waktu analisa adalah sejak masyarakat mulai terlibat dalam kemitraan, (Desa Karasing mulai tahun 2005 dan Desa Balong mulai tahun 2004), selama 25 tahun yaitu panen terakhir tanaman kayu yang bibitnya dari PT. PAL.
- Komoditi yang dimitrakan adalah jenis kayu sengon, mahoni dan gmelina dari PT. PAL, sedangkan pemberian dari perusahaan lainnya belum bisa dihitung karena keterbatasan dokumentasi data dan distribusinya.

- d) Bunga diskonto didekati dengan suku bunga komersial sebesar 13%.
- e) Investasi pemerintah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba berupa Anggaran Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Bulukumba tahun 2005 pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Herlang dan Kecamatan Ujungglloe.
- f) Biaya yang dialokasikan pada lokasi kajian ditetapkan berdasarkan pendekatan luas KTP dibagi dengan luas kecamatan dikalikan biaya-biaya pengembangan hutan rakyat.
- g) Input dari masyarakat yang diperhitungkan dalam analisis terutama biaya tenaga kerja, bahan dan alat.
- h) Analisis ekonomi tidak dilakukan karena tegakan masih berumur 3-4 tahun sehingga dianggap belum mempengaruhi iklim makro di sekitar desa kajian.
- i) Pengeluaran untuk investasi dan harga-harga faktor-faktor produksi didasarkan pada harga konstan.
- j) Harga jual dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap tetap dan penerimaan atas penjualan pada tahun yang bersangkutan diasumsikan dapat diterima pada tahun yang sama.
- k) Satuan yang digunakan adalah rupiah per hektar per tahun (Rp/ha/tahun).
- l) Pendapatan tanaman pokok kehutanan dihitung sejak terjadinya penebangan sampai tebang akhir.
- m) Satu Hari Orang Kerja (HOK) dinilai dengan upah yang berlaku dilokasi studi.
- n) Umur kelayakan proyek dihitung sampai umur tebang ideal tanaman kehutanan

5. Verifikasi

a. Pleno di tingkat desa

Informasi dari lapangan dibahas bersama oleh warga desa dalam pertemuan (lokakarya) tingkat desa. Selain sebagai ajang kompilasi dan triangulasi informasi, pleno juga merupakan upaya membangun kesepakatan antar warga desa, baik tentang persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan secara intern oleh desa, maupun tentang persoalan yang perlu diangkat ketingkat yang lebih tinggi. Diharapkan pemecahan masalah lokal bisa dilakukan secara mandiri oleh warga desa, dan warga desa dapat menyepakati tim perwakilan desanya untuk menghadiri pleno tingkat kabupaten.

Pleno ini merupakan wahana bagi untuk meneliti ulang hasil temuan sementara tim kajian. Pleno Desa dilaksanakan dalam dua tahapan diskusi kelompok dan diskusi pleno. Tim Kajian melakukan presentasi hasil sementara kajian kemudian klarifikasi hasil temuan dan diskusi dengan tiga topik sesuai keluaran (*output*) dari tahapan ini. Tiga topik tersebut, *Pertama*, menemukenali persoalan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat baik yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat khususnya peredaran hasil hutan rakyat (pemunugutan hasil hutan rakyat). *Kedua*, merumuskan apa itu kemitraan versi masyarakat dalam konteks pengelolaan hutan rakyat selama ini di Kabupaten Bulukumba. *Ketiga*, meneliti ulang asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis finansial dan hasil sementara analisis tersebut.

b. Pleno di tingkat kabupaten

Hasil kajian yang telah diverifikasi di pleno desa, kemudian disampaikan oleh masing-masing perwakilan desa di pleno kabupaten. Pleno kabupaten sekaligus menjadi ruang negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten terkait dengan harapan masyarakat yang tertuang dalam hasil kajian. Peserta pleno kabupaten yakni lintas instansi

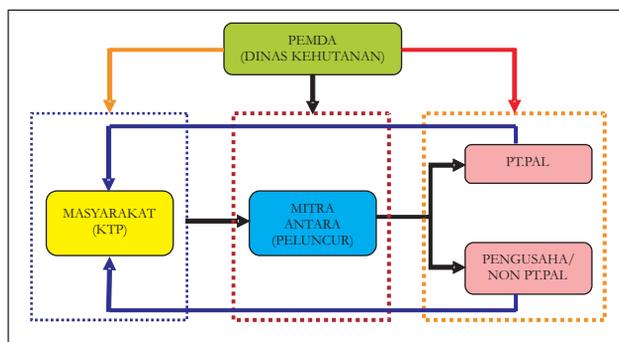
teknis pemerintah, LSM maupun perwakilan masyarakat lokasi model lain di luar lokasi kajian. Tahapan ini dapat menjadi media untuk mempengaruhi cara pandang pemerintah dan pihak lain. Selain itu tahapan ini menjadi penting untuk mendorong adanya kebijakan yang menumbuhkan kemitraan yang adil antara masyarakat dengan pihak lain dalam pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba

Kemitraan pengelolaan dan pemasaran hasil hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba dilakukan antara masyarakat, sebagai pemilik lahan, dengan PT. PAL atau perusahaan kayu (*sawmill*) lain, sebagai pihak perusahaan, yang melakukan pembelian kayu rakyat melalui mitra antara/tengkulak/peluncur. Mitra antara (MA) yang melakukan pengumpulan kayu rakyat merupakan perpanjangan tangan dari PT. PAL dan perusahaan kayu lain karena ikatan permodalan yang telah diberikan kepada MA dan tidak memiliki ikatan resmi untuk menjual kayu tersebut ke PT. PAL maupun Perusahaan Kayu lainnya. Apabila terdapat selisih harga pembelian kayu, maka mitra antara berhak untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lain di luar PT. PAL. Hal ini terjadi karena adanya beberapa MA yang ada di Bulukumba, antara lain; MA dari PT. PAL, MA antara perusahaan non PT. PAL dan MA mandiri.

Selama ini petani sebagai penerima harga (*price taker*) untuk hasil hutan kayu dengan sistim pembelian berdasar hamparan lahan maupun per pohon/batang untuk jenis jati, sengon, jati putih, mahoni dan bitti. Masyarakat menerima harga bersih tanpa dikurangi oleh biaya-biaya antara lain; biaya transportasi, biaya panen, biaya pengurusan dokumen dan biaya pendukung lainnya yang ditanggung oleh MA. Sedangkan MA menjual produk (kayu/log) dalam satuan kubik (m^3) kepada PT. PAL maupun perusahaan kayu lainnya berdasarkan standar kualitas jenis kayunya. Kondisi ini sangat menguntungkan pihak MA karena mendapatkan *profit margin* yang cukup besar dari penjualan dengan sistim ini. Hal ini dianggap wajar karena MA menanggung semua biaya dan melakukan pengurusan dokumen walaupun sebagian modalnya berasal dari PT.PAL atau perusahaan kayu lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian dalam kajian ini. Secara ringkas pola kemitraan yang ada di Kab. Bulukumba bisa dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Bulukumba

Figure 1. Model of Private Forest Management Partnership in Bulukumba Regency

Tiga pelaku utama dalam kemitraan, yaitu Dinas Kehutanan Kab. Bulukumba sebagai perwakilan pemerintahan, masyarakat/KTP dan PT. PAL atau perusahaan kayu lainnya. Peran masing-masing pelaku kemitraan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan (Dishut) Kab. Bulukumba memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dan PT. PAL di desa Balong melalui pemberian bibit tanaman kehutanan yang dituangkan dalam berita acara penerimaan dan penanaman bibit pada lahan masyarakat dalam bentuk kontrak kerjasama sederhana. Peran dinas kehutanan dalam kemitraan ini adalah mengakomodir kepentingan masyarakat dan pihak lain, melakukan panduan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan legalisasi IPKHR (Ijin Pemungutan Kayu Hutan Rakyat).

Hasil hutan kayu yang diperdagangkan dalam kemitraan ini adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*), Gmelina (*Gmelina arborea*), karet (*Hevea brasiliensis*) dan jenis kayu lainnya. Dinas Kehutanan memfasilitasi pemberian/pelayanan ijin dan dokumen pendukung (IPKHR, SKSHH-SKSB, tim cruising) untuk memperlancar proses pemungutan hasil hutan rakyat oleh pengusaha, sedangkan peran Dishut untuk masyarakat adalah mediasi dan fasilitasi dalam sosialisasi kebijakan/program, advis teknis kehutanan dan pengembangan kemitraan dengan pihak lainnya.

2) Masyarakat

Masyarakat sebagai pemilik lahan menerima bantuan bibit sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan gmelina (*Gmelina arborea*) dan bibit lainnya dari PT. PAL maupun dari perusahaan lainnya mulai tahun 2004-sekarang, dengan syarat masyarakat harus memelihara tegakan tersebut dan tidak diperkenankan memindah-tangankan ke pihak lain. Selama ini pemberian bibit melalui KTP dan mekanisme pemberiannya dilakukan untuk anggotanya masing-masing walaupun dianggap pemberian bibit ini belum merata karena belum semua anggota menerimanya.

3) Mitra Antara (MA)

Mitra antara (MA) sebagai pihak yang mengumpulkan kayu dari masyarakat dan menjualnya ke PT. PAL atau perusahaan lainnya. Ada beberapa jenis MA yang ada di Kab. Bulukumba antara lain; MA PT. PAL, MA non-PT. PAL dan MA Mandiri. Perbedaan antar MA didasarkan atas cara memperoleh modal yang diberikan oleh PT. PAL atau perusahaan lainnya. MA PT. PAL berkewajiban menjual kayu kepada PT. PAL karena modal kerjanya berasal dari perusahaan tersebut. MA non-PT. PAL berkewajiban menjual kayu kepada perusahaan/CV yang memberikan modal kerja. Sedangkan MA mandiri bebas untuk menjual kayu kepada pihak yang dianggap memberikan keuntungan lebih besar. Pada kenyataannya MA tidak terikat secara legal formal dengan perusahaan sehingga ada beberapa mitra yang menjual kayu kepada perusahaan yang memberikan keuntungan lebih besar. Nama lokal dari MA adalah **"peluncur"** atau lebih dikenal dengan nama tengkulak/pengumpul. Kondisi saat ini MA mengumpulkan dan membeli kayu rakyat dalam bentuk hamparan (jenis jati) dan dalam bentuk per pohon atau per batang (jenis sengon, jati putih, mahoni) dengan menanggung semua biaya panen, transportasi serta pengurusan dokumen utama dan dokumen pendukung lainnya.

4) PT. Palopo Alam Lestari (PT.PAL)

PT. PAL adalah perusahaan kayu yang terlibat dalam embrio kemitraan, dimotivasi oleh dinas kehutanan Kab. Bulukumba untuk mengolah kayu sengon dan gmelina hasil hutan rakyat. PT. PAL belum membuat kesepakatan kerjasama tertulis dengan masyarakat (KTP) untuk membeli kayu tersebut di kemudian hari setelah masak panen berdasarkan harga pasar yang berlaku sehingga masyarakat bebas menjual pada perusahaan lain yang menawarkan harga lebih baik. Sampai saat ini PT. PAL hanya memberi bibit sengon dan gmelina secara gratis kepada KTP.

Tabel 2. Lokasi pembagian bibit PT. PAL
Table 2. Location of seed distribution in PT.PAL

Kelompok Tani Penghijauan (KTP) (Forest Farmers Group)	Tahun (Years)	Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>)	Jati putih (<i>Gmelina orborea</i>)	Total
KTP Suka Maju (292,75 Ha)	2005	3,220	-	3,220
	2006	122	81	203
	Total	3,342	81	3,423
KTP Suka Makmur (199,47 Ha)	2006	178	119	297
	Total	178	119	297
KTP Pembangunan Bersama (54.75 Ha)	2005	18,930	-	18,930
	2007	1,469	14,811	16,280
	Total	20,399	14,811	35,210

Sumber : PT. PAL, 2007
Source : PT.PAL, 2007

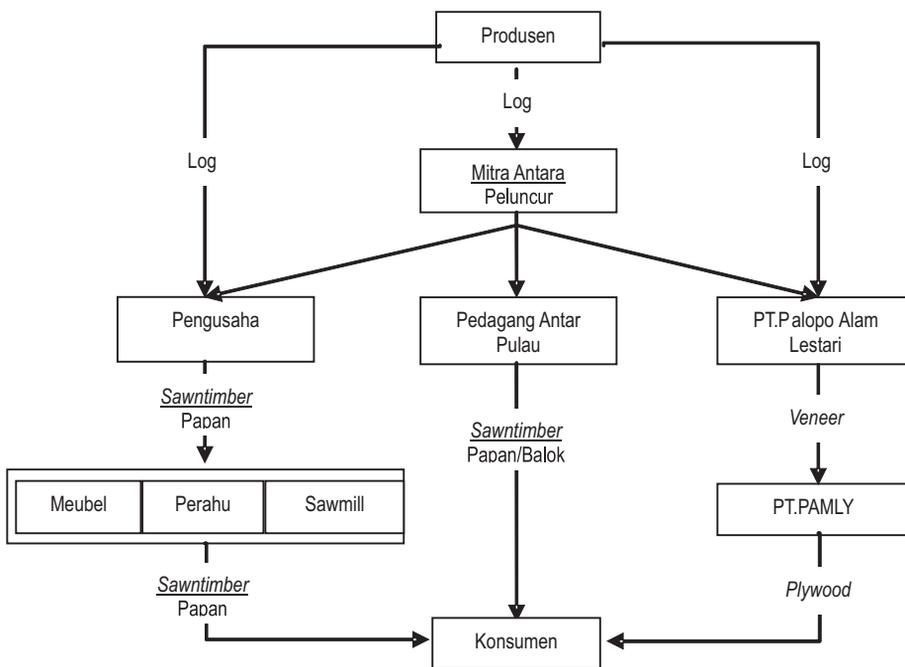
PT. PAL membeli kayu rakyat dalam ukuran kubikasi melalui MA sebagai pemasok ke PT. PAL. PT. PAL hanya menerima kayu lunak seperti sengon, gmelina, dan randu serta tidak menerima kayu keras seperti jati, bitti dan mahoni dengan panjang, diameter dan standar mutu yang telah ditentukan. Harga untuk kayu rimba tersebut dianggap seragam yaitu diameter > 20 cm harganya Rp.250.000/m³ dengan asumsi dokumen lengkap dan Rp. 220.000 dengan asumsi tanpa dokumen sedangkan untuk diameter < 20 cm harganya Rp.150.000,-/m³. PT. PAL membuat produk veneer yang akan dijual kepada perusahaan induknya yaitu PT. PAMPLY di Kabupaten Palopo.

5) Perusahaan Kayu/ Sawmill (Non PT. PAL)

Perusahaan non-PT.PAL menerima kayu yang berasal dari mitranya dengan sistem pembelian kubikasi untuk semua jenis kayu yang ada di Kab. Bulukumba baik jati, bitti, sengon, karet, mahoni, jati putih dan lain-lain. Perusahaan kayu ini menjual kayu dalam

bentuk bantalan (istilah pengganti balok di Bulukumba) ke Kabupaten lain, Makassar maupun antar pulau terutama Jawa. Sampai saat ini pasokan rimba campuran di Kabupaten Bulukumba berasal dari hutan rakyat dan dari luar Kabupaten. Perkiraan jumlah kayu yang diproduksi dari hutan rakyat dengan luas 21.843 ha adalah sekitar 22.942 m³ dari luas 267,6 ha (sesuai data IPKHR).

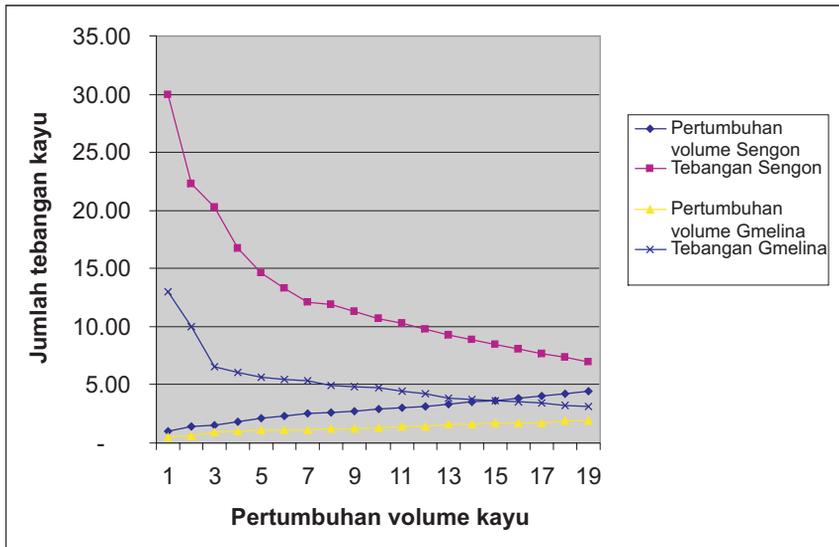
Dari kondisi tersebut perdagangan kayu rimba campuran di Kabupaten Bulukumba mengalami masalah yaitu pasokan kayu lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan industri yang ada. Industri perikanan yang ada memberikan kesempatan kerja kurang lebih kepada 20.000 KK di Kabupaten Bulukumba. Di sisi lain, usaha hutan rakyat yang dilaksanakan oleh petani belum tentu menguntungkan karena rantai penjualan yang panjang (Gambar 2). Hal ini salah satu penyebabnya adalah kurang jelasnya besar biaya yang harus ditanggung oleh petani, MA atau pengusaha sawmill dan PT. PAL. Di samping itu nilai tambah dari produk yang dijual masih rendah karena sebagian besar petani menjual dalam bentuk log.



Gambar 2. Tata Niaga Kayu di Kabupaten Bulukumba
(Figure 2. Trading system of timber in Bulukuma Regency)

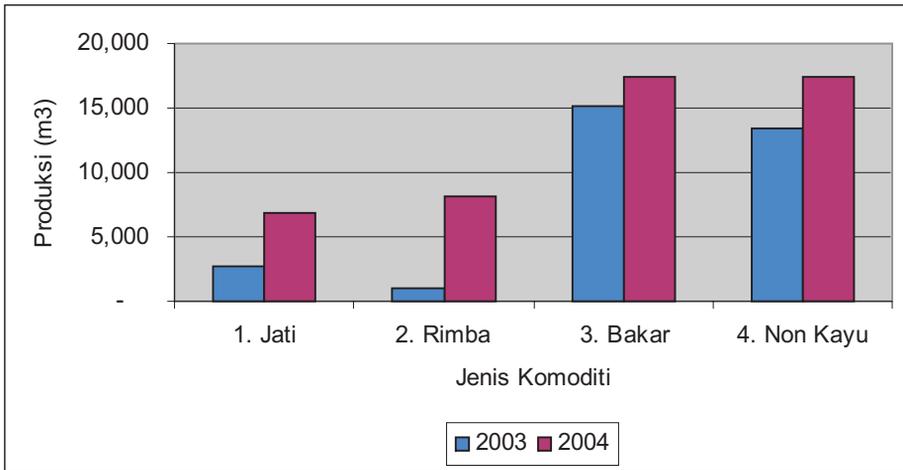
Permintaan kayu rimba campuran di Bulukumba setiap tahunnya meningkat (lihat Gambar 3), tetapi kualitas yang dibutuhkan belum terpenuhi dari kayu yang ditawarkan. Sementara itu harga log yang ditawarkan oleh PT. PAL tidak bersaing dengan harga yang ditawarkan industri lain. Standar harga kayu rimba dan kayu karet yang dikeluarkan oleh PT. PAL adalah diameter > 20 cm sebesar Rp. 250.000/m³ (dokumen lengkap) dan Rp. 220.000/m³ (dokumen PT.PAL yang urus) dan diameter < 20 cm: Rp. 150.000/ m³, sedangkan harga

log kayu rimba untuk pengusaha sawmill lainnya berkisar Rp. 300.000-450.000/m³. Jadi ada selisih harga yang cukup besar yang ditawarkan oleh pengusaha sawmill lainnya yang bisa berakibat pada pindahnya penjualan log petani ke tempat lain yang sudah bermitra dengan PT. PAL. Di sisi lain permintaan dari luar Bulukumba lebih menarik dengan harga yang lebih tinggi, di samping belum adanya aturan main untuk mengatur kayu masuk dan keluar Bulukumba untuk menjamin pemenuhan permintaan kayu domestik di Kabupaten Bulukumba.



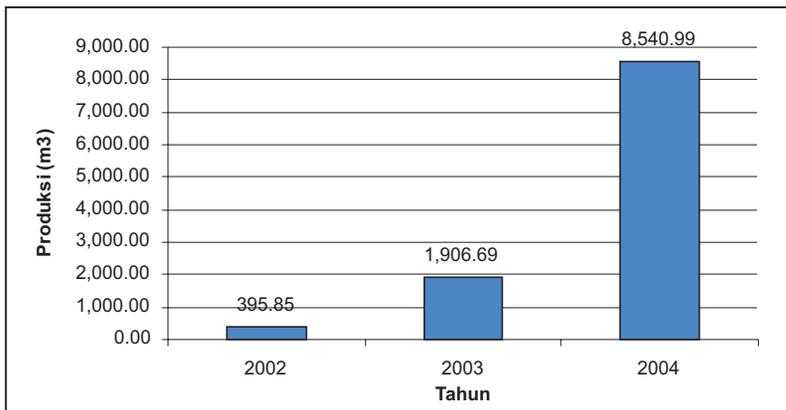
Gambar 3. Perbandingan volume kayu dengan jumlah tebangan di Kabupaten Bulukumba
Figure 3. Comparison of timber volume with total harvesting in Bulukumba Regency

Produksi kayu dan non kayu tahun 2003-2004 di Kab. Bulukumba, cenderung mengalami kenaikan seperti pada Gambar 4, mengindikasikan bahwa hutan yang ada di Kab. Bulukumba dieksploitasi setiap tahunnya dengan kenaikan produksi sebesar 12% untuk kayu rimba, 39% untuk kayu jati dan 87% untuk kayu bakar serta 77,14% untuk non kayu. Sementara untuk produksi kayu bulat dan olahan pada tahun 2004, hampir 54% merupakan komoditi kayu bulat dengan besarnya produksi sekitar 16.000 m³ (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005).

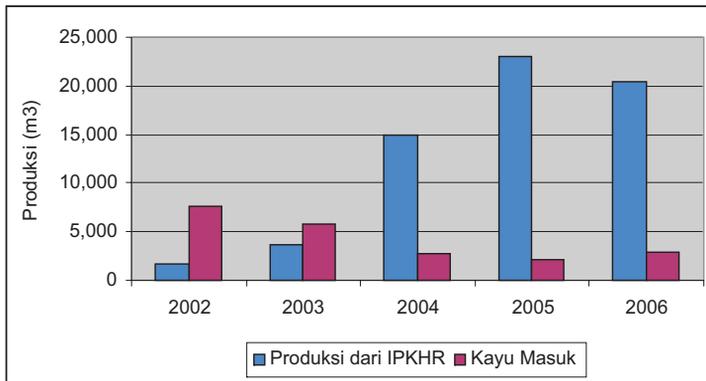


Gambar 4. Produksi Kayu dan Non Kayu tahun 2003-2004 di Kab. Bulukumba
Figure 4. Timber and Non Timber production 2003-2004th in Bulukumba Regency

Produksi kayu olahan di Kab. Bulukumba mengalami kenaikan yang cukup fantastis pada tahun 2004, yaitu hampir 5 kali lipat. Kondisi tersebut disebabkan pada tahun 2003-2004 perkembangan industri sektor kehutanan mengalami peningkatan dengan indikator semakin banyaknya industri sawmill kayu jati dan kayu rimba yang berijin maupun tidak berijin dengan jumlah sekitar 40 industri kayu. Sedangkan pada Gambar 7, terlihat produksi dari IPKHR dibandingkan dengan kayu yang masuk dari luar Kabupaten Bulukumba sangat menyolok, dimana kecenderungannya untuk IPKHR semakin naik hanya mengalami penurunan pada tahun 2006. Sedangkan untuk kayu yang masuk dari luar Kab. Bulukumba mengalami penurunan (Dinas Kehutanan Kab. Bulukumba, 2005).



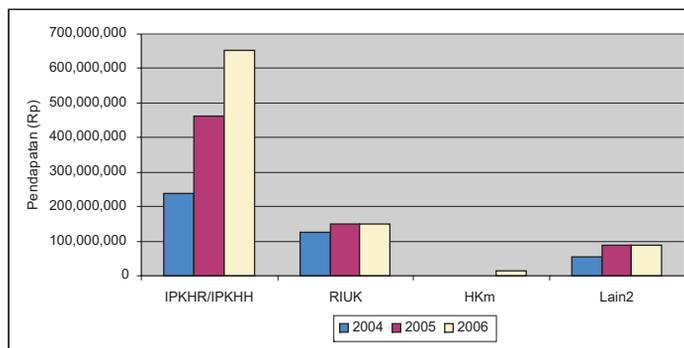
Gambar 5. Produksi kayu olahan di Kab. Bulukumba 2002-2004
Figure 5. Sawntimber production in Bulukumba Regency



Gambar 6. Perbandingan produksi dari IPKHR dengan kayu yang masuk ke Kab. Bulukumba (2002-2006)

Figure 6. Comparison of pProduction for IPKHR with all timber entery Bulukumba Regency 2002-2006

Pendapatan Dishut Kab. Bulukumba dari sektor kehutanan, setiap tahunnya mengami kenaikan yang cukup besar yaitu sekitar 2 kali lipat per tahunnya khususnya dari pengelolaan hutan rakyat seperti terlihat pada Gambar 7. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa hutan rakyat merupakan andalan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan. Apabila dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain seperti pendapatan dari kawasan hutan negara (hutan produksi, HKm) hampir mencapai perbandingan 1 : 7. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari retribusi-retribusi yang dikenakan pada hasil hutan rakyat pada kayu jati dan kayu rimba campuran. Hal ini apabila tidak diantisipasi lebih lanjut oleh Dishut maka hutan rakyat yang ada di Kab. Bulukmba akan mengalami degradasi setiap tahunnya apabila tidak diikuti dengan permudaan agar hutan rakyat di Kab.Bulukumba lestari (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005).



Gambar 7. Pendapatan Dinas Kehutanan Kab. Bulukumba dari Sektor Kehutanan (2004-2006)

Figure 7. Revenenue from forestry sector of Forestry Regional Office at Bulukumba Regency

B. Analisa Finansial

Analisis finansial bertujuan mengetahui kelayakan investasi pengusahaan hutan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan selama daur pohon kehutanan (misalnya 25 tahun). Arus biaya meliputi biaya perencanaan, pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan baik untuk tanaman kehutanan (kayu) maupun tanaman pertanian. Arus penerimaan meliputi hasil yang diperoleh petani dalam pengelolaan hutan berupa hasil tanaman kehutanan (kayu) yang dimitrakan dengan pengusaha (PT. PAL).

Dasar perhitungan analisis finansial kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut;

1. Perhitungan berdasarkan luasan areal kelola KTP
2. Tiga (3) KTP lokasi studi
 - Pembangunan Bersama (Balong): 54,75 Ha
 - Suka Makmur (Karassing): 199,47 Ha
 - Suka Maju (Karassing): 292.75 Ha
3. Perhitungan dimulai pada tahun dimana masyarakat menerima bibit dari PT. PAL
4. Dihitung selama 25 tahun, atau sampai panen kayu berdasarkan habisnya bibit yang dialokasikan oleh PT. PAL
5. Perhitungan biaya dan penerimaan dihitung untuk seluruh pelaku (petani, MA/pengusaha, PAL, Dishut)
6. Tingkat bunga komersial yang digunakan adalah 13%
7. Ada keterbatasan data & informasi sehingga untuk beberapa komponen biaya dan penerimaan dilakukan penduga

Tabel 3. Analisis Finansial Kelompok Tani Penghijauan (KTP)

Table 3. Financial analysis of farmers group

Jenis kayu (<i>Timber species</i>)	Penerimaan kayu (Rp juta) (<i>Income from timber</i>)		
	Pembangunan Bersama (25 thn)	Suka Makmur (7 tahun)	Suka Maju (9 tahun)
Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	1.158.532.572	10.622.324	198.753.076
Jati Putih (<i>Gmelina orborea</i>)	201.866.971	2.968.711	3.156.358
Nilai tegakan Gmelina yang belum dipanen (<i>Standing stock</i>)	64.878.159	-	-
NPV	12.622.021	- 970.053.068	- 1.070.631.865
BCR	1.01	0,0048	0,16
IRR	13%	-	-

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengelolaan hutan rakyat kemitraan di KTP Pembangunan Bersama Desa Balong, Kecamatan Ujungloe layak secara finansial, hal ini ditandai dengan nilai NPV sebesar Rp. 12.622.02, artinya kemitraan pengelolaan hutan rakyat layak secara finansial walaupun masih dalam taraf minimal dan sebanding dengan suku bunga bank yang berlaku pada saat itu. Apabila kita gunakan IRR maka nilainya adalah 0,13 artinya dan suku bunga diskonto yang menyebabkan jumlah hasil diskonto pendapatan sama dengan jumlah hasil diskonto biaya, atau suku bunga yang mempuat NPV sebesar nol. Suatu proyek dikatakan layak bila IRR lebih besar dari suku bunga diskonto, sehingga apabila kita melihat ini pengusahaan hutan rakyatnya belum menguntungkan. Sedangkan apababila kita menggunakan BCR akan didapatkan nilai sebesar 1,01 artinya jika sebuah proyek memiliki nilai BCR lebih dari satu maka benefit atau keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sehingga hutan rakyat kemitraan di KTP Pembangunan Bersama layak untuk diusahakan.

Untuk KTP Suka Makmur di Desa Karassing Kecamatan Herlang bahwa pengelolaan hutan kemitraan belum menguntungkan secara finansial, hal ini ditandai dengan nilai NPV sebesar Rp. - 970.053.068 dan BCR sebesar 0.0048 artinya bahwa kemitraan pengelolaan hutan rakyat belum layak secara finansial karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Sedangkan untuk KTP Suka Maju di Desa Karassing Kecamatan Herlang, pengelolaan hutan kemitraan belum menguntungkan secara finansial, hal ini ditandai dengan nilai NPV sebesar Rp. - 1.070.631.865 dan BCR sebesar 0.16 artinya bahwa kemitraan pengelolaan hutan rakyat belum layak secara finansial karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

Tabel 4. Jumlah dan presentase biaya berdasarkan stakeholder yang terlibat kemitraan
Table 4. Total and cost percentage based on stakeholders community partnership

Jumlah biaya berdasarkan pelaku	KTP Pembangunan Bersama		KTP Suka Makmur		KTP Suka Maju	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
a. Biaya finansial pemerintah	1.517.152	0,11	6.624.581	0,3	5.241.219	0,4
b. Biaya finansial masyarakat	344.703.478	24	1.963.820.045	99,0	1.088.337.609	85,4
c. Biaya finansial Mitra Antara (MA)	1.050.779.679	74	14.030.444	0,7	170.568.149	13,4
d. Biaya finansial PAL	15.655.372	1	175.635	0,01	9.634.138	0,8
Total biaya finansial	1.412.655.681	100	1.984.650.705	100	1.273.781.114	100

Untuk memperjelas proporsi biaya dan komponennya oleh mitra antara (MA) pada KTP Pembangunan Bersama bisa dilihat pada Tabel 4. Biaya yang paling besar dikeluarkan oleh MA adalah biaya angkut sebesar 59%, kemudian menyusul biaya administrasi 29% dan biaya tebang sebesar 12%. Kondisi ini menyebabkan besarnya biaya finansial MA yang harus dikeluarkan dalam penatausahaan hasil hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba sebesar 74%.

Tabel 5. Proporsi biaya mitra antara (MA) berdasarkan komponennya pada KTP Pembangunan Bersama, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe

Table 5. Cost proportion of middleman (MA) based on component for farmer forest groups Pembangunan Bersama, Balong Village, Ujungloe District

Komponen Biaya Mitra Antara	Rp	Persentase (%)	Persentase terhadap total komponen (%)
1. Biaya administrasi			
a. Setoran ke Desa	25.969.650		8,5
b. Cruising	19.477.237		6,4
c. Retribusi	64.924.125		21,3
d. SKSHH	194.772.374		63,8
Jumlah biaya administrasi	305.143.385	29	100
2. Biaya tebang			
a. Sewa chainsaw	17.635.252		14,3
b. Tenaga kerja	105.811.514		85,7
Jumlah biaya tebang	123.446.767	12	100
3. Biaya angkut			
a. Tenaga kerja muat	64.924.125		10,4
b. Tenaga kerja angkut-bongkar	232.644.780		37,4
c. Sewa truk	324.620.623		52,2
Jumlah biaya angkut	745.636.294	59	100
Total biaya MA	1.050.779.679	100	

Proporsi biaya yang harus dikeluarkan oleh stakeholder di Desa Karasing, Kecamatan Herlang agak berbeda dengan di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe seperti terlihat pada Tabel 6. Proporsi biaya terbesar yang dikeluarkan oleh masyarakat (petani) yaitu sekitar 99%, kemudian secara berurutan pemerintah sebesar 0,33%, mitra antara 0,17%, dan PT. PAL sebesar 0,01%. Kondisi ini disebabkan tidak sesuai jumlah bibit yang dibagikan dengan luas areal kerja pada masing-masing KTP, di samping berbagai macam biaya administrasi, pemanenan dan angkut kayu yang cukup besar dalam penatausahaan hasil hutan rakyat.

Tabel 6. Proporsi biaya berdasarkan komponennya pada KTP Suka Makmur, Desa Karassing, Kecamatan Herlang

Table 6. Cost proportion of middleman (MA) based on component for farmer forest groups Suka Makmur, Balong Village, Herlang District

Komponen Biaya Mitra Antara	Rp	Persentase (%)	Persentase terhadap total komponen (%)
1. Pemerintah			
a. Sosialisasi kebijakan	230.675	3	
b. Bantuan saprodi	2,167.449	33	
c. Administrasi	300.206	5	
d. Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan	322.174	5	
e. Penyuluhan	1,250.859	19	
f. Desiminasi	2,353.218	36	
Jumlah	6,624.581	100	0,33
2. Masyarakat			
a. Peralatan	25.234.241	1	
b. Tenaga kerja	1.911.250.157	97	
c. PBB	27.283.014	1	
d. Pengambilan bibit	52.633	0	
Jumlah	1,963.820.045	100	99
3. Mitra antara			
a. Adminstrasi	4.204.873	30	
b. Penebangan Kayu	1.251.806	9	
c. Angkut Kayu	8.573.765	61	
Jumlah	14.030.444	100	0,17
4. PT. PAL			
a. Bibit	131.583	75	
b. Administrasi	44.052	25	
Jumlah	175.635	100	0,01
Total biaya Finansial	1,984.650.705		

Proporsi biaya yang harus dikeluarkan oleh stakeholder hampir sama dengan di KTP Suka Makmur bedanya hanya pada prosentase saja yaitu masyarakat (petani) sekitar 85%, kemudian secara berurutan mitra antara 13%, PT. PAL sebesar 1% dan pemerintah sebesar 0,41%. Kondisi ini relatif hampir sama dengan apa yang terjadi di KTP Suka Makmur di Desa Kecamatan yang sama.

Tabel 7. Proporsi biaya berdasarkan komponennya pada KTP Suka Maju, Desa Karassing, Kecamatan Herlang

Table 7. Cost proportion of middleman (MA) based on component for farmer forest groups Suka Maju, Balong Village, Herlang District

Komponen Biaya Mitra Antara	Rp	Persentase (%)	Persentase terhadap total komponen (%)
1. Pemerintah			
a. Sosialisasi kebijakan	157.174	3	
b. Bantuan saprodi	1.476.827	28	
c. Administras	231.297	4	
d. Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan	1.156.484	22	
e. Penyuluhan	963.737	18	
f. Desiminasi	1.255.700	24	
Jumlah	5.241.219	100	0,41
2. Masyarakat			
a. Peralatan	19.319.852	2	
b. Tenaga kerja	1.051.475.581	97	
c. PBB	13.924.808	1	
d. Pengambilan bibit	601.648	0	
Jumlah	1.088.337.609	100	85
3. Mitra antara			
a. Adminstrasi	50.006.868	29	
b. Penebangan Kayu	18.596.922	11	
c. Angkut Kayu	101.964.359	60	
Jumlah	171.568.149	100	13
4. PT. PAL			
a. Bibit	9.554.053	99	
b. Administrasi	80.085	1	
Jumlah	9.634.138	100	1
Total biaya Finansial	1.273.781.114		

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan analisis finansial yang dilakukan pada tiga KTP di Kabupaten Bulukumba, maka ada beberapa pelajaran yang bisa diambil antara lain;

1. Pengelolaan hutan rakyat kemitraan di Kabupaten Bulukumba secara umum belum menguntungkan secara finansial.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha hutan rakyat kemitraan antara lain; jumlah bibit yang diterima tidak sesuai dengan luasan KTP yang diusahakan, sehingga usaha hutan rakyat menjadi belum menguntungkan; tidak adanya standar harga berdasarkan kualitas dan jenis kayu, menyebabkan petani dirugikan (misalnya pembelian dengan sistem tebas hamparan) dan biaya administrasi (SKSHH, retribusi, cruising dan setoran ke desa) yang cukup tinggi.
3. Apabila usaha hutan rakyat belum layak, petani mempunyai beban untuk menanggung biaya yang cukup tinggi, terutama biaya tenaga kerja.
4. Pada usaha yang sudah layak, MA menanggung jumlah biaya yang cukup tinggi, terutama untuk biaya panen dan angkut (tetapi juga menikmati margin keuntungan yang cukup besar).
5. Untuk mengatasi biaya yang menyebabkan membengkaknya usaha hutan rakyat perlu adanya perbaikan kebijakan tentang biaya administrasi dan retribusi hasil hutan serta perlu adanya perjanjian kerjasama yang lebih jelas yang disepakati bersama.

B. Saran

1. PT. PAL perlu mempertimbangkan kesesuaian jumlah bibit yang diberikan dengan luasan KTP yang diusahakan.
2. Perlu partisipasi yang lebih nyata dari pengusaha non-PAL dalam menyediakan bibit dan KTP diarahkan untuk bisa menyediakan bibit secara mandiri.
3. Potensi HR perlu diidentifikasi dengan baik, agar tidak terjadi kelebihan pasokan kayu.
4. Pembentukan prosedur administrasi dalam perusahaan dan penatausahaan hasil hutan rakyat.
5. Penyusunan standar harga berdasarkan kualitas dan jenis kayu agar bisa menjadi insentif pengembangan hutan rakyat.
6. Perlu dibangun adanya pusat informasi harga yang dikelola oleh Pemda yang bisa diakses oleh semua pihak, termasuk petani.
7. Peningkatan teknik budidaya ditingkat petani sehingga diperlukan usaha penyuluhan yang lebih aktif dari instansi terkait.

Ucapan terimakasih

Terimakasih sebesar-besarnya kepada ACIAR-CIFOR dan FORDA atas terlaksananya kegiatan penelitian *community partnership* di Kabupaten Bulukumba 2005-2007, dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ani Nawir dan Arita (CIFOR), Abdul Rohim (Dishut Kab.Bulukumba), Ahmad Rizal, Arman Hermawan, Andarias Ruru, Nurhaedah, Rini Purwanti atas segala bantuan dan partisipasinya dalam pengumpulan data primer dan data sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, 2005. Rencana Master Plan/Konsepsi Pembangunan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Menuju Tahun 2025. Bulukumba.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, 2005. Statistik Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.
- Husnan, S. dan Suwarsono., 1994. Studi Kelayakan Proyek. Edisi Ketiga. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Perkins, F.C. 1994. Practical Cost Benefit Analysis: Basic, Concepts and Applications. Macmillan Education Australia Pty Ltd, Melbourne.

ANALISIS KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT PADA TINGKAT MIKRO DI KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN

(Institutional Analysis of Community Forest at Macro Level In the District of Pandeglang, Province of Banten)

Oleh/By :

Ismatul Hakim

Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat

Telp. 0251-8833944; Fax. 0251-88634924

E-mail : ismatulhakim@yahoo.com

ABSTRACTS

The process on institutional strengthening for the community forest in The District of Pandeglang, The Province of Banten, it is necessary to get : 1) an equal understanding and vision of stakeholders involved like The Regional District Government of Pandeglang, The Provincial Government of Banten and Perum Perhutani on the definition of land areas and volume of community forest, 2) The spirit of collaboration among the District Government of Pandeglang, The Provincial Government of Banten and Perum Perhutani (Administratur) on developing the programme and the institution of the community forest to leave out the situation of the groups-building of tight bureaucracy, 3) Improving coordination between the public service on forestry and estate crops and the public service on industrial and trade within the district government of Pandeglang on the utilization of community forest as a supplier of raw material for wood industries. It is necessary to support the policy on sustainable forest management and regional economic growth to the district government. The district government is expected to be able to create the equilibrium of wood raw material supply and the people and industrial demands from the community forest. At the village level (the farmer's group or the on-farm level) it is necessary to create the partnerships between the farmers and the private wood business parties or state owned forest company like Perum Perhutani giving a better professionalism on public service on the planning, management operation (seedlings, infrastructure and financing), product processing and trade of the community forest meet to the farmer's needs. Building new institution on wood based bussines from the community forest will be relatively high cost and it will raise a new problem.

Keywords: *Institutional analysis, community forest, local government rules, collaborative management, supply-demand of wood*

ABSTRAK

Dalam rangka proses penguatan kelembagaan hutan rakyat di kabupaten Pandeglang, perlu adanya : 1) kesamaan pemahaman antar para pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten (PEMKAB) Pandeglang, Pemerintah Propinsi (PEMPROV) Banten dan Perhutani tentang definisi, luasan dan potensi hutan rakyat, 2) kebersamaan manajemen (kolaborasi) antara PEMKAB) Pandeglang, PEMPPOV dan Perum Perhutani (Administratur) dalam membuat program dan mengembangkan kelembagaan Hutan Rakyat agar tidak terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat dalam program pengelolaan pohon (hutan rakyat) dan 3) koordinasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang dalam kaitannya dengan pemanfaatan Hutan Rakyat dari sisi penyediaan bahan baku dan pengembangan unit-unit usaha pengolahan (industri) kayu dari Hutan Rakyat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penyeimbangan antara sisi pasokan (*supphly*) dan kebutuhan (*demand*) kayu untuk masyarakat dan industri kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan rakyat. Di tingkat Desa (kelompok tani atau *on-farm forestry*) diperlukan adanya kemitraan dengan

pihak swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti Perum Perhutani untuk menunjukkan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, operasional pengelolaan (bibit, pupuk, sarana-prasarana dan permodalan), pengolahan dan pemasaran hasil Hutan Rakyat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan petani di lapangan. Membuat lembaga baru dalam usaha kayu dari Hutan Rakyat akan lebih mahal dan dapat menimbulkan masalah baru.

Kata kunci: Analisis kelembagaan, hutan rakyat, perda, manajemen kolaborasi, pasokan dan permintaan kayu

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Wijayanto, 2006). Dalam pasal 1 Ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dinyatakan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan Rakyat (HR) didefinisikan sebagai hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk kayu-kayuan lebih dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak 500 batang tanaman (Permenhut Nomor P.03, 2004). Berdasarkan definisi tersebut, hasil survei Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten menyatakan bahwa luas Hutan Rakyat (HR) di Kabupaten Pandeglang adalah sebesar 3279 ha dengan jumlah pohon sebanyak 884.419 batang tegakan dan volume kayunya sebesar 187.492,69 m³. Jenis-jenis pohon di HR Kabupaten Pandeglang adalah campuran.

Sementara itu, produksi kayu rakyat yang keluar dari Kabupaten Pandeglang berdasarkan dari data SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dalam bentuk kayu olahan (KO) sebesar 199.984,34 m³ dan kayu bulat (KB) sebesar 13.997,95 m³ pada tahun 2005 (Dinas Hutbun Kab Pandeglang, 2005). Dengan asumsi rendemen kayu gergajian 50 persen, maka produksi kayu dari hutan rakyat dalam bentuk kayu bulat rakyat diperkirakan berjumlah 413.866.63 m³. Jumlah ini cukup besar dan telah dapat memenuhi kebutuhan pengguna/industri kayu di sentra-sentra industri kayu di Kabupaten Pandeglang maupun di beberapa kota besar di propinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan kebijakan pengelolaan hutan rakyat baik pada tingkat lapangan (*on farm forestry*) maupun *off-farmnya* agar terjaga keseimbangan antara kemampuan pasokan dan kebutuhan (*supply-demand*) kayu rakyat. Jika tidak diperhatikan maka akan menjadi ancaman bagi kelestarian Hutan Rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu menurut Dishutbun Kabupaten Pandeglang, penambahan luasan hutan rakyat di Kabupaten Pandeglang yang didasarkan pada perkembangan capaian luasan dari realisasi proyek penanaman tahunan yang sampai dengan tahun 2004 telah mencapai 2900 ha. Proyek penanaman HR dimulai dari tahun 2002 sejak terbentuknya Dishutbun Kabupaten. Luas HR tersebut belum termasuk luasan yang dikembangkan oleh proyek-proyek sebelumnya seperti Proyek Penghijauan tahun 1970-an, Proyek Sengonisasi, Proyek UPSA, Proyek KUK DAS, Proyek Kebun Bibit Desa, Proyek Pengembangan Hutan Rakyat yang dahulu dikelola melalui Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan Pejabat Penyuluh Lapangan Kehutanan yang merangkap sebagai Pimpinan Cabang Dishutbun (Suherman,

2005) di Kecamatan Cibaliung, pengertian tentang HR sudah berbaur dengan istilah Hutan Campuran ataupun Kebun Campuran. Akan tetapi masyarakat di wilayah Kecamatan Cibaliung sudah terbiasa menanam berbagai jenis pohon di lahan miliknya. Sementara petani kebun (Kebun Rakyat) yang tergabung dalam Kelompok Tani Perkebunan (Kelapa) juga sudah menanam jenis-jenis pohon di lahan kebun miliknya. Sehingga istilah HR sudah menjadi umum diartikan oleh masyarakat sebagai yang dapat menghasilkan kayu rakyat. Menurut Dishutbun Propinsi Banten (2003) bahwa kayu rakyat adalah kayu yang berasal dari tanaman HR pada lahan milik (pekarangan, kebun dan tegalan) dan lahan milik Negara di luar kawasan hutan (negara).

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang perkembangan kemajuan Hutan Rakyat pada tingkat mikro di lapangan mulai dari tingkat petani, kelompok tani sampai kepada tingkat pengurusan hasil hutan rakyat di tingkat Kabupaten Pandeglang. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para pihak terutama Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam memperkuat potensi kelembagaan hutan rakyat yang sudah tumbuh dan berkembang di tingkat mikro di lapangan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) desa yang memiliki potensi Hutan Rakyat cukup besar yaitu Desa Mahendra dan Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

2. Metoda Pengumpulan Data dan Analisis

Data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara secara terstruktur dengan dan *focus group discussion* (FGD) langsung dengan peserta sebanyak 25 orang terdiri dari petani, penyuluh Kehutanan Kecamatan Cibaliung, Kepala Desa Mahendra dan Mendung, Camat Cibaliung, Kepala Dinas Hutbun Kabupaten Pandeglang, Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Cikeusik/Cibaliung, Administrator/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Banten, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Propinsi Banten. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data statistik Kabupaten Pandeglang, KKPH Banten dan Dinas Hutbun propinsi Banten.

Analisa dilakukan dengan cara tabulasi data, penghitungan sederhana, analisis kelembagaan yang ada dan analisa deskriptif-kualitatif sebagai tahap awal untuk memahami potensi kelembagaan hutan rakyat yang sedang tumbuh sebagai dasar membuat kebijakan pengembangan hutan rakyat oleh para pihak yang berkepentingan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Sosial Budaya Hutan Rakyat Di Kabupaten Pandeglang

Pembangunan Hutan Rakyat di Kecamatan Cibaliung dimulai pada tahun 1977 hingga 1979 melalui program penghijauan dengan jenis sengon (*Paraserianthes falcataria*). Mulai tahun 1980 dikembangkan jenis tanaman lain seperti mahoni, jati dan lain-lain. Menurut

Penyuluh Kehutanan Kecamatan Cibaliung (Suherman, 2005), pada tahun 1997/1998 dikembangkan berbagai jenis buah-buahan seperti rambutan, mangga, melinjo, suren dan lainnya. Program pengembangan tanaman buah-buahan ini difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dimana pada saat itu tidak ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan tanaman baru dianggarkan tahun 2001.

Menurut pemahaman setempat, hasil wawancara dengan PPL Kehutanan di kecamatan Cibaliung menunjukkan bahwa luas HR di wilayah ini mencapai 9700 ha yang tersebar di 9 Desa. Data mengenai sebaran luasan dan jenis-jenis dominan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran luas dan dan jenis-jenis dominan pada HR di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang,

Table 1. *Distribution of area and dominant species of community forest in Cibaliung Subdistrict Pandeglang Districts*

No	Nama Desa	Luasan Hutan Rakyat (Ha)	JenisPohon Dominan
1	Cibaliung	1200	Jati, mahoni
2	Sukajadi	950	Sengon, mahoni
3	Mahendra	525	Jati, sengon, kelapa
4	Cibingbin	1600	Jati, mahoni
5	Mendung	850	Mahoni, kecap, lame
6	Cihanjuang	1700	Jati, mahoni
7	Curug	900	Jati, lame, mahoni
8	Sorongan	1050	Mahoni, lame, sengon
9	Sudimanik	925	Mahoni, kecap, lame

Sumber : Data primer hasil wawancara dengan PPL Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang

Source : *Primary data from the result of interview with PPL in Cibaliung subdistrict*

Diperkirakan bahwa produksi rata-rata HR per bulan di Kecamatan Cibaliung mencapai 300 m³ dengan komposisi jenis pohonnya : Albizia 40%, kecap 20%, lame 15%, jati 5%, mahoni 5% dan sisanya seperti dadap, randu, kembang, mangium dan lain-lain sebanyak 15%. Dijelaskan pula oleh Suherman (2005) bahwa di wilayah Kecamatan Cibaliung terdapat sebanyak 24 unit panglong atau industri penggergajian (*sawmill*) dengan rata-rata mengolah kayu rakyat sebanyak 5 - 8 m³/hari, atau mencapai 120 - 192 m³/bulan kayu jenis campuran.

Hutan rakyat di Desa Mahendra merupakan hasil swadaya masyarakat dan bantuan dari pemerintah. Pada tahun 2002 terdapat bantuan bibit suren, sengon, sukun, rambutan dan mangga serta pupuk dari sumber APBD (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten). Bantuan tersebut untuk penanaman pada lahan seluas 25 ha dengan jarak tanam 5x5 (400 batang/ha). Pada tahun 2003 Desa ini mendapat bantuan dari Program Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) Departemen Kehutanan berupa bibit pohon dan buah-buahan. Dalam program GERHAN tersebut diberikan pula biaya untuk penanaman dan pemasangan ajir sebesar Rp 36 juta.

Dibanding dengan hutan negara, areal hutan rakyat di kecamatan Cibaliung relatif lebih luas. Data statistik Dinas Kehutanan setempat menunjukkan bahwa luas keseluruhan kawasan hutan negara yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cibaliung adalah 4040 ha, ditambah dengan Areal Penggunaan Lain seluas 3100 ha. Sedangkan luas keseluruhan hutan rakyat di kecamatan ini mencapai 12000 ha, dimana sekitar 600 ha diantaranya berada di Desa Mahendra. Pengembangan areal hutan rakyat bahkan cenderung mengarah ke areal-areal pekarangan. Perkembangan luasan hutan dari tahun ke tahun di Desa Mahendra dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas hutan rakyat dalam lima tahun terakhir di Desa Mahendra

Table 2. The community forest area in the last five years in Mahendra Village

Tahun (Year)	Luas (Areas) (ha)	Keterangan (Notes)
2001	250	Terdapat istilah hutan rakyat dan kebun campuran. Di areal hutan banyak ditanami kayu, dan di areal kebun ditanami jenis tanaman perkebunan dan hortikultura
2002	300	
2003	375	
2004	450	
2005	600	

Sumber : Hasil wawancara langsung dengan penyuluh kehutanan dan kepala desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung
Source : The interview result of technology transfer and the Mahendra village leader, Cibaliung subdistrict

Masyarakat Desa Mahendra sangat bergantung pada hasil hutan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka melakukan tebang butuh untuk pemenuhan kebutuhan biaya hidup rumah tangga yang relatif meningkat. Sistem pengelolaan hutan rakyat yang teratur belum diterapkan oleh masyarakat. Dengan demikian meski areal hutan rakyat lebih luas, kondisi hutannya relatif kurang bagus dibandingkan dengan hutan negara. Sedangkan di Desa Mendung, melalui Program Penghijauan tahun 1970-an dimulai dengan penanaman jenis-jenis basing (campuran) seperti mahoni, kecapi, jati dan lame (pulai).

Tahun 1972 (hingga sekarang) ada Proyek Unit Pelestarian Sumber Daya alam (UPSA) sebanyak 10 Unit dengan rata-rata 10 - 20 hektar dengan jenis-jenis tanaman semusim (padi, jagung dan kacang tanah), kayu-kayuan, buah-buahan. Tahun 2005 ada tambahan 1 Unit. Proyek UPSA lebih berorientasi pada pengolahan tanah melalui pembuatan sengkedan, teras bangku dan tergantung pada kemiringan lahan. Di samping itu juga dibuat dam pengendali dan talang oleh masyarakat. Ada juga Proyek Kebun Bibit Desa (KBD) dengan jenis-jenis buah-buahan dan program KAKISU (Pengamanan Kanan Kiri Sungai) selebar 100 meter yang ditanami kayu-kayuan seperti tangkil dan kelapa.

Terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai kelestarian dan kesinambungan hutan rakyat karena laju penebangan pohon relatif lebih cepat daripada laju penanamannya kembali. Camat Cibaliung, M Said WP (29 Juni 2005) menyatakan bahwa : “sebagai anak keluarga petani saya senang bekerja di hutan daripada harus sering pergi ke kota. Saya senang bila dapat melihat masyarakat Kecamatan Cibaliung sejahtera dari hasil kayu rakyat. Akan tetapi saya merasa khawatir bahwa suatu saat kayu dari hutan rakyat akan habis sehingga tanah akan kering dan gundul. Untuk itu saya selalu minta kepada masyarakat untuk terus menanam pohon bila melakukan penebangan”.

Peranan Pemerintah Kecamatan sangat tinggi dalam pengembangan Hutan Rakyat di kecamatan Cibaliung, khususnya di Desa Mahendra. Sesuai dengan aturan dalam PERDA

(Peraturan Daerah) No. 17 tahun 1996, Camat bersama-sama dengan Petugas Teknis Kehutanan yang ada di wilayah Kecamatan, Kepala Desa, Asper/KBKPH dan POLSEK setempat menjadi anggota Tim Komisi Pemeriksaan dalam proses perijinan penebangan kayu rakyat.

B. Pola Usaha dan Pengelolaan Hutan Rakyat

Pekerjaan utama masyarakat di lokasi penelitian adalah bertani, maka kegiatan penanaman pohon sudah menjadi budaya masyarakat. Akan tetapi pola usaha tani hutan rakyat secara kelembagaan, manajemen dan teknologi masih tradisional. Petani masih sangat bergantung kepada adanya kucuran Proyek dari Pemerintah (pusat dan daerah). Meskipun hutan rakyat sudah dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga, petani belum dapat menyediakan modal secara mandiri dari hasil penjualan kayu rakyat. Akan tetapi pertumbuhan luasan hutan rakyat di kedua Desa ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya dengan adanya program GERHAN, di Desa Mahendra luas Hutan Rakyat bertambah sebanyak 50 hektar dan di Desa Mendung sebanyak 100 hektar yang dibangun dalam satu hamparan lahan milik masyarakat. Kekayaan tabungan milik masyarakat dalam Hutan Rakyat adalah dalam ukuran jumlah pohon/hektar.

Dalam rangka pengembangan Hutan Rakyat secara lebih terarah dan terpadu, maka pengenalan jenis-jenis pohon yang sudah menjadi tradisi masyarakat (petani) setempat dalam budidaya Hutan Rakyat sangat penting. Apalagi selama ini masyarakat mengelola HR baru dalam bentuk “hanya menerima bantuan” atau “sekedar senang” karena dapat menjadi tabungan masa depan yang menjanjikan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan sistem silvikultur pengelolaan HR yang tepat melalui penelitian.

Pengetahuan tentang komposisi jenis ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan peserta FGD di Desa Mahendra dan Desa Mendung. Hasil tabulasi data tentang luas hutan rakyat per kepala keluarga dan komposisi jenisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas dan komposisi jenis hutan rakyat per-kepala keluarga (KK)

Table 3. The area and species composition of community forest per family

No (Number)	Karakteristik (Characteristic)	Desa (Village) Mahendra	Desa (Village) Mendung	Asal Tanaman (Species Origin)
1	Kepemilikan Hutan Rakyat per KK (Hektar)	0,5800	1,0795	-
2	Rata-rata jumlah pohon per KK (Batang)	279	655	-
3	Jumlah Pohon Per Hektar Per KK (Batang/Ha/KK)	481	606	-
4	Komposisi Jenis (Persen) <i>Species composition (in percentage)</i>			
	Kecapi	4	21	Asli setempat
	Mahoni	36	36	Dari Luar/Proyek
	Lame (Pulai)	8	12	Asli setempat
	Sengon	4	18	Dari luar/Proyek
	Jati	15	4	Dari Luar/Perum
	Melinjo	7	0	Asli setempat
	Kelapa	15	0	Asli setempat
	Acasia mangium	0	4	Dari luar/Perum
	Salam	0	1	Asli setempat
	Lain-lain (campuran)	11	4	Asli setempat

Masih banyak terdapat jenis-jenis pohon lainnya yang ditanam oleh masyarakat dalam jumlah yang sedikit seperti : petai, jengkol, bambu, kopi, cengkeh, sukun, mangga, srikaya, rambutan, afrika, durian dan jeruk. Karena harga kayu dan tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, maka masyarakat mulai menebang apa saja pohon yang ada, tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan.

C. Pola Pemanfaatan Hutan Rakyat

Tingkat produksi kayu sebesar 300 m³/bulan telah mendorong tumbuhnya industri penggergajian yang mengolah kayu gelondongan menjadi bahan setengah jadi berupa balok, papan dan kaso. Karena itu industri penggergajian ini sifatnya hanya menjual jasa yaitu ongkos menggergaji sebesar Rp 80.000,-/m³. Sedangkan kayu yang telah digergaji menjadi urusan pihak yang menggergaji kayunya. Sehingga diperlukan pengawasan oleh pihak kehutanan terhadap banyaknya industri penggergajian/panglong yang umumnya tidak memiliki ijin

Kayu rakyat sudah menjadi komoditas yang mudah dipasarkan secara lokal. Harga jual kayu lokal untuk beberapa jenis pohon dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Harga pasaran kayu rakyat di kecamatan Cibaliung
Table 4. The market price of community wood in Cibaliung subdistrict

No. (Number)	Jenis Kayu (Species)	Harga di pasar setempat (Price in lokal market) (Rupiah/m ³)	Umur panen (Cutting age) Tahun/(Year)
1	Sengon	250.000	3- 4 (sudah dapat dipanen)
2	Mahoni	500.000 – 600.000	10 – 15
3	Jati	1000.000	> 10
4	Kecapi, lame, dll	300.000 – 350.000	5 – 10

D. Organisasi/Kelompok Tani Hutan Rakyat

1. Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Mahendra

Di Desa Mahendra telah terbentuk 3 (tiga) kelompok tani, dua kelompok bergerak di bidang hutan rakyat dan satu kelompok bergerak mengusahakan komoditi kelapa. Ketiga Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) tersebut adalah: KTHR Rakyat Sentosa yang didirikan pada tahun 1978 dan beranggotakan 67 orang, KTHR Rakyat Jaya Makmur didirikan pada tahun 2003 dan beranggotakan 52 orang, serta Kelompok Tani Kebun Kelapa yang baru didirikan pada tahun 2004. Pembentukan KTHR tersebut bertujuan untuk : (1) mengembangkan HR, (2) meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan (3) menghidupkan lingkungan.

KTHR terbuka keanggotaannya bagi seluruh masyarakat Desa yang memiliki lahan minimal 0.25 ha. Mereka yang mempunyai lahan dapat langsung mendaftarkan diri menjadi anggota. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan cukup dapat bekerja sebagai tenaga upah. Aset KTHR dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Aset organisasi kelompok tani hutan
Table 5. The organization asset of forest farmer group

Jenis (<i>Species</i>)	Satuan (<i>Unit</i>)	Jumlah (<i>Total</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
Hutan Rakyat	Ha	600	Tanaman pokok: jati, mahoni, albizia, pulai; Tanaman sisipan: palawija; Tanaman bawah tegakan: kencur
KTHR	Kelompok	3	
Anggota	Orang	152	Petani Desa
Tangki	Buah	10	Anggota kelompok
Jetpam	Buah	4	

Hingga saat ini KTHR belum mempunyai AD/ART, dengan demikian belum ada ketentuan mengenai hak, kewajiban (*reward* and sanksi) bagi pengurus maupun anggotanya. Hubungan pengurus dengan anggotanya cukup baik dan belum pernah ada permasalahan diantara mereka. Namun demikian kerjasama yang kompak dalam kelompok tersebut belum terbentuk. Kelompok belum melakukan pertemuan secara rutin. Anggota dapat mengemukakan pendapat atau sarannya pada saat pertemuan.

Keberadaan kedua kelompok tani hutan rakyat belum berjalan secara optimal. Meski sudah terdapat kelompok, peran keluarga masih sangat besar dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam pemanfaatan hutan rakyat. Masing-masing anggota cenderung mengambil keputusan sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan keluarga. Kelompok tidak mempunyai kekuatan untuk mengintervensi keputusan keluarga tersebut untuk keuntungan anggota kelompok secara keseluruhan.

Pengelolaan hutan rakyat dilaksanakan secara perorangan/keluarga dengan dana swadaya murni masyarakat. Kegiatan di hutan rakyat secara kelompok baru dilakukan apabila ada bantuan dari pemerintah, seperti proyek GNRHL. Kedepan KTHR berkeinginan untuk mengorganisir kegiatan pembibitan, pemeliharaan, penebangan dan pemasaran hasil hutan, sehingga keberadaan KTH benar-benar bermanfaat bagi anggotanya.

Kegiatan KTHR yang sedang berjalan yang ditemui di lapangan adalah kegiatan pembibitan. Kegiatan ini dilakukan di lahan masyarakat dengan bantuan bibit dan pupuk dari pemerintah. Bantuan ini sifatnya tidak rutin. Masyarakat diberi bibit sebanyak 400 batang/ha dengan 20 kg pupuk/orang. Bibit tersebut telah ditanam di lahan masyarakat.

Dalam kegiatan pembibitan, kapasitas SDM belum memadai akibat minimnya keahlian yang disebabkan kurangnya kegiatan pelatihan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kegiatan pembibitan tersebut ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan anggota kelompok dan masyarakat masih terus berharap adanya bantuan dari pemerintah.

Beberapa program pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah direalisasikan untuk pengembangan Hutan Rakyat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Program/kegiatan dalam bentuk bantuan dari Pemda Pandeglang

Table 6. Program/activities in loan dachds from Pandeglang governance

Macam program/kegiatan (<i>Kind of grant</i>)	Tahun (<i>Year</i>)	Besarnya bantuan (<i>Scale</i>)	Keterangan (<i>Notes</i>)
1. Penyuluhan	1977	-	Rutin (2 x / bulan)
2. Pelatihan Tk. Kabupaten	1977	tidak tentu	2 x setahun
3. Pelatihan Tk. Kecamatan	1977	tidak tentu	1 x setahun
4. Modal (uang)	2002	36 juta/ kelompok	tidak rutin
5. Bibit	2002	400 batang/ha	tidak rutin
6. pupuk	2002	20 kg /orang	tidak rutin

Masyarakat Desa Mahendra telah merasakan adanya manfaat dari program yang dilakukan PEMDA. Manfaat dimaksud adalah : pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan HR meningkat, masyarakat menjadi bersemangat dalam mengembangkan HR, memudahkan masyarakat dalam pengembangan HR dan penghasilan masyarakat dari hasil HR meningkat

Berkembangnya hutan rakyat di Desa Mahendra tidak lepas dari peran berbagai lembaga yang ada di Desa tersebut. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran yang saling menunjang dalam pembangunan hutan rakyat setempat. Beberapa kelembagaan terkait dalam pengembangan hutan rakyat di Desa Mahendra dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Beberapa lembaga yang terkait dengan Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di Desa Mahendra

Table 7. Several institution which link to community from farmer group

Kelembagaan (<i>Institutions</i>)	Kegiatan (<i>Activities</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
Kredit Usaha Tani (KUT)	Menyalurkan kredit usahatani	Tidak berjalan karena tidak sesuai dengan latar belakang sosial budaya masyarakat
LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Membina masyarakat dlm pengembangan HR dalam kelompok	Masih berjalan
BPD	Mendukung dan memonitor kegiatan di tingkat Desa	Baru berjalan
Pesantren Hikmatul Aliyah	Mengembangkan pembibitan dengan tenaga santri di lahan pesantren. Faktor keamanan tinggi, Mudah memberi bantuan, Bisa membangun madrasah, Bisa membangun bale KTHR, sumur, jetpam dan Santri dididik oleh penyuluh (3 kali/minggu). Kendala : modal untuk kesinambungan.	Baru berjalan
Pemerintahan Desa	Yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Membimbing dan memberikan bimbingan dan arahan dalam pengembangan Hutan Rakyat	Sudah berjalan
Penyuluh Kehutanan	Memberikan bimbingan teknis kpd petani	Sudah berjalan

2. Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Mendung

Para petani di Desa Mendung telah mempunyai Kelompok Tani Sang Hiyang Damar (SHD) yang dibentuk pada tahun 1978. Tujuan daripada kelompok tani ini adalah untuk membantu meringankan anggota (masyarakat) melalui kegiatan gotong royong. Kelompok tani ini diprakarsai oleh tokoh, “kokolot” yang merupakan mantan Kepala Desa (Suminta). Anggotanya berjumlah 50 orang. Salah satu kegiatan gotong royong yang dilakukan adalah mengangkut kayu yang ditebang ke pinggir jalan.

Hingga saat ini KTH SHD belum memiliki peraturan dalam organisasi kelompok tani, setiap kegiatan yang dilakukan atas nama kelompok tani berdasarkan kesepakatan anggota. Di samping itu juga terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RT, RW dan Perangkat Desa seperti di Desa Mahendra.

Peran Kepala Desa di Desa Mendung relatif lebih tinggi dalam mengembangkan Hutan Rakyat, karena Kepala Desanya adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pandeglang, yang dipilih oleh masyarakat.

Di Desa Mendung sudah terdapat Koperasi “Bina Bersama” dengan anggotanya sebanyak 175 orang yang kegiatan usahanya untuk sementara adalah pembayaran rekening listrik dan unit simpan pinjam. Simpanan pokok anggota sebesar Rp 50.000,- dan simpanan wajibnya sebesar Rp 5.000,- per bulan. Masyarakat dapat meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- dengan pengembalian sebesar Rp 560.000,- dalam waktu 60 hari. Dengan modal Rp 15.000.000,- dari kegiatan tersebut, Koperasi sudah memperoleh pendapatan Rp. 4.000.000,- per bulan, yang dipergunakan untuk menggaji pengurus sebanyak 5 orang dan karyawan sebanyak 8 orang.

Belum ada kegiatan Koperasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha Hutan Rakyat, baik dari pengadaan bibit maupun penjualan hasil kayu rakyat. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Rakyat masih menjadi kegiatan perorangan sendiri-sendiri. Sama dengan di Desa Mahendra, di Desa Mendung aspek kelembagaan, aspek manajemen dan teknologi pengelolaan Hutan Rakyat masih tergantung pada bantuan proyek dari pemerintah.

E. Peluang dan Tantangan Pengembangan Hutan Rakyat

Pengembangan Hutan Rakyat di kabupaten Pandeglang ditentukan oleh potensi dan kondisi setempat baik SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia)-nya terutama pada tingkat Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di tingkat Desa. Untuk itu diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dan dirasakan oleh masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dengan melakukan Analisa SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat*).

Dari hasil Analisis SWOT melalui pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh masing-masing 25 orang petani di Desa Mahendra dan Desa Mendung diperoleh rumusan berupa alternatif strategi prioritas yang harus dilakukan sebagai berikut:

Alternatif strategi prioritas pengembangan hutan rakyat untuk Desa Mahendra yang dibutuhkan oleh masyarakat (petani), meliputi:

Untuk kegiatan pembibitan, dihasilkan beberapa rumusan berikut:

1. Membuat perencanaan yang baik dan mantap
2. Membuat Kebun Bibit Desa (KBD) untuk berbagai jenis tanaman
3. Meningkatkan keahlian SDM
4. Mengembangkan teknologi pemupukan dalam pengembangan jenis-jenis bibit tanaman

5. Memberdayakan Kelompok Tani Hutan Rakyat yang ada

Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan tanaman HR dan pemasaran HR dihasilkan beberapa rumusan berikut :

1. Membuat perencanaan yang baik dan mantap
2. Membuat program penanaman HR terpadu
3. Mengembangkan teknologi penanaman yang tepat
4. Membuat aturan/kebijakan dan pedoman tehni penebangan HR yang tepat
5. Mengembangkan pola kemitraan.

Untuk Desa Mendung diperoleh rumusan strategi prioritas pengembangan hutan rakyat sebagai berikut :

1. Membuat pelatihan tentang tanaman unggulan
2. Memfasilitasi permodalan untuk pengolahan lahan
3. Membangun pembibitan permanent
4. Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat yang ada
5. Mengembangkan kemitraan usaha.

F. Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Hutan Rakyat

Pengembangan HR di kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang selama ini didorong oleh adanya proyek/program pemerintah (Departemen Kehutanan), Pemerintah Propinsi Banten (Dishutbun) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Dishutbun), kemudian masyarakat mengembangkannya secara swadaya, sehingga usahatani hutan rakyat telah dapat memberikan manfaat baik secara ekologis, ekonomi dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Sementara Perum Perhutani belum banyak berperan dalam pengembangan HR karena terlalu sibuk dengan tugasnya mengelola kawasan hutan (negara). Akan tetapi dalam kenyataannya masing-masing instansi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri.

1. Program Pemerintah (Departemen Kehutanan)

Peran pemerintah (Departemen kehutanan) sebagaimana diterangkan diatas menunjukkan keberhasilannya dalam pengembangan HR. Termasuk dalam program GERHAN (2003), di kecamatan Cibaliung menunjukkan semakin tingginya kemajuan masyarakat dengan mengembangkan HR pada satu hamparan lahan (pendekatan kawasan).

Di Desa Mahendra, GERHAN seluas 50 hektar ditanam dalam satu hamparan areal seluas 50 hektar milik 67 orang KK anggota kelompok tani hutan rakyat “Rakyat Santosa” dan “Rakyat Jaya Makmur”, sedangkan di Desa Mendung seluas 100 hektar milik 175 orang anggota Kelompok Tani Hutan rakyat Sanghiyang Damar. Akan tetapi keberhasilannya tergantung dari peran pemerintah dan pihak lain terkait dalam pembinaan, bimbingan dan pendampingannya seperti PEMDA, Perhutani, forum kelompok tani, forum pedagang dan forum industri pengguna hasil kayu dari hutan rakyat.

2. Program Pemerintah Propinsi (Dishutbun) Banten

Di propinsi Banten, belum terdapat Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang mengatur Hutan Rakyat secara langsung. Akan tetapi terdapat beberapa program/proyek/kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan HR yang dimulai sejak tahun 2001, diantaranya adalah : 1) Proyek Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat seluas 150 hektar bersumber dari APBN (2001), 2) Pembuatan Hutan Rakyat dalam rangka rehabilitasi DAS

Cibaliung melalui Pengembangan Hutan dan Kebun Terpadu di daerah Banten Selatan dan Penanaman Hutan Rakyat seluas 250 hektar dalam rangka rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS Cidanau dan DAS Ciujung serta pelatihan manajemen Hutan rakyat dalam rangka Pengembangan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Pengusahaan Hutan dari sumber dana APBD (2002), 3) Pembangunan Hutan Rakyat dalam rangka Hutan terpadu di daerah Banten Selatan seluas 100 hektar dari sumber APBD (Tahun 2003), dan 4) Penyusunan Potensi Hutan Rakyat Propinsi Banten, Pengembangan Model hutan Rakyat seluas 50 hektar dalam rangka rehabilitasi DAS propinsi Banten dan pembuatan pembibitan rakyat sebanyak 140.000 batang (tahun 2004).

Keberhasilan pengembangan HR di kecamatan Cibaliung menyebabkan berkembangnya kegiatan HR di Dishutbun Propinsi Banten. Akan tetapi tampaknya program yang dilakukan masih bersifat *top-down* dan bersifat keproyekan. Ke depan diperlukan program yang lebih dapat menyerap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan kelompok tani hutan rakyat. Di lain pihak, program yang dilakukan di tingkat propinsi selama ini relatif kurang adanya koordinasi dan partisipasi dari Dishutbun Kabupaten Pandeglang. Seharusnya dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan di tingkat kelompok tani hutan rakyat dilakukan secara koodinasi dan terpadu agar di lapangan tidak terjadi pengkotak-kotakan antara Program Departemen Kehutanan, dishutbun Propinsi Banten dan Dishutbun Kabupaten Pandeglang. Harus diciptakan program yang memiliki dampak menyeluruh bagi proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan HR. Bahkan pola pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan disusun dan dikerjakan secara bersama.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dishutbun Kabupaten Pandeglang dalam pengembangan HR dapat dilihat dari adanya aturan perundangan dan kebijakan serta program/proyek/kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2001/2001 sebagai awal dibentuknya Dishutbun Kabupaten Pandeglang.

Dasar kebijakan dalam mengelola HR masih terbatas pada pemberlakuan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 17 tahun 1996 tentang Retribusi Ijin Penebangan Pohon Kayu/Bambu, Pengolahan Kayu/Bambu dan Pemilikan/Penggunaan gergaji mesin rantai di wilayah Kabupaten Dati II Pandeglang dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor : 503/SK.151-HUK/1997 tanggal 12 Juni Tahun 1997. Peraturan dan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Dalam kerangka itu, saat ini sudah terdapat 6 orang tenaga Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang bekerja secara bergilir di 3 (tiga) pos angkutan kayu rakyat dan 1 (satu) pos angkutan hasil-hasil alam dari seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang yaitu : 1) pos 1 Panimbang, 2) pos 2 Saketi dan 3) pos 3 Maja yang melayani pembuatan SKSHH dari seluruh kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang.

PERDA/SK Bupati tersebut diatas, pada prinsipnya mengatur prosedur penebangan kayu/bambu yang dihasilkan dari HR dan pemberian SKSHH dengan aturan : "Pemohon mengajukan usulan terbangun, kemudian dilakukan pengecekan lapangan (*monitoring*) oleh Tim Komisi Penilai yang terdiri dari : Petugas teknis Dinas yang ada di wilayah kecamatan, Camat setempat, Kepala Desa setempat, Aspek/KBKPH setempat dan POLSEK setempat. Surat ijin penebangan diproses berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh semua anggota

tim komisi. Dalam prakteknya di lapangan, ketentuan diatas berlaku untuk jenis jati dan mahoni. Sedangkan untuk jenis selain jati dan mahoni, dasar pembuatan SKSHH-nya dilakukan setelah mendapatkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dari Kepala Desa setempat, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar ijin tebang dari pemohon untuk mendapatkan SKSHH oleh pejabat penerbit setempat. Kemudian pada Permenhut Nomor P.51 Tahun 2006 penggunaan dokumen SKAU diberlakukan untuk tiga (jenis) saja, akan tetapi dengan terbitnya Permenhut Nomor 33/2007, jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen SKAU menjadi 21 (dua puluh satu) jenis kayu (Syahadat, E dan Dwiprabowo, H, 2007).

Dalam pasal 17 ayat (1) Permenhut No. P.26/2006 dinyatakan bahwa semua hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berupa rotan dan gaharu dari areal hutan hak (hutan rakyat) yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara. Dengan terbitnya aturan baru tersebut maka segalan urusan yang terkait dengan proses penatausahaan kayu rakyat telah bergeser dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan kepada Kepala Desa. Sebagai konsekwensinya maka peran dan fungsi daripada pihak Dinas Kehutanan lebih terfokus pada kegiatan monitoring dan evaluasinya.

4. Peran Perum Perhutani (KPH) Banten

Perum Perhutani (KPH) Banten telah menginisiasi penanaman pohon (jati) di lahan milik masyarakat melalui pola pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 seluas 60 hektar yang terletak di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang dengan jarak tanam 3 x 2 meter, yang terdiri dari 35 buah sertifikat hak milik (yang kemudian dimiliki oleh seseorang). Kerjasama ini dibuat dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Tanaman Jati Plus Perhutani antara Administratur Perhutani/KKPH Banten dengan perwakilan masyarakat.

Pola PHBM ini memiliki 2 (dua) orientasi yaitu : orientasi *on-farm* (lahan usahatani) dan orientasi *off-farm* (di dalam dan luar kawasan). Untuk yang diluar kawasan hutan polanya adalah : modal investasi dari Perum Perhutani sampai dengan pemeliharaan umur 3 tahun. Kewajiban Perum Perhutani adalah : menyediakan bibit jati plus sebanyak 60.000 batang seharga Rp 10.000,-/batang, biaya penanaman lahan 60 ha sebesar Rp 2.758.000,-/ha, biaya pemeliharaan selama 4 tahun pertama sebesar Rp 2.987.750,-/ha dan biaya untuk tenaga bimbingan teknis Rp 500.000,-/60 ha/bulan. Sedangkan kewajiban pihak masyarakat adalah : biaya pengadaan lahan seluas 60 ha untuk penanaman jati plus dengan perhitungan sewa sebesar Rp. 900.000,- /ha/tahun dan biaya pengamanan tanaman/tegakan sebesar Rp 2.100.000,- per bulan untuk 60 ha. Sedangkan laba hasil usahanya dibagi antara pihak Perhutani dengan pihak masyarakat adalah 50% : 50%.

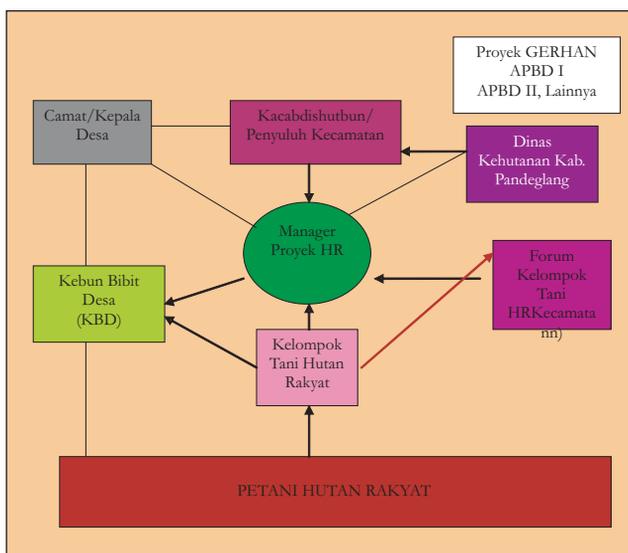
Sedangkan untuk PHBM yang didalam kawasan Hutan, sudah mulai ada inisiasi antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat Desa yang termasuk kawasan hutan (BKPH) Cikeusik. Di Kecamatan Cibaliung terdapat 4 Desa yang mendapatkan garapan lahan PHBM di dalam kawasan hutan, yaitu : Desa Cibingbin (luas 908,5 ha untuk 548 orang petani peserta, naskah sudah siap), Desa Cibaliung (luas 728 ha untuk 728 orang petani peserta, naskah sudah siap), Desa Mendung (luas 229 ha untuk 461 orang petani peserta, naskah sedang disusun) dan Desa Mahendra (luas 460, naskah sedang dipersiapkan).

Bentuk kerjasama PHBM dapat semakin menambah gairah masyarakat yang telah mengelola hutan rakyat secara swadaya, karena masyarakat dengan pengalamannya dapat mengembangkan usahatani di dalam kawasan hutan. Dengan PHBM ini masyarakat mendapatkan tambahan berupa upah kerja, bagian dari hasil penjarangan dan dapat mengelola tanaman pangan (pertanian), yang berarti menambah alternatif pendapatannya dari luar usahatani Hutan Rakyat. Disarankan pula agar program PHBM ini dapat memperkuat kelembagaan Kelompok Tani yang sudah ada.

G. Alternatif Pengembangan Kelembagaan Hutan Rakyat

Beberapa alternatif pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Rakyat yang dapat dilakukan adalah :

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertindak sebagai manager Unit dalam pengelolaan Hutan Rakyat sebagaimana terdapat pada Gambar 1.
Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan Hutan Rakyat yang sudah berkembang di lapangan, diharapkan adanya penguatan kelembagaan dengan melibatkan para pihak terkait dengan meningkatkan kolaborasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Sebagai perwakilan Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui perwakilannya di tingkat Kecamatan Cibaliung dapat dibentuk Manajer Proyek yang berasal dari gabungan antara kelompok tani dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dalam hal ini, Manajer Proyek HR dapat memfasilitasi kebutuhan petani meliputi penyediaan bibit unggul, teknik penanaman yang tepat dan penguatan kelembagaan petani terutama dalam hal pemasaran.

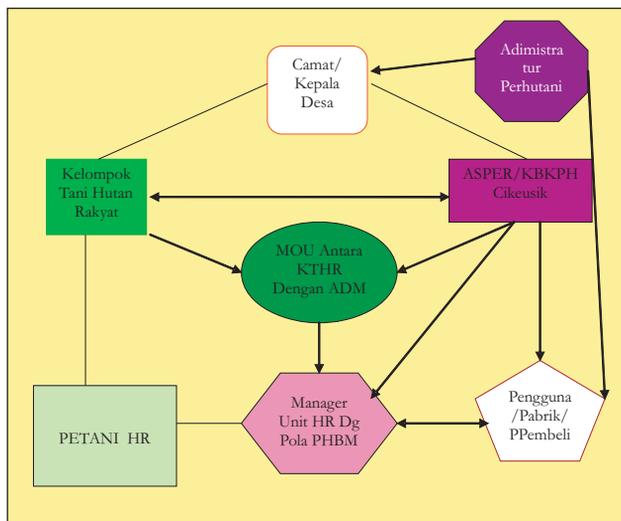


Gambar 1. Kerangka kelembagaan dimana Unit Manajemen Hutan Rakyat di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.

Figure 1. Institutional model which forest community management unit under Plantation-Forestry Service in Pandeglang District.

2. Pengembangan Unit Manajemen Hutan Rakyat dengan Pola Kemitraan dengan Perum Perhutani sebagaimana terdapat pada Gambar 2.

Alternatif kedua bisa dilakukan dengan melibatkan Perum Perhutani melalui peran perwakilannya pada tingkat Asisten Perhutani/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Pandeglang, sementara itu untuk tingkat Kecamatan Cibaliung diwakili oleh Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH). Administratur Perum Perhutani Banten melalui Camat Cibaliung dan kepala Desa dapat membuat Kesepakatan Kerjasama antara Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) membentuk Manajer Unit Hutan Rakyat dengan Pola PHBM. Hal ini akan lebih efektif karena Perum Perhutani sebagai perusahaan profesional di Bidang Kehutanan memiliki peran dalam meningkatkan mutu bibit, tehnik dan pola tanam yang baik dan sekaligus mampu membantu petani/kelompok tani sebagai penampung/penyalur hasil kayu dengan harga yang pantas.



Gambar 2. Kerangka kelembagaan dimana Pengembangan Unit Manajemen Hutan Rakyat Pola Kemitraan dengan Perum Perhutani

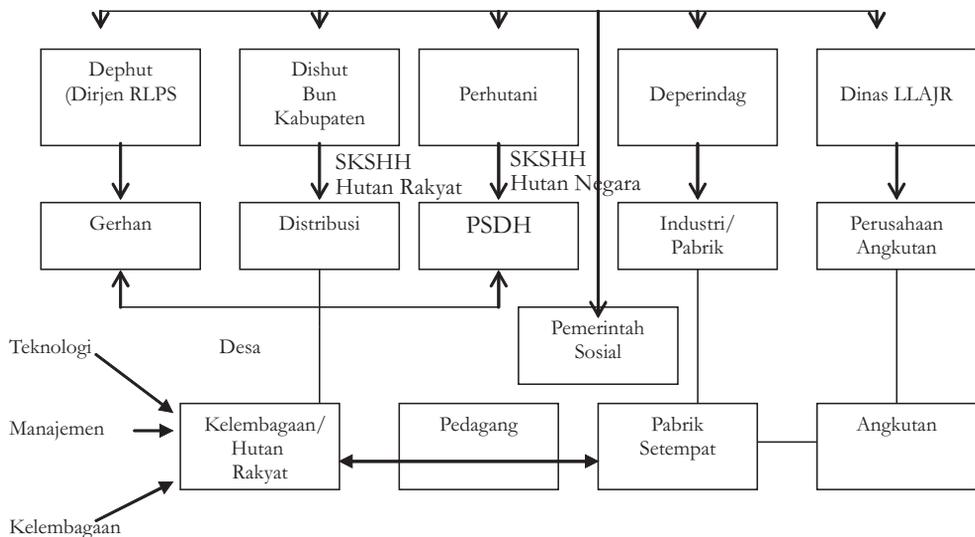
Figure 2. Institutional model which developing forest community management unit by collaboration with Perhutani Firm

Sedangkan guna kepentingan analisis kerangka kelembagaan hutan rakyat di Kabupaten dengan pola pendekatan yang lebih komprehensif harus melibatkan multi-pihak secara kolaboratif mulai dari sub-sistem produksi, sub-sistem pengolahan dan sub-sistem pemasaran dan angkutan hasil kayu rakyat dan kelembagaannya, dapat digunakan pendekatan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Tampak pada gambar 3 bahwa penguatan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat memerlukan adanya penguatan kelembagaan dan semangat kolaborasi antara berbagai pihak mulai dari Departemen Kehutanan melalui proyek Gerakan Rehabilitasi Lahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, Perum Perhutani wilayah

Banten/Pandeglang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten/Pandeglang dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLAJR) yang harus bekerja secara bersinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan pengurusan hutan rakyat yang baik (*good farm forest governance*) yang meliputi penataan, pengelolaan dan pengurusan hutan rakyat sampai kepada proses pengangkutan (transportasi) hasilnya berupa kayu rakyat.

Sistem pengelolaan hutan rakyat dari hulu sampai hilir akan melibatkan beberapa pelaku (aktor) diantaranya : petani, Pemerintah Desa/Kecamatan, pedagang, pengusaha pabrik pengolahan kayu rakyat dan pengusaha angkutan kayu rakyat. Berarti dari segi pengusaannya, hutan rakyat memberikan efek ganda yang cukup nyata bagi penciptaan lapangan kerja dan pengembangan peluang usaha. Aspek pengusahaan hutan rakyat ini memerlukan kajian dan penelitian lebih jauh untuk memberikan rangsangan kepada para investor dan dunia usaha serta perbankkan bahwa usaha hutan rakyat menjanjikan masa depan yang baik dalam menggerakkan sektor riil di tingkat mikro.



Gambar 3. Proyeksi kerangka analisis kelembagaan Hutan Rakyat yang disarankan
 Figure 3. The suggestion of analysis institution model for community forest

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Produksi kayu dari Kabupaten Pandeglang berdasarkan dari data SKSHH dalam bentuk kayu olahan (KO) sebesar 199.984,34 m³ dan kayu bulat (KB) sebesar 13.997,95 m³ pada tahun 2005 (sampai dengan bulan Desember 2005). Dengan asumsi rendemen kayu gergajian 50 persen, maka produksi kayu dari hutan rakyat dalam bentuk kayu bulat berjumlah 413.866.63 meter kubik. Untuk itu, diperlukan adanya inventarisasi pengelompokan hutan rakyat berdasarkan atas jumlah pohon, komposisi jenis, luas kepemilikan dan jumlah kepemilikan (ha/orang)nya.

2. Hutan Rakyat di lokasi penelitian (Desa Mahendra dan Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung) Kabupaten Pandeglang merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh di lahan milik masyarakat dan merupakan hasil dari program pemerintah yang dimulai sejak tahun 1970-an berupa gerakan/kegiatan penanaman karang kitri, penghijauan, sengonisasi, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah, Kebun Bibit Desa, Unit Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA), dan terakhir adalah Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GERHAN) mulai tahun 2003. Hutan rakyat yang pada awalnya dikelola dengan sistem manajemen pohon per pohon, saat ini sudah dimulai dengan sistem pendekatan kawasan.
3. Hutan rakyat telah menggairahkan ekonomi masyarakat mulai dari kegiatan mengumpulkan dan berdagang kayu, dan bagi yang punya modal mereka mendirikan pabrik-pabrik penggergajian (panglong). Di Kecamatan Cibaliung terdapat sekitar 24 Unit Usaha Penggergajian Kayu Rakyat. Akan tetapi sudah mulai ada rasa kekhawatiran dari Camat Cibaliung terhadap kelestarian Hutan Rakyat di daerahnya, karena setiap hari ada saja penebangan dan angkutan kayu rakyat yang dilakukan oleh masyarakat dimana laju penebangannya lebih cepat daripada laju penanaman dan pertumbuhan tanaman/pohon.
4. Kelembagaan pengelolaan hutan rakyat tampak masih sangat lemah terutama dalam hal tata organisasi, kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) dan tata pengaturan secara teknis dan manajemen belum memadai serta akses kepada informasi harga dan pasar dari produk kayu rakyat. Petani dan kelompok tani hutan rakyat masih tergantung kepada para pedagang pengepul yang merupakan perpanjangan tangan para pengusaha industri kayu lokal dan pemodal dari sentra-sentra industri kayu di kota-kota besar. Munculnya pabrik-pabrik pengolahan kayu rakyat di wilayah kecamatan Cibaliung di satu pihak merupakan pendorong kemajuan ekonomi yang menunjukkan tekanan permintaan terhadap kayu rakyat meningkat terus, sementara itu di tingkat petani potensi hutan rakyat semakin terancam.

B. Saran

Sedangkan beberapa saran untuk kelembagaan hutan rakyat Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Perlu adanya kesamaan pemahaman antara para pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Propinsi Banten dan Perhutani, tentang definisi, luasan dan potensi Hutan Rakyat. Di samping itu diperlukan adanya kebersamaan antara para pihak tersebut dalam mengembangkan kelembagaan Hutan Rakyat agar tidak terjadi pengkotak-kotakan pendekatan dalam pengelolaan hutan karena perbedaan kepentingan dan peran masing-masing yang dapat membingungkan masyarakat.
2. Antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang perlu ada koordinasi dalam kaitannya dengan pemanfaatan Hutan Rakyat dari sisi ketersediaan bahan baku dan pengembangan unit-unit usaha pengolahan (industri) kayu dari Hutan Rakyat untuk mendukung kebijakan pengelolaan Hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Sehingga Pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian keseimbangan antara sisi persediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) terhadap kayu yang berasal dari Hutan Rakyat.

3. Pada tingkat Desa (kelompok tani) diperlukan adanya kemitraan dari pihak swasta maupun Perum Perhutani untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan Hutan Rakyat secara lebih profesional, mulai dari tahap perencanaan, pembibitan, penanaman, penebangan, pengolahan dan pemasarannya hasil Hutan Rakyat yang matang sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten. 2004. Potensi Hutan Rakyat di Propinsi Banten. Serang: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten. Banten.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. 2005. Laporan Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.
- Haeruman, Herman. 1995. Pengelolaan Hutan Rakyat Aspek Kelembagaan. Proceeding Seminar Nasional Hutan Rakyat : Menuju Model Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, pp 57-71. DPP HKTI. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Pandeglang. 1996. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang No. 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Ijin Penebangan Pohon/Bambu, Pengolahan Kayu/Bambu dan Pemilikan/Penggunaan Gergaji Mesin Rantai di Wilayah Dati II Pandeglang. Pandeglang.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 Tanggal 22 Juli 2004. Tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Syahadat, E dan Dwiprabowo, H. 2007. Penatausahaan Kayu Rakyat Yang Efektif. Prosiding Seminar Pengembangan hutan Rakyat Mendukung Kelestarian Produksi kayu Rakyat. Puslitsosek dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Wijayanto, N. 2006. Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari. Prosiding Pekan Hutan Rakyat Nasional I Aktualisasi Peran Litbang Mendukung Hutan Rakyat Lestari. Puslitsosek dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.

POTENSI DAN PERAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)

(Potency and Role of the Moslem Boarding School as an Institution to Execute for Land and Forest Rehabilitation Activity)

Oleh/By :

Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Budiman Achmad
Balai Penelitian Kehutanan Ciamis
Jl. Raya Ciamis Banjar Km 4 dsn Pamalayan Ciamis
Telp. 081546815496 Alamat e-mail dian_diniyati@yahoo.com

ABSTRACT

Pesantren as the Moslem boarding school is defined as a social community with high contribution in governing santri for their life surround which provides a direction and a guideline to societies. The board's component consist of : lodgings, mosque, santri, classical Islamic book and the kyai as a dominant factor. As the forest and land rehabilitation activities need mass people involved, the charismatic kyai and norms are two energy which can mobiliz people. The Moslem boarding school is usually located in villages surrounding the forest, so that it would be easier to gather and involve local people. That's why the Moslem boarding school is properly playing more actively role in any environmental conservation efforts, such as greening their own lands and surrounding including the privately owned forest which is able to increase their income. For that reason, the role and comparative advantages of the board need to be promoted especially in relation to the rehabilitation. The study was conducted in Lubur Al-wasilah (Garut district, Cibiuk subdistrict, Majasari village) and Cintawana Moeslem school boards (Tasikmalaya district, Tanjungjaya subdistrict, Ciloloban village) during May to December 2007. Data were collected by interviewing 2 kyais, 6 the board officers and 29 students supported by questionnaire and then discriptively analyzed. The result showed that the boards have been actively involved in the forestry activities such as building the nursery and facilitating the network between farmers, privates and goverment sectors. The comparative advantages of the boards comprises of job networking, human resources, social, demography and economics aspects.

Keywords : *Moslem boarding school, santri, forest and land rehabilitation, norms, comparative advantages*

ABSTRAK

Pesantren merupakan suatu komunitas sosial yang cukup dominan dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya dalam menghadapi kehidupan sehingga dapat memberikan arahan dan pedoman. Komponen pesantren terdiri dari: pondok, mesjid, satri, kitab Islam klasik, dan faktor dominan adalah Kyai. Kyai yang kharismatik serta adanya norma merupakan suatu kekuatan yang menonjol di pesantren, yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan RHL. Apalagi kegiatan RHL diutamakan adalah massa yang banyak untuk melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya hutan rakyat. Lokasi pesantren umumnya berada di pedesaan sekitar hutan, sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut menjadi dasar melibatkan pesantren agar berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan seperti menanam lahan yang dimilikinya untuk menghijaukan wilayah sekitarnya, sekaligus bisa memperoleh pendapatan dari kayunya. Maka perlu diuraikan peranan serta keunggulan komparatif yang dimiliki pesantren dalam kegiatan RHL. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Luhur Al-wasilah (Kabupaten Garut, Kecamatan Cibiuk Desa Majasari) serta Pesantren Cintawana (Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Tanjungjaya Desa Cilolohan) dilaksanakan bulan Mei Desember 2007. Unit Analisisnya adalah pondok

pesantren dengan responden Kyai (2 orang), pengurus pesantren (6 orang) dan santri sebanyak 29 orang. Data dikumpulkan dengan metode wawancara menggunakan kuisioner, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pesantren terlibat pada kegiatan kehutanan sebagai pelaksana pembuatan persemaian, dan fasilitator memediasi antara petani dengan pihak swasta dan pemerintah. Keunggulan komparatif yang dimiliki pesantren terbagi atas aspek jaringan kerja, sumber daya manusia, sosial, demografi dan ekonomi.

Kata kunci: Pesantren, santri, RHL, norma, keunggulan komparatif

I. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang unik yang menjadi ciri khas Indonesia, karena mempunyai norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri dari pesantren. Pesantren juga merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang tumbuh karena masyarakat membutuhkan pendidikan. Lebih jauh Suyuti (2008) mengatakan bahwa pesantren memiliki komponen-komponen yang terdiri dari: kyai, santri, masjid, pondok dan kitab kuning.

Menurut Soekanto (2003) lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yaitu suatu sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Dengan adanya fungsi tersebut memperjelas pesantren mempunyai peranan yang sangat penting di masyarakat, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi pedoman kepada para anggotanya untuk bersikap dan bertingkah laku kepada pencipta semesta alam ini, kepada sesama manusia serta kepada alam sekitarnya. Kegiatan pesantren lebih banyak pada hal-hal yang terkait dengan keagamaan, namun seiring dengan perubahan waktu dan adanya perubahan kebutuhan, banyak kyai yang berasal dari pesantren, mulai memperhatikan kondisi alam dan mulai terjun pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Apabila para kyai sudah mulai tertarik kepada kegiatan RHL, bukan tidak mungkin para santrinya akan ikut terlibat dalam kegiatan yang sama, karena ada norma kebiasaan harus menghormati dan menghargai para kyai.

Norma yang berlaku di pesantren sudah merupakan kebiasaan (*folkways*), sehingga sudah mempunyai kekuatan mengikat yang besar antara santri dengan kyai-nya. Apabila perbuatan menghormati dan menghargai para kyai tidak dilakukan oleh santri, maka dianggap sebagai penyimpangan terhadap norma yang berlaku tersebut. Selain itu, dengan adanya kharisma para kyai akan memudahkan dalam menggerakkan massa santri dalam kegiatan RHL.

Saat ini jumlah pondok pesantren di Indonesia cukup banyak yakni sekitar 11.312 (jumlah santri sebesar 2.737.805 jiwa) dimana 78% pesantren berada di pedesaan. Sedangkan jumlah pesantren di Jawa Barat pada tahun 2005 sebanyak 4.388 unit yang terdiri dari 1.311 pesantren berlokasi di daerah pegunungan, 1.085 di daerah pertanian, 87 di sekitar pantai, dan 114 berada di tepi sungai (Departemen Agama, 2001 *dalam* Hermawan, 2007).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pesantren memiliki modal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk dapat terlibat dalam kegiatan RHL. Tulisan ini mencoba menguraikan peranan serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh pesantren dalam kegiatan RHL. Keunggulan komparatif adalah suatu keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk dapat membandingkannya dengan yang lainnya (Anonim, 2010). Potensi pesantren diantaranya adalah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal dari segi kuantitas dan kualitas dan umumnya berada di level *grass root* (tingkat pedesaan) menyatu dengan lingkungan pedesaan, jaringan kerja (jumlah pontren yang banyak), dan memiliki sistem tata nilai dan norma yang baik.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Majasari Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, serta Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan Penelitian ini dilakukan bulan Mei Desember 2007.

B. Pengambilan sampel

Sampel penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

1. Pesantren, dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu pesantren Luhur Al-wasilah (Kabupaten Garut) dan Pesantren Cintawana (Kabupaten Tasikmalaya), didasarkan pertimbangan bahwa kedua pesantren tersebut telah terlibat kegiatan RHL dan mengembangkan penghijauan lingkungan.
2. Responden penelitian adalah kyai masing-masing satu orang dan pengurus pesantren sebanyak 6 orang, serta mustame (santri) yang tergabung dalam kelompok tani dipilih secara sengaja sebanyak 13 orang Desa Majasari dan 16 orang Desa Cilolohan. Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan anggota kelompok tani yang terlibat dalam pengembangan penghijauan lingkungan bersama pesantren.

C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data primer diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, selain itu juga dilakukan diskusi dengan menggunakan *interview guide*.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran data dan informasi yang berasal dari laporan-laporan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini.

D. Analisis Data

Untuk memperoleh luaran mengenai peranan dan keunggulan komparatif yang dimiliki pesantren dalam melaksanakan kegiatan RHL dan penghijauan lingkungan, maka data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif (*deskriptif*). Teknik kualitatif yakni mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna (Sarwono, 2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PANDANGAN PESANTREN TENTANG PENGHIJAUAN LINGKUNGAN (RHL)

1. Pesantren Luhur Al-Wasilah

Pesantren Luhur Al-Wasilah di Kabupaten Garut dipimpin oleh Bapak Kyai Thonthowi Djauhari Musaddad merupakan Rois Syuriah NU Cabang Garut periode 1999-2004 dan periode 2004-2009. Bapak Kyai sangat memperhatikan masalah lingkungan sehingga melakukan kegiatan cinta lingkungan, melibatkan masyarakat yang ikut pengajian di Pesantren luhur Al-Wasilah, juga memanfaatkan NU sebagai kendaraan untuk melakukan penyuluhan tentang lingkungan kepada warga NU khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan yang diusung pesantren adalah mendekatkan permasalahan atau meletakan kegiatan langsung pada akarnya yaitu desa. Sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana peranan masyarakat lebih dominan keterlibatannya dalam proses pembangunan. Selain itu jika ditinjau dari perubahan kebijakan politik yaitu mengenai desentralisasi pengelolaan sumber daya alam hutan (SDAH) (UU No. 22/99 dan UU No. 41 tentang kehutanan) dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah (UU No. 25/99), pelimpahan kewenangan sebaiknya diberikan seluas-luasnya kepada lembaga pemerintah dan lembaga rakyat yang paling dekat dengan SDAH yaitu tingkat kampung/ desa yang merupakan makna devolusi sebagai syarat berjalannya lembaga demokrasi. (Awang, 2007 dan Musaddad, 2007). Pesantren (Kyai Thonthowi Djauhari Musaddad) yang melakukan program pembangunan pedesaan mandiri diarahkan bagi penguatan pelaksanaan otonomi desa, yang diupayakan pada optimalisasi partisipasi masyarakat desa, sikap kemandirian individu yang berorientasi pada kemandirian masyarakat desa, kesadaran masyarakat terhadap sistem sosial sebagai aspek yang saling berkaitan, pola pikir sadar pada proses, peluang serta tantangan dalam setiap aspek pembangunan.

Kemandirian diterjemahkan sebagai kesanggupan suatu desa untuk memberdayakan setiap potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang kesemuanya dikelola menjadi kekuatan sistem di desa itu sendiri (Musaddad, 2007). Kemandirian tercipta dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya masyarakat siap untuk melaksanakan pelestarian lingkungan, dengan syarat:

1. kahartos (dapat dimengerti)
2. baktos (karya nyata yaitu aksi dengan program yang real/nyata)
3. karaos (ada kontribusinya bagi kehidupan masyarakat)
4. artos dan raos (ada kontribusi terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat).

Korban akibat lingkungan yang rusak pada umumnya adalah masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan. Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan pendekatan agama. Masalah lingkungan merupakan masalah agama, karena kerusakan lingkungan akibat degradasi moral manusia. Apabila manusia beriman maka moralnya dapat dikontrol oleh dirinya sendiri sebaliknya apabila tidak bermoral maka agamalah yang harus meluruskannya. Agama merupakan tuntunan hidup baik di dunia maupun di akherat nantinya.

Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh moral yang terdegradasi, agama juga menyuruh manusia untuk melestarikan lingkungan, sehingga Pak Kyai berijtihad bahwa

pelestarian lingkungan hukumnya *wajib ain* bagi setiap individu dilingkungannya masing-masing dan *wajib kipayah* bagi semua masyarakat. Lingkungan seperti hutan harus dijaga kelestariannya, karena hutan merupakan tempat yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi umat Islam apabila mau melakukan kewajiban sholat maka tubuh harus bersih dan suci, dan bersuci harus menggunakan air bersih, sedangkan air dapat tersedia apabila tempat dan sumber air terpelihara dengan baik, sehingga air bersihpun akan tetap tersedia. Sumber air tersedia apabila hutannya lestari, untuk itu diwajibkan untuk memelihara hutan.

Dalam norma agama terdapat banyak hal untuk memotifasi manusia agar melestarikan lingkungan karena hal ini merupakan bagian dari ibadah. Maka Pak Kyai sebagai pemuka agama, ormas, pimpinan pontren dan pribadi, mempunyai kewajiban religi dalam melestarikan lingkungan. Diharapkan norma agama dapat menembus hati manusia untuk melaksanakan penanaman pohon dengan dilandasi ibadah, sehingga menanam pohon dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dan embel-embel lainnya (misal adanya dorongan proyek). Sosialisasi norma agama dilakukan lewat buku dan lagu-lagu agama yang berhubungan dengan kelestarian alam dan kegiatan ini sudah disosialisasikan melalui kegiatan salawatan di masjid yang ada di desa (kampung).

Melestarikan lingkungan dalam Agama dikategorikan sebagai *Shodakoh Jariyah*, artinya walaupun manusia sudah meninggal tetapi pahalanya akan terus mengalir selama tanaman itu tumbuh, karena tanaman sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bentuk dari kegiatan pelestarian lingkungan dan RHL yaitu kegiatan persemaian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mustame (masyarakat yang ikut pengajian di pesantren) bekerjasama dengan pesantren Luhur Al-Wasilah. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil. Indikator keberhasilannya yaitu ekonomi masyarakat pelaksana program mengalami peningkatan seperti dapat menyekolahkan anak, membuat rumah, bahkan membeli lahan. Keberhasilan lain dari program ini adalah berhasil membina masyarakat sehingga dapat beralih ke persemaian setelah mendengar ceramah dari Pak Kyai tentang sebuah hadis bahwa wanita pelacur yang memberikan air minum terhadap anak anjing yang kehausan, kemudian dosanya diampuni, dan dosa yang sangat besar diampuni dengan hal yang sepele apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan demikian apabila seseorang menanam pohon dengan ikhlas karena Allah tanpa pamrih maka Insya Allah dosanya akan diampuni, karena sebuah pohon sangat berguna sekali bagi kehidupan untuk semua makhluk hidup.

2. Pesantren Cintawana

Yayasan pesantren Cintawana terletak di Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesantren ini didirikan pada tahun 1917 oleh KH. Mohammad Toha (Alm) dan sekarang dipimpin oleh generasi ke 3 yaitu Kyai Asep Sujai Farid.

Organisasi dan program pengajaran di Pesantren Cintawana terdiri dari Badan Permusyawaratan Pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, bidang pendidikan santri, bidang pendidikan sekolah, bidang keterampilan/ekonomi yang meliputi koperasi pesantren Cintawana (KOPCI) dan BMT (Baitul Mal Watamwil), komputer, dan kegiatan lain dibidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Selain itu terdapat pula pendidikan untuk masyarakat/majelis taklim berupa pengajian yang dilaksanakan rutin maupun insidental.

Pesantren Cintawana memiliki perhatian terhadap hutan sejak milad (ulang tahun) ke 90. Keterlibatan pesantren dalam kegiatan kehutanan disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, setelah mereka bekerjasama dengan perusahaan atau pemerintah sehingga memerlukan pendamping. Pelibatan santri dilakukan dengan memilih santri-santri tertentu yang mempunyai minat saja terutama santri dewasa yang mempunyai potensi dan kemauan untuk melakukan survei, pemetaan, dan lainnya.

Santri dewasa tersebut berada di *graas root* sehingga memudahkan dalam pembinaan lingkungan (hutan rakyat) kepada masyarakat. Maka strategi untuk menarik minat masyarakat supaya mau aktif dalam program lingkungan yaitu dengan memperkenalkan pasar dari hasil hutan rakyat sengon. Caranya dengan membawa masyarakat untuk datang ke PT. BKL (Bina Kayu Lestari), tujuannya supaya masyarakat memperoleh dan melihat langsung manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama, selain itu salah satu kelemahan masyarakat dalam kerjasama adalah rendahnya tingkat pengetahuan manajemen, modal serta akses informasi. Dari sinilah awal mulanya kerjasama antara pesantren, masyarakat dan PT BKL.

Kerjasama dengan PT BKL yaitu perusahaan kayu Tasikmalaya yang mengolah bahan baku kayu sengon, dilakukan pesantren dengan dasar kepentingan yang sama terhadap hutan rakyat, sehingga dibentuk kemitraan antara petani dengan BKL yang difasilitasi oleh pesantren. Hutan rakyat kemitraan dengan BKL sudah berjalan selama 5 tahun pada lahan seluas 35 ha (rencana sekitar 500 ha) yang dilakukan pada lahan milik desa/pengangonan di Kecamatan Tanjung Jaya pada bulan Februari tahun 2007. Kerjasama lainnya adalah pesantren dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), yang melibatkan masyarakat dan alumni pesantren serta pemerintah daerah setempat. Model kerjasamanya yaitu mendorong masyarakat untuk menanam kayu terutama sengon, dimana petani pada awalnya hanya menanam singkong. Dalam kerjasama dengan swasta maupun pihak pemerintah, kontribusi dan peran pesantren sangat beragam. Prioritas pesantren dalam kerjasama ini adalah pencarian pasar. Perjanjian dibuat antara petani, pesantren dan pemerintah daerah, dimana pesantren berperan sebagai fasilitator/penengah agar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Peran lain adalah mencari dana lain untuk disalurkan pada petani dan juga melakukan fungsi kontrol terhadap kegiatan selama 3 kali dalam satu bulan.

Untuk melaksanakan program tersebut maka dibentuk kelompok tani oleh pesantren, aparat desa dan pemerintah pusat, sistem pengelompokkan petani berdasarkan letak lahan. Jumlah anggota kelompok tani 300 orang, terbagi dalam 35 ha lahan, yang tersebar di Desa Cilolohan, Suka Senang, dan Cikesal, pemilihan desa tersebut berdasarkan kesiapan kelompok dan kesiapan lahan yaitu ada lahan kritis. Di setiap desa terdapat satu orang koordinator dan ada alumni pesantren yang membantu kegiatan ini. Hasil sampingan dari program tersebut adalah peningkatan kemampuan petani dalam pemanfaatan lahan sehingga diperoleh hasil sampingan seperti jagung, singkong, ubi, kacang, dan sebagainya.

Hutan rakyat memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan jika petani memenuhi kesepakatan mengenai umur panen kayu. Untuk kepentingan konservasi, hutan rakyat mempunyai manfaat untuk menjaga ketersediaan air.

Kendala yang selama ini dihadapi oleh pesantren dalam menjalin kerjasama adalah kesulitan mencari instansi/perusahaan/mitra yang bisa diajak bekerjasama, berpihak kepada masyarakat, dan lebih mendahulukan kepentingan sosial. Dalam dakwah untuk santri maupun petani ditanamkan pemahaman bahwa kegiatan menanam merupakan ibadah, sehingga pesantren meluncurkan program santri menanam dan memberi dakwah tentang lingkungan kepada masyarakat dan para santrinya.

Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kehutanan adalah pelatihan persemaian, dengan narasumber dari BKL dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya. Pesantren pernah membuat persemaian sebanyak 180.000 bibit. Bibit yang pernah disemaikan berasal dari Jawa Tengah, namun mati setelah sampai di lokasi persemaian. Pada saat ini persemaian untuk jenis sengon akan dibuat di lokasi yang berdekatan dengan lokasi penanaman, untuk meningkatkan kualitas bibit saat siap tanam.

B. PERANAN PESANTREN DALAM KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Kerusakan lingkungan saat ini sudah menjadi isu sangat penting dan membutuhkan penanganan serius. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Departemen Kehutanan adalah dengan menggalakkan pembangunan hutan/penghijauan lingkungan diantaranya melalui program Gerhan atau rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik di lahan-lahan kritis maupun di lahan-lahan masyarakat yang belum optimal pemanfaatannya.

Gerhan yang dilaksanakan sejak tahun 2003 merupakan gerakan moral menuju percepatan pemulihan keberadaan dan fungsi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RHL sendiri bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Anonim, 2007). Gerhan merupakan salah satu upaya strategis pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat (massa) yang memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Selain program Gerhan masih banyak program-program lainnya yang dicanangkan pemerintah. Dalam pelaksanaannya Departemen Kehutanan tidak bergerak sendiri tetapi melibatkan berbagai elemen masyarakat, lembaga formal maupun informal. Salah satu lembaga informal yang dilibatkan adalah Pesantren.

Pesantren merupakan lembaga yang potensial dalam menyukseskan gerakan menanam pohon, melalui pelibatan para santri sebagai pengorganisir masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam usaha pertanian yang ramah lingkungan, menggunakan sistem nilai dan pengetahuan tradisional masyarakat, dan sebagainya. Pesantren juga dinilai memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan, termasuk menggerakkan masyarakat dalam menanggulangi lahan kritis, karena pesantren rata-rata berada di pedesaan, dengan kyai yang memiliki karisma baik di mata masyarakat (Anonim, 2005).

Kerjasama dengan Pesantren atau lembaga/ormas Islam telah dilakukan pada tahun 1999, dimana Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) melakukan kerjasama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mutu sumberdaya manusia, dan kemampuan institusi dan fungsi kelembagaan Dephutbun dan MUI khususnya dalam mendukung pembangunan di bidang kehutanan dengan jangka waktu 3 tahun (Nasution, 1999). Pada saat ini, program rehabilitasi dan penghijauan (Gerhan) melalui program "Santri Menanam, Kyai Memanen" juga dilakukan Departemen Kehutanan bekerja sama dengan pesantren maupun lembaga keagamaan lainnya.

Sejauh ini keterlibatan pesantren dalam pembangunan kehutanan khususnya kegiatan RHL dan hutan rakyat masih terbatas pada kegiatan pembuatan persemaian, pembagian dan penanaman pohon, atau sebagai mediator/fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah atau swasta. Pesantren Cintawana menjadi mediator dan fasilitator dalam program hutan

rakyat antara mustame dan BKL, dan pesantren Luhur Al-wasilah telah melakukan pembibitan. Namun keterlibatan dalam kegiatan pengawasan, penyuluhan, kelembagaan, dan pemasaran masih belum terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh faktor internal pesantren itu sendiri seperti segi skill dan pengetahuan tentang kehutanan yang masih rendah maupun faktor eksternal seperti kondisi politik/lingkungan.

Sebenarnya saat ini beberapa pesantren sudah mulai memasukan materi lingkungan atau masalah kehutanan dalam kurikulum pengajarannya atau menjadi salah satu isi kajian dalam pengajian dengan mustamennya. Ditekankan bahwa masalah lingkungan merupakan masalah agama dengan beberapa dasar diantaranya : 1) kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi selama ini merupakan ulah manusia yang tidak bermoral (moral adalah masalah agama), 2) agama memerintahkan bahwa melestarikan lingkungan hukumnya adalah wajib, dan 3) banyak norma agama yang memotivasi untuk melestarikan lingkungan. Namun diakui bahwa hal ini belum dilakukan sepenuhnya dan belum dapat diimplementasikan di lapangan secara utuh.

Peran pesantren sangat potensial untuk mendukung suksesnya program RHL dan penghijauan lingkungan, melalui kampanye tentang pentingnya menjaga lingkungan dilakukan sampai tingkat desa dengan metode ceramah, sehingga pada setiap pengajian dapat disisipkan materi mengenai lingkungan. Forum pengajian biasanya sudah melembaga, sehingga bisa menjadi salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyuluhan tentang pentingnya lingkungan, maupun media sosialisasi program baik di bidang kehutanan atau lainnya yang berasal dari pemerintah, LSM, dan sebagainya.

Hal ini diperkuat dengan faktor dominan dari para kyai, seperti diciptakan sholat lingkungan (pesantren Luhur Al-wasilah), yang sering dikumandangkan pada saat pengajian ataupun sebelum adzan. Metode ceramah digunakan dengan harapan dapat merubah pola pikir, bahwa pentingnya menjaga lingkungan merupakan bagian dari agama (ibadah), dan diimplementasikan melalui penanaman pohon/kayu. Upaya merubah pola pikir tidak hanya dilakukan pesantren melalui ceramah saja, tetapi juga dengan tindakan nyata melalui pembagian bibit pohon/kayu dan polybag kepada masyarakat secara gratis.

Seperti disampaikan oleh Diniyati, dkk (2008) bahwa para mustame sudah mengetahui dan menyadari bahwa dengan menanam lahan-lahan yang terlantar/gersang dengan tanaman kehutanan/buah-buahan, maka akan menghasilkan keuntungan dari aspek ekonomi dan ekologi. Aspek ekonomi memberikan keuntungan seperti menghasilkan kayu yang akan dipergunakan sendiri ataupun untuk dijual, tabungan dan menambah pendapatan. Aspek ekologi yang sangat dirasakan yaitu wilayah tersebut menjadi hijau dengan tanaman sehingga dapat menghasilkan air. Air ini bermanfaat untuk keberhasilan (membersihkan diri) diantaranya untuk berwudu. Wudu ini diperlukan untuk membersihkan diri dari kotoran supaya dapat menjalankan ibadah sholat. Sholat merupakan perintah Allah SWT yang harus ditaati oleh umat muslim.

Tabel 1. Nilai Konservasi Hutan Rakyat Menurut Mustame

Table 1. Conservation value of Privately owned forests by mustame (respondent)

Desa (Village)	Manfaat Hutan Rakyat			
	Ekonomi (Economy)	Σ Responden (Respondent)	Ekologi (Ecology)	Σ Responden (Respondent)
Cilolohan	- Nilai ekonomi, finansial	9	- Menjaga longsor dan erosi	10
	- Peningkatan modal	1	- Menyediakan air dan udara bersih	1
	- Tidak langsung menghasilkan	1	- Menghijaukan kembali hutan	3
	- Hasilnya tidak sesuai yang diharapkan	3	- Tidak tau	2
	- Pasaran tinggi	2		
	Jumlah	16	Jumlah	16
Majasari	- Harga pasar bagus	5	- Menjaga longsor	5
	- Menambah pendapatan	5	- Menjaga persediaan air	5
	- Dikelola baik hasilnya banyak	1	- Mencegah banjir	1
	- Tabungan masa depan	1	- Tidak ada	2
	- Dipergunakan untuk kayu	1		
	Jumlah	13	Jumlah	13

Sumber/ Source: Diniyati, dkk. (2008)/ Diniyati, et al. (2008)

IV. KEUNGGULAN KOMPARATIF PESANTREN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama dan khas pribumi Indonesia mempunyai keunikan atau kekhasan, tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Pesantren juga memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat.

Pesantren merupakan lembaga yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain atau lebih tepat disebut sebagai keunggulan komparatif. Sudaryanto dan Simatupang (1993) dalam Saptana (2008) menyatakan bahwa konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Konsep keunggulan komparatif ini lebih pada komoditas/produk, dimana komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi.

Sebagai sebuah lembaga, pesantren memiliki keunggulan komparatif yaitu merupakan salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadikan pesantren layak sebagai lembaga pengembang hutan rakyat dibandingkan dengan lembaga lainnya. Akan tetapi masih harus diperkuat dari sisi keahlian manajerial, administrasi dan sisi bisnis. Beberapa keunggulan yang dimiliki pesantren, diantaranya seperti diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keunggulan Komparatif Pesantren
 Table 2. *Comparative advantages of the muslim school board*

No.	Aspek (<i>Aspect</i>)	Keunggulan Pesantren (<i>Advantages of the moslem school</i>)
1.	Jaringan kerja	- Terletak di desa dan berhubungan langsung dengan masyarakat (<i>grass root</i>) - Jumlah lembaga pesantren yang banyak
2.	Aspek Demografi	- Massa organisasi yang jelas
3.	Sumber Daya Manusia	- Pemimpin (Kyai) yang karismatik/ <i>Strong leadership</i> - Santri dan mustame berjumlah banyak
4.	Sosial	- Sifat gotong royong dan kekeluargaan tinggi - Manajemen massa yang baik
5.	Ekonomi	- Jumlah tenaga kerja yang banyak

Sumber/ *Source*: Analisis data primer, 2007/ *Primary data analysis, 2007.*

Berdasarkan Tabel 2 dapat diuraikan keunggulan komparatif pesantren sebagai berikut:

1) Aspek Jaringan Kerja

- Jumlah organisasi pesantren banyak

Saat ini jumlah pondok pesantren (pontren) di Indonesia sekitar 11.312 unit dengan jumlah santri 2.737.805 jiwa. Jumlah Pontren di Jawa Barat pada tahun 2005 sebanyak 4.388 unit yang terdiri dari 1.311 Pontren berlokasi di daerah pegunungan, 1.085 di daerah pertanian, 87 di sekitar pantai, dan 114 berada di tepi sungai (Departemen Agama, 2001 *dalam* Hermawan, 2007). Sebagai sebuah komunitas pesantren dapat berperan sebagai penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar.

Banyaknya pesantren akan menciptakan jaringan kerja yang baik, karena pesantren yang ada di pedesaan dapat dijadikan agen pengembangan hutan rakyat (penghijauan), sehingga dengan banyaknya agen maka pengembangan usaha hutan rakyat (penghijauan) akan lebih mudah dan murah.

- Letak pesantren di pedesaan

Sekitar 78% Pontren berada di pedesaan. Hal ini terjadi karena santri yang sudah lulus dari pesantren akan mengamalkan ilmunya dengan mendirikan pesantren di daerah asalnya, terutama para santri lulusan pesantren Cintawana dan pesantren Luhur Al-Wasilah.

Pesantren diharapkan turut memberi investasi sosial bagi masyarakat dan salah satu cara yang membuat pesantren menjadi hidup, adalah dengan membawa persoalan-persoalan nyata di masyarakat ke dalam dunia pesantren (Maarif, 2007). Dengan jumlah pesantren yang banyak dan tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia, pesantren dapat menjadi sumber kekuatan dalam mengembangkan program penghijauan, karena tidak semua lembaga sosial memiliki jaringan sosial seluas pesantren.

2) Aspek Demografi

Keberadaan pesantren di Indonesia sudah cukup lama, sehingga lembaga ini memiliki massa yang pasti dengan jumlah yang banyak. Program, visi dan misi pesantren sudah jelas

dan pasti, sehingga organisasi ini dari waktu ke waktu tidak pernah kekurangan massa, bahkan semakin bertambah. Ini merupakan keunggulan pesantren lainnya yang tidak dimiliki oleh lembaga sosial lain.

Massa yang banyak merupakan modal tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Adanya Norma menghormati Kyai sebagai guru di pesantren, akan lebih melancarkan kegiatan RHL karena para santri akan dengan ikhlas melakukan kegiatan RHL.

3) Aspek Sumber Daya Manusia

- Pesantren mempunyai pimpinan/kyai yang kharismatik

Kepemimpinan kyai dalam sebuah pesantren adalah penting, karena sangat berpengaruh terhadap kemampuan pesantren dan santrinya itu sendiri untuk terus maju dan berkembang. Jones (1991) menyatakan bahwa salah satu peranan pesantren adalah menjaga kestabilan masyarakat dengan membangun dan menjaga keseimbangan antara kaum-kaum yang berbeda status, khususnya antara golongan atas (elit) dan petani. Pesantren diyakini mempunyai peluang yang sangat besar dalam pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan karena pesantren rata-rata berada di pedesaan dengan Kyai yang memiliki kharisma baik di mata masyarakat sehingga pesantren mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam memberdayakan masyarakat (Benda, 1958 *dalam* O'Hanlon, 2006; Qamarudin, 2005).

Dari hasil wawancara dengan salah satu pimpinan pesantren, diakui bahwa kepemimpinan mereka di pesantren sangat berpengaruh dan menentukan langkah dari pesantren yang dipimpinnya. Kharisma dari kyai memudahkan pelibatan santri atau mustamena dalam kegiatan yang diprogramkan oleh pesantren, meskipun tidak ada imbalan/keuntungan secara langsung.

- Massa (santri dan pengikut pesantren) yang banyak

Salah satu komponen masyarakat yang diharapkan bisa berperan aktif dalam upaya konservasi alam dan lingkungan adalah pesantren. Menurut data Education Management and Information System (EMIS) Departemen Agama RI, tahun 2001 di seluruh Indonesia terdapat 11.312 pesantren dengan jumlah santri sebesar 2.737.805 jiwa. Dengan fakta seperti itu, pesantren merupakan salah satu komponen strategis bangsa yang bisa berperan efektif dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan.

4) Aspek Ekonomi

- Tenaga kerja tersedia dalam jumlah yang banyak

Seperti diuraikan pada pendahuluan bahwa saat ini jumlah pondok pesantren di Indonesia cukup banyak yakni sekitar 11.312 (jumlah santri sebesar 2.737.805 jiwa) (Departemen Agama, 2001 *dalam* Hermawan, 2007). Banyaknya santri dapat dijadikan sebagai modal tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah banyak. Santri-santri yang bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dapat digunakan dalam pengembangan usaha penghijauan (hutan rakyat).

Hubungan antara santri alumni pesantren dengan pesantrennya biasanya masih terjalin dengan baik, sehingga santri alumni dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pesantren dalam menyukseskan program RHL yang dilakukan melalui pengajian/ceramah di tempat santri alumni menetap. Metode ini dapat dimasukkan sebagai salah satu program dari

kegiatan pesantren dan hal ini dimungkinkan karena sistem pengajaran di pesantren terus berubah dan berkembang, dimana pendidikan ketrampilan kini diaplikasikan di pesantren.

5) Aspek Sosial

- Sifat gotong royong dan kekeluargaan tinggi

Pesantren memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Sifat gotong royong dan kekeluargaan umumnya masih melekat pada masyarakat pedesaan termasuk masyarakat yang basisnya pesantren. Terlebih lagi pesantren dengan mustamennya memiliki rutinitas pengajian yang secara langsung maupun tidak, dapat memperkokoh rasa kekeluargaan dan gotong royong diantara sesama anggota pengajian tersebut.

Sifat ini merupakan kekuatan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Dengan rasa kekeluargaan yang tinggi dan sifat gotong royong maka kegiatan dapat terlaksana tanpa mengandalkan ketersediaan dana. Dana atau uang yang merupakan modal finansial yang penting, namun apabila hanya mengandalkan hal itu maka keberhasilan program akan sangat rendah. Modal sosial yang saat ini sudah banyak dikembangkan berupa *trust*, *networking social*, pertukaran (*reciprocity*) dan aturan bersama-sama dengan modal lainnya akan sangat mendukung suksesnya sebuah program (Fukuyama, 2007). Menurut Syahyuti (2008) modal sosial sangat berbeda dengan modal finansial, dimana dengan semakin sering modal sosial digunakan akan semakin kuat sebaliknya modal finansial mungkin akan semakin habis.

- Manajemen massa yang baik

Manajemen massa merupakan bagian penting dalam sebuah pergerakan. Demikian pula gerakan rehabilitasi lahan seperti halnya program penghijauan atau program pengembangan hutan rakyat yang melibatkan pesantren. Apabila massa dapat dikelola dengan baik, semua pelaku berada dalam satu tujuan dan kepentingan yang sama maka program akan lebih mudah dilaksanakan.

Kemampuan manajemen massa ini terkait dengan keunggulan kharismatik kyai. Selain kemampuan pimpinan dan pengurus pesantren yang mampu mengelola massa dengan baik, jumlah santri dan pengikut pesantren seperti majelis taklim juga merupakan kekuatan yang dimiliki pesantren untuk menjalankan program dengan baik.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagai lembaga kemasyarakatan pesantren memiliki keunggulan komparatif pada aspek SDM, demografi, ekonomi dan sosial yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Aspek tersebut menjadi ciri pesantren dan menjadi kekuatan yang menonjol, terutama ketika ada kebutuhan massa dalam jumlah besar pada kegiatan RHL untuk menanam dan memelihara lingkungan yang dapat dipenuhi oleh pesantren.
2. Faktor keunggulan yang dimiliki pesantren diantaranya adalah : letak pesantren berada langsung ditengah masyarakat dengan lokasi di semua tempat (daerah pantai, pegunungan, pertanian dan tepi sungai), jumlah lembaga pesantren banyak dengan organisasi yang jelas, memiliki Kyai yang karismatik dengan jumlah santri dan mustame yang banyak.

B. Saran

Peran pesantren yang menonjol saat ini masih terletak pada kegiatan kehutanan di sektor hulu. Untuk terlibat dalam kegiatan RHL, pesantren masih memiliki kelemahan diantaranya adalah dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manajemen dan bisnis dibidang kehutanan. Kelemahan tersebut bukan menjadi hambatan tetapi sebagai pendorong pesantren untuk lebih meningkatkan sistem pengajarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan teknis yang terkait dengan ilmu kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Pontren Berperan Strategis Menanggulangi Lahan Kritis. Umumnya Berlokasi di Pedesaan Dekat dengan Hutan. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/22/1101.htm>. Diakses tanggal 6 Juli 2008.
- Anonim. 2007. Pedoman Teknis Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan). Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Anonim. 2010. Perbedaan Keunggulan Kompetitif dengan Keunggulan Komparatif. <http://www.hidayaters.wordpress.com/.../perbedaan-keunggulan-kompetitif-dengan-keunggulan-komparatif/>. Diakses tanggal 6 Mei 2010.
- Awang, S.A., E. B. Wiyono dan S. Sadiyo. 2007. Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal. Banyumili Art Network, Sleman.
- Diniyati, D., Fauziyah, E., Achmad, B. 2008. Kajian Kontribusi Pondok Pesantren Pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Prosiding. Pembangunan Hutan Rakyat Melalui Optimalisasi Hasil dan Diversifikasi Produk Tanaman Multiguna dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi dan Energi. Seminar Hasil-hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Ciamis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, Bogor.
- Fukuyama, F. 2007. The Great Disruption. Hakikat Manusia Dan Rekonstitusi Tatanan Sosial. Penerbit Qalam, Jakarta.
- Hermawan. 2007. Pesantren dan Krisis Lingkungan. <http://www.agama.dan.ekologi.blogspot.com/2007/04/pesantren-dan-krisis-lingkungan.html>. Diakses tanggal 25 oktober 2007.
- Jones, S. 1991. The Javanese Pesantren: between elite and peasantry, in Reshaping Local Worlds: formal education and cultural change in rural South-East Asia, New Haven, Conn: Yale Center for International and Area Studies.
- Maarif, NH. 2007. Menanti Kiprah Riil Pesantren. <http://www.mambaussholihin.com/artikel/index.php?category=tarbiyah&nomor=15>. Diakses tanggal 25 November 2007
- Musaddad, T.D. 2007. Pembangunan Pedesaan Mandiri. Berbasis Amal Shaleh Sosial Berwawasan Lingkungan. Humaniora. Bandung.

- Nasution, M. 1999. Dephutbun dan MUI Jalin Kerjasama: Pontren Belum Pernah Disentuh. *Majalah Kehutanan Indonesia (MKI)*, Edisi I/XIII/1999 2000, Jakarta.
- O'Hanlon, M.G. 2006. Pesantren dan Dunia Pemikiran Santri: Problematika Metodologi Penelitian yang Dihadapi Orang Asing. Program ACICIS Angkatan XXI, 2005-2006. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Qamarudin. 2005. Pendidikan Lingkungan Berbasis Pontren. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/22/1101.htm>. Diakses tanggal 25 September 2007.
- Saptana. 2008. Keunggulan Komparatif-Kompetitif dan Strategi Kemitraan. <http://www.Pse.litbang.deptan.go.id/ind.pdf.file>. Diakses tanggal 19 Januari 2008.
- Soekanto, S. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suyuti, A. 2008. Pengertian Pondok Pesantren. <http://www.damandiri.or.id/file/ahmadsuyutiunairbab2.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2008.
- Syahyuti. 2008. *SocialCapital*. http://www.geocities.com/syahyuti/social_capital.pdf. Diakses tanggal 4 Desember 2008.

**KONTRIBUSI EKONOMI DAN SISTEM PEMASARAN
HASIL HUTAN RAKYAT POLA WANAFARMA
DI MAJENANG, CILACAP**
*(Economic Contribution and Marketing System of Wanafarma Pattern
in Privately Owned Forest Products at Majenang, Cilacap)*

Oleh/By :

Tri Sulistyati Widyaningsih & Dian Diniyati
Balai Penelitian Kehutanan Ciamis
Jl. Raya Ciamis Banjar Km 4 dsn Pamalayan Ciamis
Telp. 081546815496 e-mail: dian_diniyati@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims at finding out the economic contribution and marketing system of wanafarma pattern (the development of timber and medicinal plants) products. This study was conducted in May-June 2006 in Bener, Sepatnunggal, and Sadabaya Villages, Majenang Sub District, Cilacap District. The number of respondents of this study weres 57 farmers, consisting of timber and medicinal plants gatherer. Data were collected through interviews and documentation, and then analyzed by qualitative and quantitative descriptive approach. The results showed that there were several types of wood that had a high market opportunity that was albasia, mahogany, and teak. The main livelihoods of respondents were as farmers and farm laborers in the average area of 0.95 ha planted with albasia, mahogany, annual plants, and medicinal plants. The forests contribution for families income was still low amount 4.69% (timber) and 12.06% (medicinal plants). The flow marketing of two forest products involved farmer, gatherer level I-II, lumber, industrial, and households consumer. The profit margin of albasia timber 10-15 cm amounted 44.05% (farmer), 12% (gatherer I), and 23.91% (gatherer II). The profit margin of cardamon amount 85.45% (farmers), 13.64% (village level collector), and 5.63% (sub district level collectors). Market opportunities for both types of forest products is quite open, especially for industry needs.

Keywords: *Wanafarma privately owned forest, timber plants, medicinal plants, economic contributions, marketing*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengetahui kontribusi ekonomi dan sistem pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma yaitu pengembangan tanaman kayu dan obat-obatan. Kajian dilaksanakan bulan Mei-Juni 2006 di Desa Bener, Sepatnunggal, dan Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Responden adalah 57 orang petani hutan rakyat yang dipilih secara sengaja, pengepul kayu, dan tanaman obat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa jenis kayu yang memiliki peluang pasar tinggi yaitu albasia, mahoni, dan jati. Mata pencaharian utama responden sebagai petani dan buruh tani dengan lahan rata-rata 0,95 ha yang ditanami kayu albasia, mahoni, kayu tahunan, dan tanaman obat-obatan. Kontribusi hasil hutan rakyat terhadap pendapatan keluarga masih rendah sebesar 4,69% (kayu) dan 12,06% (tanaman obat). Alur pemasaran kedua hasil hutan rakyat melibatkan petani, pengepul tingkat I (desa), pengepul tingkat II (kecamatan), pengunggajian, industri, dan konsumen rumah tangga. Marjin keuntungan kayu albasia 10-15 cm sebesar 44,05% (tingkat petani), 12% (pengepul tingkat I), dan 23,91% (pengepul tingkat II). Marjin keuntungan tanaman kapulaga di tingkat petani 85,45%, pengumpul tingkat desa 13,64%, dan pengumpul tingkat kecamatan 5,63%. Peluang pasar kedua jenis hasil hutan ini cukup terbuka terutama untuk kebutuhan industri.

Kata kunci: Hutan rakyat wanafarma, tanaman kayu, tanaman obat, kontribusi ekonomi, pemasaran

I. PENDAHULUAN

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pembangunan ekonomi menyebabkan kebutuhan terhadap bahan baku kayu terus meningkat. Kebutuhan kayu secara nasional diperkirakan mencapai 60 juta m³/tahun, sementara pasokan kayu dari hutan alam dan hutan tanaman hanya mencapai sekitar 25 juta m³/tahun (RLPS, 2002 dalam Sukrianto, *et al.*, 2006). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) kayu yang berasal dari hutan negara, termasuk di Jawa yang mempunyai penduduk paling banyak dengan kebutuhan kayu mencapai 9 juta m³/tahun, sedangkan produksi kayu Perhutani hanya mencapai 1,5 juta m³/tahun (Suryohadikusumo dalam Sukrianto, *et al.*, 2006). Kesenjangan semakin besar karena pemerintah menerapkan pembatasan penebangan dari hutan alam dan hutan tanaman. Produksi kayu yang resmi dari unit-unit perusahaan hutan di luar Pulau Jawa akan terus dikurangi. Pada tahun 2002, ijin-ijin penebangan akan dikurangi menjadi 6,4 juta m³ dibanding dengan kebutuhannya yang diperkirakan mencapai 30 juta m³ per tahun (Djajapertjunda, 2003). Jumlah produksi yang diperbolehkan yang tidak akan memenuhi kebutuhan, dikhawatirkan akan berdampak pada pemenuhan kayu di Jawa yang sebagian besar tergantung dari kayu yang didatangkan dari luar Pulau Jawa.

Kondisi tersebut menyebabkan posisi hutan rakyat sebagai alternatif sumber bahan baku kayu semakin meningkat. Penelitian Nuripto (1994 dalam Awang, *et al.*, 2001) menunjukkan bahwa penghasil sistem hutan kerakyatan di Bentian, Kalimantan Timur mencapai 25,2 kali nilai ekonomis yang diperoleh dengan sistem HPH. Hasil tersebut baru berasal dari hasil hutan non kayu (rotan, madu, lilin, dan kedaung), belum termasuk hasil kayu. Kemudian Farma Yuniandra (1998 dalam Awang, *et al.*, 2001) menyatakan setidaknya 70% konsumsi kayu di Pulau Jawa dipenuhi dari hutan rakyat.

Pembangunan hutan rakyat selain bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, juga untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat pemilik hutan rakyat berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Agar pembangunan hutan rakyat dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu dilakukan pemilihan pola tanam dengan jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan. Salah satunya adalah tumpangsari antara tanaman kayu dengan tanaman obat-obatan yang disebut dengan pola wanafarma. Dengan pola ini, petani dapat memperoleh hasil dalam jangka pendek dari tanaman obat-obatan dan jangka panjang dari tanaman kayu. Pengembangan hutan rakyat dengan pola tersebut banyak dijumpai di Kabupaten Cilacap yang dikenal sebagai sentra penghasil jamu yang memerlukan tanaman obat-obatan sebagai bahan baku.

Salah satu kelemahan dalam pengembangan hutan rakyat di berbagai daerah selama ini adalah kurangnya informasi sistem pemasaran hasil hutan rakyat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi ekonomi dan sistem pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyempurnaan kegiatan, pemberian fasilitas, dan menggerakkan partisipasi petani dalam program pembangunan hutan rakyat, terutama pengembangan pola wanafarma, sehingga tercipta kemandirian petani, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian hutan rakyat.

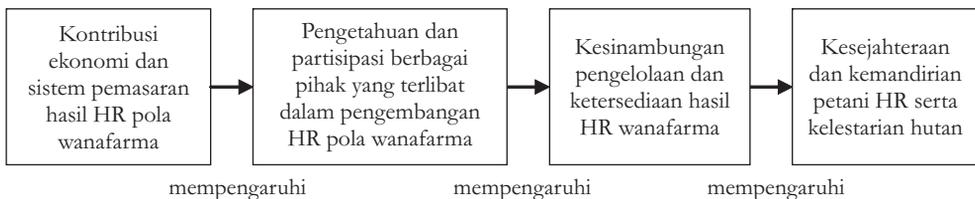
II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Analisis

Pemasaran secara umum menurut Sudiyono (2004) adalah proses aliran barang yang terjadi dalam pasar, di mana barang mengalir dari produsen kepada konsumen akhir yang disertai dengan penambahan guna bentuk melalui proses pengolahan, guna tempat melalui proses pengangkutan, dan guna waktu melalui proses penyimpanan. Semakin kompleks sistem pemasaran, maka semakin banyak pihak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran tersebut yang akhirnya membentuk lembaga pemasaran.

Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa, dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran ini timbul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen secara maksimal. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini berupa margin pemasaran (Sudiyono, 2004). Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat pengecer (konsumen akhir) dengan harga di tingkat petani. Komponen margin pemasaran ini terdiri dari 1) biaya yang diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang disebut biaya pemasaran atau biaya fungsional (*functional cost*) dan 2) keuntungan (*profit*) lembaga pemasaran. Margin pemasaran akan terlihat jelas melalui penelitian terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi untuk mengetahui alur pemasaran yang ada dan perhitungan distribusi keuntungan antar pelaku pemasaran.

Informasi sistem pemasaran (lembaga pemasaran, alur pasar, serta margin pemasaran) dan kontribusi ekonomi akan mendukung pengembangan hutan rakyat pola wanafarma. Informasi tersebut akan meningkatkan pengetahuan serta partisipasi petani dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangannya. Semakin banyak pihak yang berpartisipasi dalam pengembangan pola wanafarma akan menyebabkan kesinambungan dalam pengelolaan dan ketersediaan hasil hutan rakyat wanafarma. Secara perlahan hal tersebut akan menciptakan kemandirian petani, karena hasil pengembangan pola ini dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang berimbang pada kesejahteraan petani, selain manfaat ekologis berupa kelestarian hutan rakyat. Kerangka analisis pengembangan hutan rakyat pola wanafarma dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Analisis Pengembangan Hutan Rakyat Wanafarma
Figure 1. Analysis Framework of Wanafarma Privately Owned Forest Development

B. Lokasi, Waktu, dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang banyak mengembangkan tanaman obat-obatan serta tanaman kayu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2006 di tiga desa sampel, yaitu Desa Bener, Desa Sepatnunggal, dan Desa Sadahayu. Pemilihan responden menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan sampel secara sengaja sesuai tujuannya), yaitu petani hutan rakyat yang menanam tanaman obat-obatan di bawah tegakan hutan rakyat, sebanyak 57 orang atau 19 orang setiap desanya, serta pengepul dan bandar yang terlibat dalam pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma baik berupa kayu maupun tanaman obat.

C. Teknik Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), berupa karakteristik responden petani, sistem penjualan, pembelian, dan pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma, biaya pembelian dan penjualan serta permasalahan terkait pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma. Data sekunder berupa monografi desa dan kecamatan dalam angka yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

Data yang terkumpul berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi. Perhitungan margin pemasaran menggunakan formulasi sebagai berikut (Andayani, 2005; Awang, *et al.*, 2002):

$$M_p = P_r - P_f \text{ atau } M_p = b_i + k_i$$

Dimana:

M_p = margin pemasaran

P_r = harga di tingkat pengecer

P_f = harga di tingkat produsen

b_i = jumlah biaya yang dikeluarkan lembaga pemasaran (B1, B2, B3)

k_i = jumlah keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran

Semua data kuantitatif yang telah diolah kemudian dipadukan dengan data kualitatif untuk dianalisis secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Hutan Rakyat di Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 225.361 ha atau 2.254 km². Kabupaten Cilacap secara administratif terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 kelurahan. Potensi wilayahnya terdiri lahan sawah seluas 63.062 ha dan lahan kering seluas 150.788 ha (Anonim, 2005d).

Hutan di Kabupaten Cilacap terdiri dari hutan negara seluas 37.844 ha dan hutan rakyat seluas 22.743 ha yang tersebar di 23 kecamatan. Tiga kecamatan dengan hutan rakyat terluas adalah Dayeuhluhur, Wanareja, dan Cimanggung. Jenis tanaman yang dominan di hutan rakyat yaitu akasia, bambu, jati, mahoni, pinus, albasia, sonokeling, suren, cemara, cempaka,

rasamala, eucalyptus, johar, dan maja. Tanaman obat-obatan termasuk dalam kategori tanaman perkebunan, yang didominasi oleh kelapa dalem, kelapa deres, kelapa hibrida, kapuk, aren, cengkeh, karet, lada, kopi, jambu mete, panili, sereh wangi, kakao, pinang, kunyit, kencur, kapulaga, jahe, dan lengkuas. Tanaman obat yang banyak dikembangkan di Kabupaten Cilacap terdapat 13 jenis dan yang paling utama adalah kencur, jahe, kapulaga, dan kunyit (Anonim, 2006b).

B. Kondisi Lokasi Penelitian dan Karakteristik Responden di Desa Bener, Desa Sepatnunggal dan Desa Sadahayu, Kecamatan Majenang

Desa Bener, Desa Sepatnunggal dan Desa Sadahayu, Kecamatan Majenang berada di Kabupaten Cilacap bagian utara dengan ketinggian di atas 100 m dpl (Anonim, 2005b; Anonim, 2006a). Desa Bener memiliki wilayah seluas 1.013 ha, Desa Sepatnunggal 498 ha, dan Desa Sadahayu 1.545 ha (Anonim, 2005c). Komposisi tanah kering di tiga desa ini lebih luas dibandingkan dengan tanah sawah, sehingga jenis tanaman yang cocok merupakan tanaman tahunan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap pada bulan Juni 2006, bahwa wilayah tersebut menjadi prioritas untuk pengembangan hutan rakyat. Hutan rakyat di lokasi penelitian pada umumnya ditanam dengan pola tanam campuran (wanatani), yang menurut Windawati (2009), yaitu bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan cabang usaha lainnya seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu. Adanya pengaturan jenis tanaman, maka pendapatan akan diperoleh secara periodik sesuai dengan periode waktu panen tanamannya. Jenis tanaman yang diusahakan oleh penduduk terdiri dari tanaman pertanian (padi, ketela pohon, kacang panjang), tanaman buah-buahan (pisang, alpukat, dan lain-lain), tanaman perkebunan (kelapa, kopi, cengkeh, panili, dan lada), dan tanaman kehutanan (albasia, mahoni, enau, dan lain-lain).

Pada umumnya penduduk bermata pencaharian sebagai petani tanaman keras (kebun/ hutan rakyat), hal ini sejalan dengan kondisi mata pencaharian yang paling dominan yaitu sebagai petani, diikuti oleh buruh tani, pertukangan, pedagang, pegawai negeri sipil/ ABRI, karyawan, pegawai swasta, dan jasa. Tingkat pendidikan mayoritas adalah lulusan SD, sehingga jenis pekerjaannya tidak bervariasi ditambah lagi peluang mencari pekerjaan di desa masih sulit, yang tersedia hanyalah sebagai petani atau buruh tani yang tidak memerlukan kualifikasi khusus. Karakteristik responden terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden di Desa Bener, Sepatnunggal dan Sadahayu
 Table 1. Respondent characteristics in Bener, Sepatnunggal, and Sadahayu Villages

No. Number	Karakteristik Characteristic	Bener		Sepatnunggal		Sadahayu		Jumlah Total
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	
1.	Jenis kelamin							
a.	Laki-laki	18	94,7	18	94,7	17	89,5	53
b.	Perempuan	1	5,3	1	5,3	2	10,5	4
		19	100,0	19	100,0	19	100,0	57
2.	Umur responden (tahun)							
a.	< 15	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
b.	15 – 54	9	47,4	12	63,2	12	63,2	33
c.	> 54	10	52,6	7	36,8	7	36,8	24
		19	100,0	19	100,0	19	100,0	57
3.	Jumlah tanggungan keluarga (orang)							
a.	< 3	9	47,4	12	63,1	9	47,4	30
b.	3 – 8	10	52,6	6	31,6	9	47,4	25
c.	> 8	0	0,0	1	5,3	1	5,3	2
		19	100,0	19	100,0	19	100,0	59
4.	Tingkat Pendidikan							
a.	Tidak sekolah	1	5,3	0	0	2	10,5	3
b.	SD	13	68,4	14	73,7	12	63,2	39
c.	SLTP/SLTA	5	26,3	4	21,0	5	26,3	14
d.	PT	0	0,0	1	5,3	0	0,0	1
		19	100,0	19	100,0	19	100,0	57
5.	Pekerjaan utama							
a.	Tani/Buruh	19	100,0	14	73,7	18	94,7	51
b.	PNS	0	0,0	2	10,5	0	0,0	2
c.	Wiraswasta	0	0,0	2	10,5	1	5,3	3
d.	Aparat Desa	0	0,0	1	5,3	0	0,0	1
		19	100,0	19	100,0	19	100,0	57
6.	Pekerjaan sampingan							
a.	Tidak punya	6	31,6	0	0,0	5	26,3	11
b.	Tani/Buruh	6	31,6	15	79,0	3	15,8	24
c.	Ternak	3	15,8	2	10,5	6	31,6	11
d.	Wiraswasta	0	0,0	2	10,5	0	0,0	2
e.	Aparat Desa	4	21,0	0	0	5	26,3	9
		19	100,0	19	100,0	19	100,0	57
7.	Pengalaman usaha tani							
a.	< 10 th	1	5,3	1	5,3	2	10,5	4
b.	10 – 30 th	7	36,8	7	36,8	8	42,1	22
c.	> 30 th	11	57,9	11	57,9	9	47,4	31
		19	100,0	19	100,0	19	100,0	57

Sumber/Source: Analisis data primer/Primary data analysis. 2006

Masyarakat mengelola hutan rakyat di lahan-lahan milik secara swadaya, dengan luas lahan berkisar antara 0,86 ha - 0,95 ha, sedangkan luas lahan garapan rata-rata hanya 0,09 ha di Desa Bener, 0,00 ha di Desa Sepatnunggal, dan 0,12 ha di Desa Sadahayu yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kepemilikan Lahan Responden

Table 2. Respondent land tenure

No. Number	Desa Village	Lahan milik (ha) Owned land (ha)	Lahan garapan (ha) Arable land (ha)	Jumlah (ha) Total (ha)
1.	Bener			
	Total	16,42	1,71	18,12
	Rata-rata	0,86	0,09	0,95
2.	Sepatnunggal			
	Total	21,33	0,00	21,33
	Rata-rata	1,12	0,00	1,12
3.	Sadahayu			
	Total	16,26	2,20	18,46
	Rata-rata	0,86	0,12	0,97
4.	Jumlah			
	Total	54,01	3,91	57,91
	Rata-rata	0,95	0,07	1,02

Sumber/Source: Analisis data primer/Primary data analysis. 2006

Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, sedangkan responden perempuan hanya berkisar 5-10%, karena pengusahaan hutan rakyat mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang mayoritas bertani atau menjadi buruh tani, sedangkan perempuan hanya membantu. Mayoritas responden di Desa Sepatnunggal dan Desa Sadahayu termasuk dalam kategori berusia produktif (15 - 54 tahun) sebanyak 63,2%, sedangkan responden Desa Bener mayoritas termasuk usia non produktif sebesar 52,6%. Adanya usia petani yang produktif diharapkan pengelolaan hutan rakyat dapat berjalan optimal karena dilakukan oleh petani yang masih mempunyai banyak tenaga untuk mengembangkannya.

Mayoritas responden berpendidikan rendah karena hanya menempuh pendidikan di tingkat SD, sehingga untuk mengembangkan hutan rakyat harus banyak didukung oleh pengalaman dan pemberian pelatihan. Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan pekerjaan utama responden secara umum sebagai buruh tani seperti di Desa Bener 100%, Desa Sepatnunggal 73,7%, dan Desa Sadahayu 94,7%. Peluang pekerjaan yang tersedia selain sebagai petani atau buruh tani adalah sebagai buruh sadap getah pinus di Perhutani.

C. Kondisi Ekonomi Responden Petani Hutan Rakyat Wanafarma

Kondisi ekonomi responden petani dapat dilihat dari jumlah pendapatan dan pengeluaran yang dipengaruhi oleh aset berupa lahan, serta jenis pekerjaan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga. Pendapatan responden meliputi pendapatan utama, sampingan, dan keluarga (Tabel 3).

Tabel 3. Pendapatan Responden per Tahun (Rp)

Table 3. Respondent Income per Year (Rp)

No. Number	Desa Village	Pendapatan Utama Main income	Pendapatan Sampingan Additional income	Pendapatan Keluarga Family Income	Jumlah Total
1.	Bener				
	Total	130.691.100	47.725.000	3.600.000	182.016.100
	Rata-rata	6.878.479	2.511.842	189.474	9.579.795
2.	Sepatnunggal				
	Total	70.232.000	73.794.500	12.102.000	156.125.500
	Rata-rata	3.696.421	3.883.921	636.947	8.217.132
3.	Sadahayu				
	Total	84.993.804	42.845.000	7.200.000	135.943.904
	Rata-rata	4.473.358	2.255.000	378.947	7.154.942
4.	Jumlah				
	Total	285.916.904	164.364.500	22.902.000	474.085.504
	Rata-rata	5.016.086	2.883.588	401.789	8.317.290

Sumber/Source: Analisis data primer/Primary data analysis. 2006

Tabel 3 memperlihatkan pendapatan tertinggi diperoleh oleh responden di Desa Bener, kemudian Desa Sepatnunggal dan Desa Sadahayu. Pendapatan tersebut dimanfaatkan responden untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hajatan, tabungan, dan lain-lain. Pengeluaran responden di ketiga desa terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pengeluaran Responden per Tahun (Rp)

Table 4. Respondents Expenditures per Year (Rp)

No. Number	Desa Villages	Jenis Pengeluaran (Type of Expenditures)								Jumlah Total
		Pangan Food	Sandang Cloth	Papan House	Pendidikan Education	Kesehatan Health	Piknik Recreation	Tabungan Saving	Lainnya Other	
1.	Bener									
	Total	78449000	6468500	6111000	7281667	2276400	620000	400000	6342000	107447767
	Rata-rata	4128895	340447	321632	383246	119811	32632	21053	333789	5655146
2.	Sepatnunggal									
	Total	57829000	5370000	7336500	24866000	2961000	500000	12000000	14838000	126214500
	Rata-rata	3043632	282632	386132	1308737	155842	26316	631579	780947	6642868
3.	Sadahayu									
	Total	50095000	4333300	5102000	5997000	2877000	0	2760000	10260000	83460800
	Rata-rata	2636579	228068	268526	315632	151421	0	145263	540000	4392674
4.	Jumlah Keseluruhan									
	Total	186373000	16171800	18549500	38144667	8114400	1120000	15160000	31440000	317123067
	Rata-rata	3269702	283716	325430	669205	142358	19649	265965	551579	5563563

Sumber/Source: Analisis data primer/Primary data analysis. 2006

Jenis pengeluaran responden di ketiga desa hampir seimbang antara pengeluaran untuk kebutuhan primer (konsumsi keluarga), sekunder (sandang), dan tersier (papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain). Pengeluaran paling besar terdapat pada responden Desa Sepatnunggal, selanjutnya Desa Bener dan Desa Sadahayu. Hal tersebut karena banyaknya responden yang menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat perguruan tinggi, sehingga pengeluaran untuk bidang pendidikan lebih besar daripada pengeluaran pendidikan di dua desa lainnya.

D. Kontribusi Hasil Kayu dan Tanaman Obat-obatan terhadap Perekonomian Keluarga Petani

Hampir seluruh rumah tangga di lokasi penelitian memiliki lahan yang ditanami tanaman kayu dan sebagian menanam tanaman obat. Kontribusi hasil hutan rakyat wanafarma dapat diketahui dari nilai hasil kayu dan tanaman obat-obatan dari lahan yang diusahakan oleh responden (Tabel 6 dan 7).

Tabel 6. Kontribusi Tanaman Kayu bagi Pendapatan Tahunan Petani

Table 6. Timber plantation contribution for annual income of farmers

No. Number	Desa Village	Biaya Tanaman Kayu Cost of timber plantation (Rp)	Pendapatan Tanaman Kayu Income from timber plantation (Rp)	Laba Usaha Tanaman Kayu Profit from timber plantation (Rp)	Pendapatan Responden Respondent income (Rp)	Kontribusi Pendapatan Tan. Kayu bagi Petani Contribution of timber plantation income for farmer (%)
1.	Bener					
	Total	17.119.998	23.580.000	6.460.002	182.016.100	3,55
	Rata-rata	1.316.923	1.813.846	496.923	9.579.795	3,55
2.	Sepatnunggal					
	Total	6.072.227	14.440.333	8.368.106	156.125.500	5,36
	Rata-rata	337.346	802.241	464.895	8.217.132	5,36
3.	Sadahayu					
	Total	5.670.945	13.087.424	7.416.479	135.943.904	5,46
	Rata-rata	436.227	1.006.725	570.498	7.154.942	5,46
4.	Jumlah Keseluruhan					
	Total	28.863.170	51.107.758	22.244.588	474.085.504	4,69
	Rata-rata	655.981	1.161.540	505.559	8.317.290	4,69

Sumber/Source: Analisis data primer/Primary data analysis, 2006

Kontribusi pendapatan tanaman kayu terhadap total pendapatan keluarga petani paling besar terdapat di Desa Sadahayu yaitu 5,46%, sedangkan total kontribusi untuk ketiga desa sebesar 4,69%. Kontribusi ini cukup kecil jika dibandingkan dengan kontribusi tanaman obat yang dapat dilihat dalam Tabel 7. Kontribusi paling besar adalah untuk Desa Bener yaitu sebesar 17,21%, karena laba usaha tanaman obat cukup besar dibandingkan dengan dua desa lainnya. Total kontribusi pendapatan tanaman obat-obatan untuk ketiga desa sebesar 12,06%.

Tabel 7. Kontribusi Tanaman Obat bagi Pendapatan Tahunan Petani

Table 7. Medicinal Plants Contribution for Annual Farmer Income

No. Number	Desa Village	Biaya Tan. Obat Cost of Medicinal Plants (Rp)	Pendapatan Tan. Obat Income of Medicinal Plants (Rp)	Laba Usaha Tan. Obat Profit of Medicinal Plants (Rp)	Pendapatan Responden Respondent Income (Rp)	Kontribusi Pendapatan Tan. Obat bagi Petani Contribution of Medicinal Plants Income for Farmer (%)
1.	Bener					
	Total	1.599.400	32.918.000	31.318.600	182.016.100	17,21
	Rata-rata	123.031	2.532.154	2.409.123	9.579.795	17,21
2.	Sepatnunggal					
	Total	970.000	12.583.500	11.613.500	156.125.500	7,44
	Rata-rata	88.182	1.143.955	1.055.773	8.217.132	7,44
3.	Sadahayu					
	Total	3.798.806	18.060.078	14.261.272	135.943.904	10,49
	Rata-rata	199.937	950.530	750.593	7.154.942	10,49
4.	Jumlah Keseluruhan					
	Total	6.368.206	63.561.578	57.193.372	474.085.504	12,06
	Rata-rata	151.624	1.513.371	1.361.747	8.317.290	12,06

Sumber/Source: Analisis data primer/Primary data analysis. 2006

Tabel 6 dan 7 menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan dari pola wanafarma berupa kayu dan tanaman obat-obatan bagi pendapatan keluarga responden masih rendah, dibandingkan kontribusi dari sektor lain (Tabel 8).

Tabel 8. Perbandingan Nilai Kontribusi Pendapatan Tanaman Obat, Tanaman Kayu, serta Sektor Lain bagi Pendapatan Responden

Table 8. Comparison of income contribution value of medicinal plants income, timber plants, and other sector for respondent income

No. Number	Desa Village	Kontribusi pendapatan tanaman kayu Timber plants income contribution (%)	Kontribusi pendapatan tanaman obat Medicinal plants income contribution (%)	Kontribusi sektor lain Other sector contribution (%)	Jumlah Total (%)
1.	Bener	3,55	17,21	79,24	100
2.	Sepatnunggal	5,36	7,44	87,20	100
3.	Sadahayu	5,46	10,49	84,05	100
Total		4,69	12,06	83,25	100

Sumber/Source: Analisis data primer/Primary data analysis. 2006

E. Peluang Pasar bagi Hasil Hutan Rakyat Wanafarma

Peluang pasar bagi kayu rakyat semakin terbuka karena permintaan yang terus meningkat, seiring dengan semakin banyaknya industri perkerajinan yang memanfaatkan kayu rakyat. Pada umumnya kayu yang dijual oleh petani masih berbentuk log atau tegakan. Industri yang memanfaatkan kayu dari daerah ini adalah PT Alba di Kota Banjar dengan jenis kayu albasia, PT Sabda Alam untuk kayu albasia tanpa cacat, dan PT BKL (Bina Kayu Lestari) di Tasikmalaya untuk jenis albasia dan kayu buah-buahan (nangka, mangga, dan jengkol). Selain itu terdapat permintaan dari industri kecil di Kabupaten Cilacap, konsumen rumah tangga, serta Jakarta. Kebutuhan kayu untuk industri kecil di Cilacap cukup tinggi, apalagi satu desa di wilayah Cilacap memiliki 10-20 penggergajian yang memerlukan bahan baku, sehingga terjadi kekurangan dan perebutan kayu rakyat di tingkat desa. Kondisi kayu yang ada di desa saat ini berdiameter kecil, meskipun jumlah tegakannya semakin banyak. Harga kayu rakyat di tingkat petani tertera pada Tabel 9.

Tabel 9. Harga-harga Kayu Rakyat Jenis Tertentu di Tingkat Petani

Table 9. Prices of Certain Types Privately Owned Timber at Farmer Level

No. Number	Ø (cm)	Mahoni (Rp/m ³) <i>Mahogany</i>	Albasia dan kayu tahunan lain (Rp/m ³) <i>Albasia and other annual plants</i>
1.	10-15	200.000,00	190.000,00
2.	16-19	250.000,00	240.000,00 – 270.000,00
3.	20-24	300.000,00	350.000,00 – 370.000,00
4.	> 25	350.000,00	-

Sumber/*Source*: Analisis data primer/*Primary data analysis*, 2006

Kenaikan BBM menyebabkan harga semua jenis kayu rakyat meningkat sebesar 15%, termasuk kayu-kayu rakyat berdiameter kecil, yang berimbas pada penebangannya sebelum masak tebang. Hal itu menyebabkan mutu kayu yang beredar menjadi kurang bagus, kelestarian bibit terancam karena pohon yang ditebang belum sempat menghasilkan biji, luasan tebang semakin luas sehingga semakin banyak lahan yang terbuka dan berpotensi menimbulkan erosi/banjir.

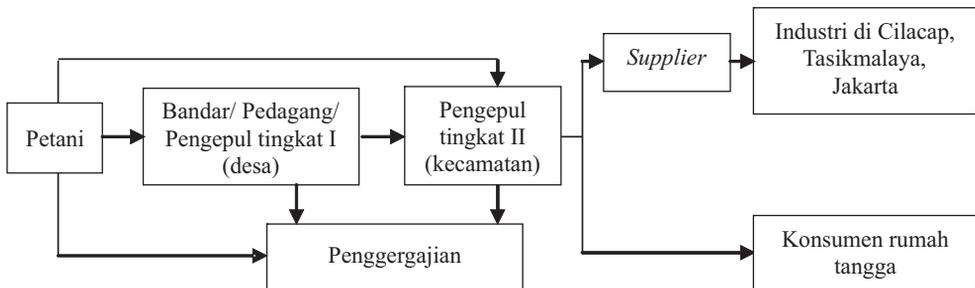
Pada umumnya petani hutan rakyat menanam tanaman obat-obatan berupa jahe, kapulaga, lada, dan lengkuas. Pemilihan jenis ini sangat dipengaruhi oleh teknologi budidaya, modal, dan pemasaran. Pada umumnya petani menjual hasil tanaman obat dalam kondisi basah, tanpa perlakuan khusus. Jika ada perlakuan yaitu penjemuran dengan sinar matahari, tetapi hal ini masih jarang dilakukan karena petani ingin cepat menjual dan segera mendapat uang untuk modal. Hal ini banyak dikeluhkan oleh pengumpul yang lebih menyukai hasil tanaman obat diterima dalam kondisi kering, karena tidak mudah busuk. Pengumpul juga lebih suka membeli jenis kapulaga daripada jahe, karena jahe lebih cepat membusuk serta pemasarannya lambat karena permintaan yang terbatas.

Berdasarkan wawancara dengan para pengepul, hasil tanaman obat ini dikirim ke Jawa Barat dan Jawa Timur untuk memenuhi permintaan pabrik jamu dan industri serta keperluan ekspor. Untuk memenuhi permintaan industri pabrik jamu, sering terjadi kekosongan bahan baku, karena produksi tanaman yang tidak berkelanjutan. Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap juga menyatakan saat ini terjadi degradasi luas dan produk, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pasar lokal dan harus mendatangkan pasokan dari luar Kabupaten Cilacap. Apalagi beberapa pabrik jamu yang ada di Kabupaten Cilacap

justru mengambil bahan baku dari luar kabupaten. Kondisi tersebut menyebabkan kesimpangsiuran dalam aliran bahan baku, karena bahan baku untuk pabrik jamu di Cilacap selain dipasok dari Cilacap, juga dipasok dari daerah lain. Di sisi lain banyak bahan baku dari Cilacap dikirim keluar untuk memenuhi permintaan daerah lain. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan tentang pembelian bahan baku tanaman obat antar daerah. Pedagang ingin mencari keuntungan maksimal sehingga mencari bahan baku dengan harga dan biaya minimal meski harus mendatangkan dari luar daerah.

F. Alur Pemasaran Hasil Hutan Rakyat Wanafarma

Tanaman kayu yang sering diperjualbelikan dan memiliki peluang pasar yang tinggi adalah mahoni, albasia, dan kayu tahunan (nangka, mangga, dan jengkol). Perkiraan *standing stock* hutan rakyat di Kabupaten Cilacap sampai dengan bulan Oktober 2005 untuk tanaman mahoni berjumlah 913.100,46 m³, albasia 2.191.441,09 m³, jati 365.240,18 m³ dan tanaman lain sebanyak 182.620,09 m³ (Anonim, 2005a). Hal tersebut menunjukkan kayu rakyat di Kabupaten Cilacap menjadi prioritas, ditunjang dengan mudahnya sistem pemasaran. Penjualan yang dilakukan biasanya dalam bentuk tegakan berdiri atau per meter kubik, kemudian dijual di kebun/hutan atau ditebang terlebih dahulu dan dijual di pinggir jalan. Biasanya kayu tersebut dibeli oleh bandar-bandar yang ada di desa ataupun *supplier*/bakul yang selalu berdatangan ke desa. Sifat penjualannya berlangganan karena sering melakukan transaksi, sehingga sudah mengenal baik pembelinya. Ada juga yang temporer yaitu menjual ke tempat lain yang baru dikenalnya, dengan alasan mencari harga yang paling tinggi. Transaksi ini biasa dilakukan oleh petani berpengalaman, yang mengetahui berapa harga kayu yang harus dijualnya. Pola pemasaran kayu rakyat dari Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Pemasaran Kayu Rakyat di Kecamatan Majenang
 Figure 2. Marketing Flow of Privately Owned Timber at Majenang Sub District

Hasil wawancara menyatakan bahwa kayu-kayu yang berasal dari Kecamatan Majenang pada umumnya dikirim ke industri di Kabupaten Cilacap, Tasikmalaya, dan Jakarta. Alur pemasaran yang ada cukup sederhana, petani menjual kayu yang sudah ditebang atau tegakan berdiri ke pengepul tingkat I atau pengepul tingkat II. Kayu dengan kualitas baik dikirim ke industri, kayu kualitas nomor dua dikirim ke industri kecil untuk pembuatan peti gula, sedangkan kayu tahunan dikirim ke Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan industri, terdapat *supplier* sebagai penghubung antara pengepul dengan pihak industri. Gambar 2 menunjukkan bahwa alur pemasaran kayu rakyat di Kecamatan Majenang sudah terbuka.

Petani sudah mampu berinteraksi dengan pengunggajian dan pengepul tingkat II yang berarti tidak ada monopoli informasi dari pengepul tingkat I. Tetapi untuk menjangkau pasar yang lebih besar seperti industri, masih dilakukan oleh *supplier*.

Biaya-biaya yang ditimbulkan karena adanya pengangkutan kayu sangat bervariasi. Pengepul tidak mengurus surat di desa karena dianggap petani sudah melakukannya, selanjutnya jika akan menjual ke industri maka yang mengurus semua administrasi adalah *supplier*. Para pengepul tinggal mengantar kayu ke industri. Pembayaran juga tidak langsung berhadapan dengan pabrik, tetapi menagih kepada *supplier*. Biaya administrasi yang berlaku untuk kayu mahoni, albasia, dan kayu tahunan diantaranya:

1. SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terhutang) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Rp 10.000,00 dibayar ke desa, walaupun tidak ada perda yang mengatur; dilakukan karena kesadaran.
2. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Rp 20.000,00 - 50.000,00, tidak ada perda yang mengatur; dilakukan karena kesadaran.
3. SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), biaya ini sesuai dengan perda yang besarnya Rp 3000,00/ m³ untuk kayu mahoni dan Rp 500,00/ m³ untuk kayu albasia dan tahunan.
4. Biaya lain-lain: uang sukarela untuk penerbitan SKSHH sebesar Rp 20.000,00 dan biaya pengecekan lapangan sebelum pelaksanaan penebangan yang besarnya Rp 25.000,00-50.000,00 tergantung jarak lokasi.

Tabel 10. Analisis *Profit Margin* Pemasaran Kayu Albasia 10-15 cm/ m³

Table 10. *Profit margin analysis of albasia timber marketing 10-15 cm / m³*

Pelaku Pasar <i>Market Actors</i>	Distribusi Harga <i>Price Distribution</i>	(Rp)	Prosentase <i>Percentage (%)</i>
Petani	Harga produksi	106.300,00	44,05
	Harga Jual ditingkat petani	190.000,00	
	Marjin Keuntungan	83.700,00	
	% Marjin Keuntungan		
Pengepul tingkat I	Harga beli	190.000,00	12,00
	Harga jual	250.000,00	
	Biaya Tataniaga	30.000,00	
	Marjin Keuntungan	30.000,00	
	% Marjin Keuntungan		
Pengepul tingkat II	Harga beli	250.000,00	23,91
	Harga jual	460.000,00	
	Biaya Tataniaga	100.000,00	
	Marjin Keuntungan	110.000,00	
	% Marjin Keuntungan		
<i>Supplier/</i> Industri/ Konsumen akhir	Harga beli	460.000,00	
	Total Marjin Keuntungan	223.700,00	

Sumber/*Source*: Analisis data primer/*Primary data analysis*. 2006

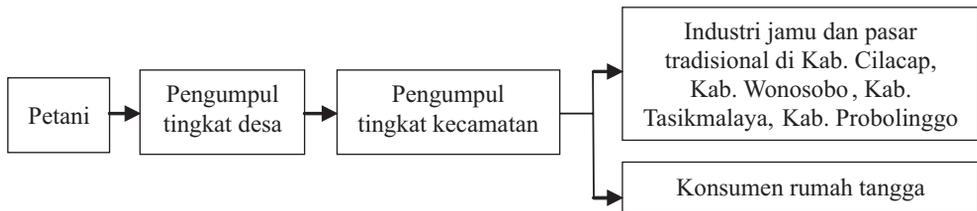
Tabel 11. *Marketing Margin* Pemasaran Kayu Albasia 10-15 cm/ m³
 Table 11. *Marketing Margin of Albasia Timber Marketing* 10-15 cm/ m³

Uraian <i>Description</i>	Status nilai <i>Value status</i>	Harga produksi <i>Price of production</i> (Rp/ m ³)	Prosentase <i>Percentage (%)</i>
Petani	Harga produksi	106.300,00	23,11
Pengepul tingkat I (desa)	Harga beli	190.000,00	41,30
Pengepul tingkat II	Harga beli	250.000,00	54,35
Supplier/Industri/ konsumen akhir	Harga akhir	460.000,00	100,00
Marjin tata niaga		353.700,00	

Sumber/*Source*: Analisis data primer/*Primary data analysis*, 2006

Berdasarkan Tabel 10 dan 11 diketahui bahwa marjin keuntungan di tingkat petani memang terkesan besar yaitu 44,05% untuk jenis albasia 10-15 cm, tetapi jika ditinjau dari segi waktu yang dikorbankan petani dalam memperoleh marjin sebesar itu, hasilnya sangat kecil karena harus menunggu kira-kira 5 tahun. Jika dikalkulasikan dalam tahunan hanya akan diperoleh 8,81% atau 73,41% per bulan setara dengan Rp 1.395,00. Nilai tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan marjin keuntungan yang diperoleh pengepul tingkat I sebesar 12% dan pengepul tingkat II sebesar 23,91% dalam waktu relatif sama. Dari sistem pemasaran yang berjalan, pengepul tingkat II memperoleh bagian terbesar dari harga yaitu 54,35%.

Tanaman obat yang dikembangkan diantaranya kapulaga, jahe, kencur, dan lengkuas yang ditanam sebagai tanaman bawah di lahan hutan rakyat maupun sebagai tanaman pekarangan. Masyarakat biasa menanam tanaman obat-obatan ini, karena didukung kemudahan dalam pemasaran, apalagi terdapat satu pabrik pengolahan obat di Kecamatan Majenang. Alur pemasaran tanaman obat yang berasal dari wilayah Kecamatan Majenang tertera pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Pemasaran Tanaman Obat di Kecamatan Majenang
 Figure 3. *Marketing Flow of Medicinal Plants in Majenang Sub District*

Gambar 3 menunjukkan bahwa alur pemasaran tanaman obat ini sangat sederhana. Petani pada umumnya menjual langsung kepada pengumpul di tingkat desa. Ada juga petani yang menjual langsung ke pedagang di kecamatan, namun perbedaan harganya tidak terlalu besar. Jika petani menjual ke pedagang desa untuk komoditi kapulaga Rp 27.500,00, sedangkan jika langsung dijual ke bandar di kecamatan Rp 33.000,00 tetapi harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dari desa ke kecamatan. Demikian juga untuk jahe, kencur, dan lengkuas. Pembayaran bersifat tunai antara petani dan pedagang tingkat desa maupun kecamatan.

Ada juga petani yang sudah terlebih dahulu mengambil uang kepada para pengepul dan dibayar pada saat panen, sehingga antara petani dan pedagang pengumpul sudah berlangganan dan jarang sekali petani yang menjualnya ke tempat lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ikatan kekeluargaan antara petani dan pengumpul. Sistem penjualan lainnya yaitu adanya bakul-bakul tanaman obat yang merupakan pegawai dari para bandar di tingkat kecamatan, yang berkeliling untuk mencari bahan baku dan melakukan transaksi dengan petani. Selanjutnya para bakul tersebut mendapat keuntungan dari selisih antara harga di tingkat petani dan harga yang diterima di bandar. Volume penjualan yang dilakukan petani adalah per kilo atau kwintal tergantung pada hasil produksi. Banyaknya bakul yang datang ke desa menyebabkan terjadinya persaingan bahan baku antara pengumpul desa dan bakul, apalagi produksi tanaman obat-obatan ini semakin menurun, sehingga terdapat permintaan yang tinggi tetapi ketersediaan bahan baku terus menurun. Meskipun permintaan meningkat, tetapi harga di tingkat petani tidak ikut meningkat, padahal menurut hukum ekonomi jika permintaan tinggi dan barang yang tersedia sedikit, maka harga akan meningkat.

Tabel 12 dan 13 memperlihatkan margin keuntungan salah satu hasil tanaman obat yaitu kapulaga. Margin keuntungan pada tanaman kapulaga ini cukup besar di tingkat petani yaitu 85,45%. Kemudian di pengumpul tingkat desa sebesar 13,64% dan pengumpul tingkat kecamatan sebesar 5,63%. Margin keuntungan yang besar tersebut bisa untuk mengimbangi margin keuntungan yang kecil dari tanaman kayu, apalagi hasil dari tanaman kapulaga bisa diperoleh dalam waktu relatif cepat (3-4 bulan sekali) dan secara terus-menerus sepanjang tahun selama belum ternaungi oleh tanaman kayu yang membesar.

Tabel 12. Analisis *Profit Margin* Pemasaran Kapulaga
Table 12. Profit Margin Analysis of Cardamon Marketing

Pelaku Pasar <i>Market Actor</i>	Distribusi Harga <i>Prices Distribution</i>	Harga <i>Prices (Rp/ kg)</i>	Prosentase <i>Percentage (%)</i>
Petani	Harga produksi	4.000,00	85,45
	Harga Jual ditingkat petani	27.500,00	
	Margin Keuntungan	23.500,00	
	% Margin Keuntungan		
Pengumpul tingkat desa	Harga beli	27.500,00	13,64
	Harga jual	33.000,00	
	Biaya pemasaran	1.000,00	
	Margin Keuntungan	4.500,00	
	% Margin Keuntungan		
Pengumpul tingkat kecamatan	Harga beli	33.000,00	5,63
	Harga jual	35.500,00	
	Biaya pemasaran	500,00	
	Margin Keuntungan	2.000,00	
	% Margin Keuntungan		
Industri/ konsumen akhir	Harga Beli	35.500,00	30,000,00
	Total Margin Keuntungan	30.000,00	

Sumber/*Source*: Analisis data primer/*Primary data analysis*, 2006

Tabel 13. *Marketing Margin* Pemasaran Kapulaga
 Table 13. *Marketing Margin of Cardamon Marketing*

Uraian <i>Description</i>	Status nilai <i>Value status</i>	Harga produksi <i>Price of production</i> (Rp/ kg)	Prosentase <i>Percentage (%)</i>
Petani	Harga produksi	4.000,00	11,27
Pengumpul tingkat desa	Harga beli	27.500,00	77,46
Pengumpul tingkat kecamatan	Harga beli	33.000,00	92,96
Industri/ konsumen akhir	Harga akhir	35.500,00	100,00
Marjin tata niaga		31.500,00	

Sumber/*Source*: Analisis data primer/*Primary data analysis*. 2006

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Petani hutan rakyat di Kabupaten Cilacap telah mengembangkan pola tanam wanafarma yaitu tumpangsari antara tanaman kayu dengan tanaman obat-obatan. Tanaman kayu yang banyak dikembangkan yaitu albasia, mahoni, dan jati, sedangkan tanaman obat-obatan meliputi kencur, jahe, kapulaga, kunyit, lada, dan lengkuas.
2. Kontribusi ekonomi hasil hutan rakyat wanafarma bagi pendapatan keluarga petani masih relatif kecil yaitu sebesar 4,69% dari hasil tanaman kayu dan 12,06% dari hasil tanaman obat-obatan.
3. Alur pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma cukup sederhana. Petani berperan sebagai produsen yang menjual hasil hutan rakyat ke pihak kedua seperti pengepul tingkat I, pengepul tingkat II, dan penggergajian untuk hasil kayu maupun pengepul tingkat desa untuk tanaman obat. Alur pemasaran hasil kayu dari tingkat desa berbeda dengan alur pemasaran hasil tanaman obat, karena segmentasi pasar kedua jenis hasil hutan ini juga berbeda. Pemasaran tanaman kayu dan obat-obatan sudah menjangkau pasar di luar Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan peluang pasar yang cukup terbuka bagi kedua produk tersebut, sehingga permintaannya cenderung meningkat.

B. Saran

Peluang pasar hasil hutan rakyat wanafarma di Kabupaten Cilacap masih cukup terbuka. Pengelolaan hutan rakyat dengan pola ini perlu ditingkatkan dengan melakukan pengembangan pada beberapa lahan yang masih kosong, apalagi seringkali terjadi kekosongan bahan baku industri karena kurangnya pasokan terhadap hasil hutan rakyat ini baik berupa hasil kayu maupun tanaman obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wahyu. 2005. Ekonomi Pengelolaan Hutan Rakyat: Aspek Kajian Pola Usahatani dan Pemasaran Kayu Rakyat *dalam* Kelangkaan Air: Mitos Sosial, Kiat, dan Ekonomi Rakyat. Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat *Penyunting* San Afri Awang. Debut Press. Yogyakarta.
- Anonim. 2005a. Data Hutan Rakyat sampai dengan Tahun 2005 Kabupaten Cilacap. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. Cilacap.
- Anonim. 2005b. Data Monografi Desa dan Kelurahan. Desa Sepatnunggal, Kecamatan Majenang. Cilacap.
- Anonim. 2005c. Kecamatan Majenang Dalam Angka Tahun 2004. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik. Kabupaten Cilacap.
- Anonim. 2005d. Profil Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004. Bappeda dan BPS Kabupaten Cilacap. Cilacap.
- Anonim. 2006a. Data Monografi Desa Dan Kelurahan. Desa Bener, Kecamatan Majenang. Cilacap.
- Anonim. 2006b. Laporan Aneka Tanaman (Tanaman Obat-Obatan) Kabupaten Cilacap triwulan I tahun 2006. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap. Cilacap.
- Awang, S.A., W. Andayani, B. Himmah, W.T. Widayanti, dan A. Affianto. 2002. Hutan Rakyat: Sosial Ekonomi dan Pemasaran. BPFE. Yogyakarta.
- Awang, S.A., H. Santoso, W.T. Widayanti, Y. Nugroho, Kustomo, dan Sapardiono. 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Debut Press. Yogyakarta.
- Awang, S.A., W. Andayani, B. Himmah, W.T. Widayanti, dan A. Affianto. 2002. Hutan Rakyat: Sosial Ekonomi dan Pemasaran. BPFE. Yogyakarta.
- Djajapertjunda, Sadikin. 2003. Mengembangkan Hutan Milik di Jawa. Alqaprint. Jatinangor.
- Sudiyono, Armand. 2004. Pemasaran Pertanian. UMM Press. Malang.
- Sukrianto, T., Subarudi, dan Sudarmanto. 2006. Pengelolaan *Supply-Demand* Kayu Rakyat di Kabupaten Ciamis. Makalah Utama dalam Prosiding Seminar Pekan Hutan Rakyat Nasional I “Aktualisasi Peran Litbang mendukung Hutan Rakyat Lestari”, tanggal 6 September 2006 di Ciamis, hal. 65-71. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Windawati, N. 2009. Tinjauan Tentang Pola Tanam Hutan Rakyat. Website <http://www.dishut.jabarprov.go.id/images/artikel>. Diakses tanggal 14 April 2009.

KAJIAN POTENSI, TATA NIAGA DAN KELAYAKAN USAHA BUDI DAYA TUMBUHAN LITSEA (*Study of Potencial, Distribution and Feasibility of Litsea cultivation*)

Oleh/By :

Sylviani & Elvida YS

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat

Telp. 0251 88633944; Fax. 0251 88634924

ABSTRACT

Lemo (Litsea cubeba Persoon L.) belongs to the category of non-wood forest products (NFFP). Most of the components of lemo tree (flowers, fruits, leaves, and bark) can be used as essential oil. However information duits potential and distribution in natural stands, trade is not available. Furthermore forest community haven't yet cultivate this plant.

The objective of this research was to assess the distribution and potential of Lemo tree, utilization of Lemo's bark, trade distribution, and the feasibility of Lemo cultivation. The research was conducted around the protected forest areas of Perum Perhutani Unit III West Java and conservation forest areas in Central Java. Meanwhile, research carried out by finding use of data and information on some herbal medicine industry in Central Java and the traders. Research method used was the marketing margin analysis and feasibility analysis Lemo cultivation.

The results showed that the potential and distribution were sporadic and limited in natural forests. In West Java (Perum Perhutani), its natural breeding assisted by wind and eating seeds-animals. Its plant utilization is widely used by the herbal medicine industry as a medicinal ingredient of fragrances, Its bark obtained from the traders. There are 3 types of distribution line of the bark which by industries actors involved: forest community that collect Lemo's bark; traders; household industries (godokan herbs), and herbal medicine industries. Based on the marketing margin analysis that the actors who earns the biggest value of Rp 6000/ kg traders I.

The results of cultivation feasibility analysis shows that the estimated revenue can be obtained from each ha of crops at harvest Lemo to 8 years is Rp 41,402,500 which consists of the value of bark Rp 14,577,500, firewood value Rp 20,825,000 and the value of leaves Rp 6.000.000. With interest rates 10% and 12%, NPV indicates a positive value, BCR greater than 1 and the IRR is more than the interest rates. This results shows that the cultivation of Lemo was feasible. The existence of Lemo is going to be rare, so it is important to encourage the cultivation and development of better utilization of Lemo among bark, leaves, fruits and roots.

Keywords: *Potential, distribution, business feasibility, cultivation, Lemo*

ABSTRAK

Lemo (*Litsea cubeba Persoon L.*) termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang sudah semakin langka. Sebagian besar komponen pohon lemo (bunga, buah, daun, dan kulit kayu) dapat dimanfaatkan sebagai minyak atsiri. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum tersedianya informasi potensi dan sebaran tegakan alam lemo, tata niaga lemo dan belum ada masyarakat yang membudidayakannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji sebaran dan potensi pohon lemo, pemanfaatan kulit batang lemo, tata niaga serta kelayakan usaha budidaya pohon lemo. Penelitian sebaran dilakukan di sekitar kawasan hutan lindung Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan kawasan hutan konservasi di Jawa Tengah. Penelitian pemanfaatan dilakukan dengan mencari data dan informasi pada beberapa industri jamu di Jawa Tengah dan para pedagang pengumpul kulit lemo. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa margin pemasaran dan analisa kelayakan budidaya lemo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran lemo bersifat sporadis dan masih terbatas di hutan alam. Di Jawa Barat, pengembangan lemo di alam dibantu oleh angin dan hewan yang memakan bijinya. Pemanfaatan lemo banyak digunakan oleh industri jamu (hilir) sebagai bahan pengharum jamu yaitu kulit batang lemo yang diperoleh dari masyarakat (hulu) melalui pedagang pengumpul. Ada 3 tipe saluran tataniaga kulit lemo dengan pelaku tataniaga, antara lain masyarakat pemungut kulit lemo; pedagang pengumpul; industri rumah tangga (jamu godokan), dan industri jamu. Berdasarkan analisis margin pemasaran, diketahui bahwa pelaku tataniaga yang memperoleh bagian terbesar adalah pedagang pengumpul 1 (pertama) yaitu sebesar Rp 6.000,-/kg.

Hasil analisis kelayakan usaha budidaya menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan dari setiap ha tumbuhan lemo pada panen tahun ke 8 adalah sebesar Rp 41.402.500,- terdiri dari nilai kulit batang Rp 14.577.500,-, nilai kayu bakar Rp 20.825.000,- dan nilai daun Rp 6.000.000,-. Pada suku bunga 10 % dan 12 % nilai NPV positif, BCR lebih besar dari 1(satu) dan IRR lebih dari tingkat suku bunga. Sehingga usaha budidaya lemo layak untuk dilakukan. Lemo yang sudah langka diharapkan didorong budidaya dan pengembangan pemanfaatannya baik kulit batang, daun, buah dan akarnya.

Kata kunci: Potensi, tata niaga, kelayakan usaha, budidaya, lemo

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lemo (*Litsea cubeba* Persoon L.) termasuk ke dalam marga Lauraceae dengan nama daerah Kilemo (Jawa Barat), Kragean (Jawa Tengah) dan Antarasa (Sumatera Utara). Lemo dikenal sebagai penghasil minyak atsiri potensial, karena semua bagian pohon yaitu buah, daun, kulit kayu dan akar dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku minyak atsiri beraroma harum seperti aroma jeruk. Minyak atsiri dari jenis ini banyak dibutuhkan untuk keperluan industri, seperti bahan kosmetik (aromaterapi), sabun, minyak wangi, pembersih kulit, obat jerawat serta diyakini memiliki potensi sebagai sumber karsinostatic (zat anti kanker) tetapi masih perlu penelitian lebih lanjut.

Tumbuhan ini merupakan perdu atau pohon dengan tinggi antara 5-15 meter dan diameter batang sekitar 6 - 20 cm. Di Sumatera Utara tinggi pohon dapat mencapai \pm 30 m dengan diameter \pm 30 cm (Heryati et al, 2006). Tumbuh berkelompok di daerah pegunungan pada ketinggian 700 s/d 2300 m diatas permukaan laut (Lina, 2003 :Heyne, 1987). Lemo merupakan sumber minyak atsiri yang berpotensi dikembangkan di Indonesia yang terkenal dengan nama dagang Cubeba Oil atau Chiang Mai Oil. Tumbuhan ini bermanfaat sebagai bahan baku industri dan sebagai bahan dasar obat tradisional yang dapat dikembangkan dalam skala kecil di masyarakat. Sebagai tumbuhan yang tumbuh secara alami, merupakan tumbuhan langka, serta banyak manfaatnya, tumbuhan lemo berpotensi untuk dikembangkan di kawasan hutan di Indonesia melalui usaha budidaya. Pohon lemo sampai saat ini belum dibudidayakan karena keberadaannya hanya ditemukan di hutan alam terutama hutan lindung dan hutan konservasi di daerah pegunungan, sehingga keberadaannya sudah mulai terancam punah karena mulai diburu masyarakat dengan menebang pohon dan mengulitinya.

Melalui usaha budidaya diharapkan dapat dilakukan pengembangan usaha pengolahan lemo menjadi minyak atsiri. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa jenis langka ini hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat terutama di Jawa Barat, terutama bagian kulit batangnya yang sudah dikeringkan sebagai aroma/pengharum jamu tradisional. Rendahnya potensi tegakan alam lemo, menunjukkan bahwa permintaan kulit lemo cukup

tinggi, artinya peluang pasar yang positif dapat ditingkatkan melalui informasi rantai tata niaga yang jelas, agar pemanfaatan tegakan lemo oleh masyarakat dapat terkendali. Minyak atsiri dari pohon lemo di Indonesia terutama berasal dari daunnya namun baru pada tahap penelitian dengan skala laboratorium meskipun hasil penelitiannya juga belum banyak disebarluaskan. Dengan demikian untuk pengembangan pemanfaatan lemo sebagai minyak atsiri, perlu dilakukan melalui budidaya mengingat saat ini China dapat menjadi negara penghasil minyak lemo terbesar dengan produksi sekitar 500 - 600 ton pertahun.

Kajian potensi dan sebaran lemo dilakukan untuk mengetahui indikasi kecocokan lahan, kelayakan usaha budidaya serta tata niaga kulit batang lemo. Diharapkan pengusahaan lemo di masa yang akan datang dapat menghasilkan devisa dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan.

B. Rumusan Masalah

Secara umum terjadinya penurunan keberadaan tegakan lemo di alam menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan dari tumbuhan tersebut masih terus dibutuhkan oleh pengguna. Oleh karena sifat sebaran dari alam jenis ini terjadi secara sporadis, maka masyarakat pengumpul kulit kayu lemo akan mencari pohon-pohon berdiameter besar terlebih dahulu, akibatnya kondisi tegakan lemo yang tersisa saat ini hanya pohon-pohon berdiameter 6 - 10 cm. Dengan demikian kuantitas pasokan kian menurun.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua organ tumbuhan lemo berbau harum yang menyengat, diduga di setiap organ terkandung substansi kimia yang mengandung minyak dan berbau aktif. Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi minyak atsiri agar dapat memenuhi permintaan bahan baku berbagai jenis industri, maka diperlukan penelitian yang mengarah pada pengelolaan hutan alam yang tepat dan pengembangan luasan ekonomis hutan tumbuhan lemo.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha budidaya lemo adalah belum tersedianya informasi potensi dan sebaran tegakan alam lemo, informasi industri yang mengolah minyak atsiri lemo dan perdagangan kulit pohon lemo.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi potensi dan sebaran lemo di alam
2. Mengkaji tata niaga lemo
3. Mengkaji kelayakan usaha budidaya lemo

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan pasar internasional akan minyak atsiri lemo sekitar 500 ton per tahun. Importir minyak lemo adalah USA, Jepang dan negara-negara di Eropa Barat. Di China dan Vietnam, lemo sudah menjadi komoditas perdagangan penting dan dibudidayakan secara besar-besaran. Mutu minyak atsiri biasanya ditetapkan berdasarkan bentuk dan sifat fisikokimia dan organoleptik dengan parameter bobot jenis, indeks bias, putaran optik, kelarutan dalam alkohol, bilangan asam, dan bilangan ester (.....).

Di China penyulingan dalam skala besar telah dilakukan dari buah lemo untuk bahan baku aromaterapi dalam industri sabun, minyak pijat, minyak SPA, pewangi ruangan dan lain-lain yang dikenal dengan nama May Chang. Minyak *Litsea cubeba* asal Indonesia rata-rata mengandung: Sineol 30%, Sitronellal 0,94%, Linalol 8,95% dan Citral 16,02%. Penyulingan kulit lemo segar kering angin 2 kg menghasilkan 25 cc minyak atsiri, dengan kandungan citronellal dan citral 75%. Penyulingan 100 gram buah lemo menghasilkan 3,9 cc minyak atsiri dengan kandungan citral 64% (.....).

Kilemo merupakan sumber citral yang berkualitas dan merupakan pesaing utama minyak lemon grass. Minyak atsiri dari lemo diperoleh melalui penyulingan dengan cara rebus, kukus dan cara uap langsung (*steam*). Hasil penelitian Zulnelly (2003) menunjukkan bahwa daun dan kulit batang pohon lemo yang berasal dari Gunung Ceremai, Kuningan, Jawa Barat menghasilkan minyak atsiri dengan rendemen minyak 4,5% (daun) dan 1,2% (kulit batang), sementara teknik penyulingan dengan metode kukus menghasilkan rendemen (5,4%) lebih baik daripada metode rebus (4,6%). Kandungan minyak atsiri dari daun berbeda dari kulit batang. Daun menghasilkan minyak yang mengandung sineol (56,61%), sitronellol (12,26%), alfa oinen (5,09%) dan beta pinen (5,29%), sedangkan minyak dari kulit batang mengandung sineol (13,29%), sitronellal (24,4%) dan limonena (19,34%).

Pengamatan terhadap tempat tumbuh lemo di Sumatera Utara memberikan informasi bahwa tegakan lemo alam berada pada kondisi suhu berkisar antara 22 - 42 °C; kelembaban udara relatif, maksimum antara 35-86% dan minimum antara 27-77%; intensitas cahaya maksimum antara 183-101.900 lux dan minimum 014-33.800 lux; koordinat lokasi pengamatan berada pada posisi 01,93883 -01,93998 LU dan 099,02673 - 099,02965 BT, dan 02,31698 - 02,57867 LU dan 099,05898-099,28003 BT (Ali, 2008). Sementara pengamatan keberadaan tegakan alam lemo di Kawah Putih, Ciwidey, Jawa Barat berada pada titik kordinat 07°09.613S; 107°24.411T, jumlah pohon lemo tingkat pohon sebanyak 6 pohon, tingkat tiang 88 pohon, tingkat semai 54 anakan (Heryati *et al.*, 2006).

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dan informasi lapangan dilakukan di hutan alam, hutan lindung dan hutan rakyat di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penentuan lokasi dengan pertimbangan bahwa di kawasan tersebut terdapat sebaran lemo yang merupakan jenis langka. Di Jawa Barat lemo yang penyebarannya secara sporadis melalui biji yang diterbangkan oleh burung terdapat di dalam kawasan RPH Patuha BKPH Ciwidey dan RPH Way Windu BKPH Pangalengan KPH Bandung Selatan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Di Jawa Tengah penelitian dilakukan di Kabupaten Brebes, Pemalang dan Banjarnegara yang mengkatagorikan lemo sebagai salah satu jenis flora dengan nama pohon Wuruk (*Litsea Sp*).

B. Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari beberapa grosir obat-obatan tradisional, para pedagang pengumpul kulit lemo di Jawa Tengah dan beberapa responden perusahaan jamu serta petugas RPH Patuha BKPH Ciwidey KPH Bandung Selatan.

Data sekunder tentang sebaran dan pemanfaatan tumbuhan lemo diperoleh melalui studi literatur dan dari beberapa instansi antara lain :

1. Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten
2. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Unit III Jawa Barat
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Semarang
4. Balai Pengawasan Tumbuhan Obat dan Makanan
5. Taman Nasional Gunung Halimun Salak
6. Perusahaan jamu di Jawa Tengah

C. Metode Analisis Data

C.1. Analisis Margin Pemasaran Kulit Lemo

Analisis margin pemasaran bertujuan mengetahui distribusi biaya dari setiap aktivitas pemasaran dan keuntungan dari setiap lembaga perantara serta proporsi harga yang diterima petani. Secara matematis margin pemasaran dihitung dengan formula sebagai berikut (Tomeck and Robinson, 1990; Sudyono, 2001) :

$$MP = Pr - Pf \quad \text{atau} \quad MP = \sum Bi + \sum Ki$$

Keterangan MP : Margin pemasaran

Pr : Harga tingkat konsumen (user)

Pf : Harga tingkat produsen

$\sum Bi$: Jumlah biaya yang dikeluarkan lembaga lembaga pemasaran (B1, B2, B3....Bn)

$\sum Ki$: Jumlah keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga pemasaran (K1, K2, K3...Kn)

C.2. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Lemo

Data yang terkumpul ditabulasi untuk memperoleh gambaran manfaat dan biaya dari pemanfaata lemo. Analisa kelayakan finansial menggunakan metode *Discounted Cash Flow* untuk menghitung tiga kriteria investasi, yaitu NPV, BCR dan IRR.

a. Net Present Value (NPV)

NPV atau nilai sekarang bersih adalah jumlah nilai sekarang dari manfaat bersih, yang dirumuskan (Gittinger, 1982). Nilai adalah nilai bersih yang diperoleh dalam waktu sekarang. NPV diperoleh dengan mendiskonto semua biaya dan pendapatan pada *discount rate* tertentu dan kemudian hasil diskonto pendapatan akan dikurangi hasil diskonto biaya. Secara kuantitatif nilai NPV dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

Keterangan :

B : Manfaat per tahun

C : Biaya

i : *Discount rate* per tahun

t : Jangka waktu umur proyek (1,2,...n)

Keputusan :

Jika NPV > 0 layak untuk dibudidayakan

Jika NPV < 0 tidak layak untuk dibudidayakan

b. *Benefit-Cost Ratio (BCR)*

BCR adalah rasio jumlah nilai sekarang dari manfaat dan biaya. Dengan rumus (Gittinger, 1982) sebagai berikut :

$$BCR = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}$$

Keterangan :

- B : Manfaat tahun ke-t
- C : Biaya tahun ke-t
- i : *Discount rate* per tahun
- t : Jangka waktu umur proyek

Keputusan :

- Jika $BCR > 1$ layak
- Jika $BCR < 1$ tidak layak

c. *Internal Rate of Return (IRR)*

IRR adalah tingkat suku bunga yang menyebabkan proyek mampu mengembalikan investasi yang telah ditanamkan selama umur proyek. Dengan kata lain bahwa IRR adalah tingkat suku bunga yang menyebabkan NPV sama dengan nol yaitu jumlah hasil diskonto pendapatan sama dengan jumlah hasil diskonto biaya. Apabila $IRR > i$ maka perusahaan budidaya lemo layak untuk dilaksanakan, sebaliknya tidak layak pada tingkat $IRR < i$. Adapun nilai IRR (Gittinger, 1982) dirumuskan sebagai berikut :

$$IRR = D_{FP} \frac{PVP}{PVP - PVN} \times (D_{FN} - D_{FP})$$

- IRR : Internal Rate of Return
- PVP : Present Value Positif
- PVN : Present Value Negative
- D_{FP} : Discount faktor untuk NPV positif
- D_{FN} : Discount faktor untuk NPV negatif

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Penelitian tentang lemo ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut;

1. Identifikasi sebaran dan potensi lemo
2. Identifikasi pemanfaatan kulit batang dari lemo
3. Identifikasi para pelaku pasar kulit batang lemo
4. Distribusi tata niaga dan harga kulit batang lemo dari hulu ke hilir

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi dan Sebaran Tumbuhan Lemo

Pohon lemo (*Litsea cubeba* Persoon L.) memiliki sebaran alami dari Asia Timur sampai Cina pada ketinggian 500-3200 m dpl (www.pfaf.org, 2006), sedangkan menurut PROSEA (1999), *Litsea cubeba* tumbuh secara liar dari Himalaya Timur sampai Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, (Jawa, Kalimantan, Sumatra), Cina bagian selatan (sampai sungai Yangtze) dan Taiwan. Di Indonesia lemo terdapat di wilayah Jawa pada ketinggian 700-2300 m dpl (Heyne, 1987) dan Kalimantan Timur pada ketinggian 400-600 m dpl (PROSEA, 1999 dalam Budiman 2008).



Gambar 1. Tegakan Lemo di KPH Bandung Selatan
Figur 1. *Lemo* standings in South Bandung KPH

Data dan informasi dari BKSDA wilayah Semarang menunjukkan bahwa hasil identifikasi untuk jenis *Litsea* spp. di Jawa Tengah dikategorikan sebagai jenis flora langka, sebarannya tidak banyak dan berada di kawasan konservasi antara lain :

- a) Cagar Alam (CA) Pringombo dengan luas 58 ha. Pohon Kilemo atau Wuru (*Litsea Sp*) merupakan salah satu jenis flora dengan status tidak dilindungi dengan sebaran sebesar 16% dari 8 jenis flora yang ada.
- b) Cagar Alam (CA) Pandansari dengan luas 48,5 ha dengan sebaran sebesar 8,03% dari 62 jenis flora yang ada.
- c) Kawasan Cagar Alam (CA) Moga dengan luas 3,5 ha.

Data dan informasi BKSDA di propinsi Jawa Barat, Kilemo/Huru terdapat di kawasan konservasi/Taman Nasional/Wilayah KPH Perhutani, yaitu antara lain :

- a). Kawasan Konservasi Cagar Alam (CA) Takokak
Kawasan CA ini didominasi oleh jenis rasamala (*Altingia excelsa*), saninten (*Castanopsis javanica*), pupsa (*Schima wallichii*), Huru (*Litsea Sp*), rotan sega (*Calamus caesius*).

- b). Kawasan Konservasi Cagar Alam (CA) Bojong Larang Jayanti
Kawasan ini termasuk tipe hutan dataran rendah dengan jenis vegetasi antara lain kiara (*Ficus globosa*), lavan (*Vitex pubescens*), sempur (*Dillenia excelsa*), huru (*Litsea* Sp) dan ketapang (*Terminalia catappa*).
- c). Kawasan Konservasi Cagar Alam dan TWA Telaga Patenggang
Jenis vegetasi yang dominan antara lain adalah kijiur (*Castanopsis javanica*), puspa (*Schima walichii*), pasang (*Quercus sp*), baros (*Garnicia balica*), kiamba (*Eugenia cupresa*), Saninten (*Castanopsis javanica*) dan Huru (*Litsea sp*).
- d). Kawasan Konservasi Cagar Alam (CA) Panjalu
Tumbuhan dominan diantaranya Kihaji (*Dysoxylum sp.*), Kileho (*Saurauia blumiana*), Kondang (*Ficus variegata*), Kiara (*Ficus sp.*), Bungur (*Lagerstroemia speciosa*) dan Huru (*Litsea sp.*), sedangkan jenis tumbuhan bawah diantaranya Rotan (*Calamus sp.*), Tepus (*Amomum coccineum*) dan Langkap (*Arenga sp.*).
- e). Kawasan Konservasi Cagar Alam (CA) dan Taman Wisata Alam Telaga Bodas
Vegetasi yang terdapat di kawasan ini diantaranya puspa (*Schima walichii*), saninten (*Castanopsis argentea*), pasang (*Quercus platycarpa*), suagi (*Vaccinium varingifolium*), Huru (*litsea sp*) dan Manglid (*Magnolia sp.*).
- f). Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Dalam kawasan konservasi ini terdapat beberapa flora unik yang dilindungi termasuk *Litsea cubeba* pada ketinggian 1360 mdpl (pada jalur Pasir reungit).
- g). RPH Patuha
Tumbuhan Lemo juga ditemukan dalam kawasan Perhutani yaitu KPH Bandung Selatan, BKPH Ciwidey dan RPH Patuha. Tumbuhan ini tumbuh menyebar di kawasan hutan lindung pada petak 8a (423.8 ha), mulai tingkat semai, pancang, tiang dan pohon dengan tinggi 5 - 10 meter. Penyebaran bijinya yang dibantu oleh burung dan angin , sehingga anakan tumbuhan Lemo tumbuh di sekitar pohon induk jenis yang lain seperti terlihat pada Gambar 2.



A

B

Gambar 2. Tumbuhan Lemo di RPH Patuha, A = anakan; B = tajuk
Figure 2. *Lemo* standings in RPH of Patuha, A = seedlings; B = canopy

h). RPH Wy Windu

Tumbuhan Lemo juga ditemukan dalam kawasan Perhutani yaitu KPH Bandung Selatan, BKPH Pengalengan dan RPH Wy Windu. Tumbuhan ini tumbuh menyebar di kawasan hutan lindung pada petak 71b (474,37ha),

A. Pemanfaatan Tumbuhan Lemo

Lemo atau kilemo (*Litsea cubeba* Persoon L.) termasuk ke dalam marga Lauraceae dengan nama daerah Kilemo (Jawa Barat), Kragean (Jawa Tengah) dan Antarasa (Sumatera Utara) dan merupakan jenis pohon penghasil minyak atsiri potensial, karena semua bagian pohon yaitu buah, kayu, kulit kayu dan akar dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku minyak atsiri berbau harum sekali seperti baunya tumbuhan jeruk. Minyak atsiri dari jenis ini banyak dibutuhkan untuk keperluan industri, seperti bahan kosmetik (aromaterapi), sabun, minyak wangi, pembersih kulit, obat jerawat . Berdasarkan data dan informasi dari BPOM Jawa Tengah bahwa tumbuhan jenis *litsea* ini pernah digunakan untuk beberapa produk antara lain Parem-pareman untuk wanita yang habis bersalin. Beberapa jenis produk jamu yang dihasilkan oleh Akar Sari yang menggunakan bahan baku *litsea* antara lain produk jamu sehat wanita dan parem-pareman.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi di lapangan menunjukkan di wilayah Jawa Barat ada kepercayaan bahwa bagian ranting atau cabang kecil dari pohon kilemo dapat digunakan oleh sebagian masyarakat yang berfungsi sebagai tongkat untuk mencegah dari gangguan binatang buas seperti ular atau kalajengking. Aroma yang dikeluarkan dari kayu kilemo ini dapat membuat binatang tersebut menjauh. Sedangkan pabrik atau industri pengolahan minyak atsiri dari tumbuhan lemo hingga saat ini belum ada, pengolahan yang sudah dilakukan hanya skala laboratorium oleh lembaga-lembaga riset yang terkait namun hasil penelitian kurang disosialisasikan. Dengan demikian kajian kelayakan usaha industri minyak atsiri dari tumbuhan lemo belum dapat dilakukan karena potensi sebaran tumbuhan lemo yang merupakan sumber bahan baku pembuatan minyak atsiri belum teridentifikasi secara keseluruhan. Di Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS) pemanfaatan tumbuhan menunjukkan adanya saling keterkaitan yang erat antara masyarakat dan lingkungan. Tumbuhan ini disamping mempunyai nilai ekonomi, juga bermanfaat bagi masyarakat untuk mengobati penyakit dan mempunyai nilai-nilai kultural.

B. Tata Niaga Tumbuhan Lemo

Banyak saluran distribusi yang digunakan petani dan lembaga pemasaran dalam tataniaga tumbuhan Kilemo (kulit). Distribusi kulit batang kilemo dari hulu/masyarakat hingga ke hilir/konsumen akhir ada yang dilakukan langsung/pendek hanya melalui satu pedagang pengumpul, tapi ada pemasaran kulit kilemo melalui beberapa pedagang pengumpul/panjang. Perbedaan saluran pemasaran ini akan mempengaruhi tingkat harga, bagian keuntungan dan biaya serta margin pemasaran yang diterima setiap pelaku pemasaran kilemo. Para pelaku tataniaga kulit batang tumbuhan Kilemo antara lain :

C1. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang tinggal sekitar hutan untuk mengumpulkan/memungut tumbuhan Kilemo. Namun mereka awam terhadap manfaat dan kegunaan tumbuhan ini dan belum membudidayakannya, karena belum memiliki teknologi

budidaya tumbuhan kilemo. Saat ini pedagang pengumpul/supplier mendapatkan kulit batang Lemo dari daerah Jawa Barat dan sekitarnya (Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi).



Gambar 3. Batang pohon lemo dengan diameter 20 cm

Figure 3. Lemo's bark with diameter 20 cm

C2. Pedagang Pengumpul 1

Pedagang pengumpul 1 adalah pedagang yang langsung membeli kulit batang Kilemo dari masyarakat, yang selanjutnya menjual langsung ke konsumen atau dapat juga menjual ke pedagang pengumpul lainnya (ke2). Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pengumpul bahwa kulit batang kilemo didapat masyarakat dari Kabupaten Bogor di kawasan hutan lindung wilayah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat yang sebarannya sudah langka.

C3. Pedagang pengumpul 2

Pedagang pengumpul 2 adalah pedagang pemasok yang biasanya memperoleh kulit batang kilemo dari pedagang pengumpul 1 dan menjual ke pedagang pengumpul 3 atau langsung ke industri jamu. Biasanya pedagang pengumpul 2 ini telah memiliki kontrak kerja dengan industri jamu, sesuai permintaan industri berdasarkan kualitas dan kuantitas tertentu. Pedagang pengumpul 2 ini ada yang berdomisili di daerah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Solo Jawa Tengah.

C4. Pedagang pengumpul 3

Pedagang pengumpul 3 adalah pedagang pemasok yang biasanya memperoleh kulit batang kilemo dari pedagang pengumpul 2 dan menjual ke industri rumah tangga atau penjual jamu godokan atau langsung ke industri jamu. Salah satu pedagang pengumpul 3 terdapat di Kopen, Pasar Gede, Solo Propinsi Jateng.

C5. Produsen/Industri Jamu

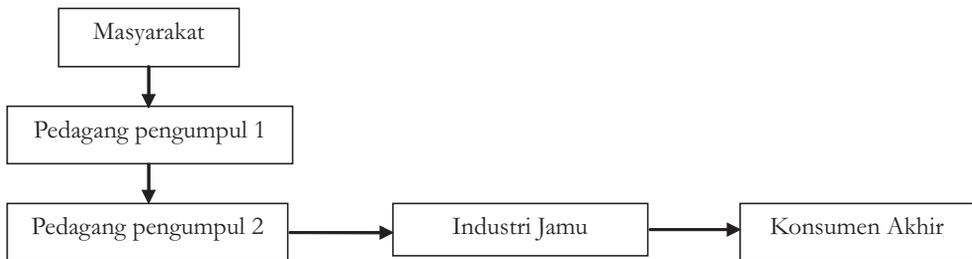
Industri jamu yang menggunakan kulit batang kilemo antara lain PT Sido Muncul di Semarang, PT Air Mancur dan PT Akar Sari di Solo. Kulit batang kilemo ini digunakan hanya

sebagai salah satu komposisi bahan baku produk-produk tertentu seperti jamu sehat wanita dan pria dan minuman sehat yang berfungsi untuk menambah aroma produk tersebut. Industri jamu biasanya memperoleh bahan baku dari pemasok/supplier.

Beberapa jenis produk yang pernah digunakan PT Sido Muncul dengan bahan campuran *litsea* seperti : galian parem dan jamu bersalin, PT Akar Sari menghasilkan produk Sri Dara Asli dan Param Beranak. Sementara itu, PT Jamu Simona Indonesia menggunakan Lemo untuk campuran produk-produk obat herbal seperti : sinamon Green 2, sinamon Green 3 dan Sinamon Rose 2 yang berkhasiat untuk kesehatan wanita.

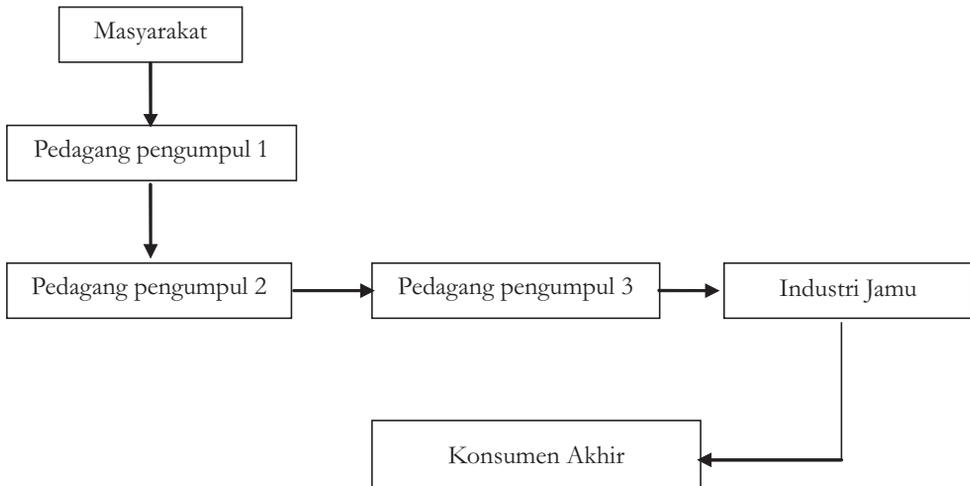
Ada 3 jenis saluran distribusi kulit batang Kilemo di propinsi Jawa Tengah :

1. Masyarakat ----- pedagang pengumpul 1----- pedagang pengumpul 2 -----industri jamu-konsumen akhir.



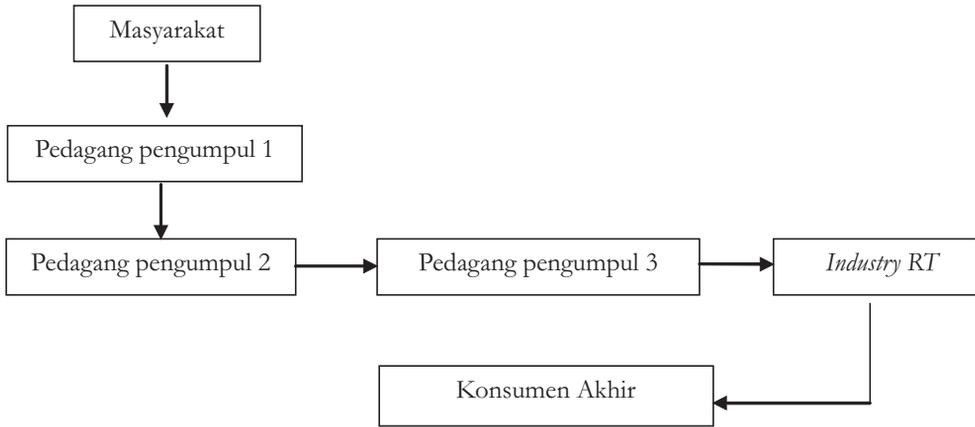
Gambar 4. Saluran Tata Niaga Kulit batang Lemo (Tipe 1)
 Figure 4 Marketing distribution line of Lemo's bark (Type 1)

2. Masyarakat ----- pedagang pengumpul 1----- pedagang pengumpul 2 -----pedagang pengumpul 3 ----- industri jamu ----- konsumen akhir.



Gambar 5. Saluran Tata Niaga Kulit batang Lemo (Tipe 2)
 Figure 5. Marketing distribution line of Lemo's bark (Type 2)

3. Masyarakat ---- pedagang pengumpul 1----- pedagang pengumpul 2 ----- pedagang pengumpul 3----- industri rumah tangga ----- konsumen akhir.



Gambar 6. Saluran Tata Niaga Kulit batang Lemo (Type 3)

Figure 6. Marketing distribution line of Lemo's bark (Type 3)

D. Margin Pemasaran

Analisa margin pemasaran dapat digunakan untuk mengetahui distribusi margin pemasaran yang terdiri dari biaya dan keuntungan dari setiap aktivitas lembaga pemasaran yang berperan aktif, serta untuk mengetahui bagian harga yang diterima setiap pelaku pemasaran (Tomeck, 1990; Sudiyono, 2001).

Tujuan analisis margin pemasaran adalah untuk melihat efisiensi pemasaran yang diindikasikan oleh besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pelaku pemasaran. Semakin tinggi proporsi harga yang diterima produsen, semakin efisien sistem pemasaran tersebut. Besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pelaku pemasaran relatif terhadap harga yang dibayar konsumen dan atau relatif terhadap biaya pemasaran terkait dengan peran yang dilakukan oleh masing masing pelaku. Rincian identifikasi biaya (harga jual) Kulit batang Lemo di tingkat lembaga pemasaran atau para pelaku pemasaran dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Harga jual kulit lemo kering di setiap tingkat pelaku pemasaran

Table 1. Price of dry lemo on every marketing actor's level

No	Masyarakat	Pedagang pengumpul 1	Pedagang pengumpul 2	Pedagang pengumpul 3	Industry Rumah Tangga
1	3000	9000	10000	11000	12000
2	4000	10000	11000	12000	13000
Rata2	3500	9500	10500	11500	12500

Sumber : Analisis data primer

Source; Primer data Analysis

Dari rata-rata harga jual pada 5 pelaku pemasaran terlihat bahwa distribusi harga jual pada masing-masing tingkat pelaku pemasaran berbeda yaitu mulai Rp 3500 pada tingkat masyarakat sampai Rp 12500 pada tingkat industri. Selanjutnya dengan mengetahui harga jual dan harga beli pada masing-masing pelaku pemasaran maka dapat diketahui besarnya margin pada masing-masing pelaku pemasaran. Secara rinci margin pemasaran dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Margin Pemasaran Kulit Kayu Lemo

Table 2. *Marketing margin of Lemo's bark*

No.	Pelaku Pasar	Distribusi harga pada sistem tata niaga (Rp/kg)
1	Masyarakat	Biaya produksi : Harga jual : 3.500 (kering) Margin pemasaran :
2	Pedagang pengumpul 1	Harga beli : 3.500 Harga jual : 9.500 Margin pemasaran : 6 000
3	Pedagang pengumpul 2	Harga beli : 9.500 Harga jual : 10.500 Margin pemasaran : 1.000
4	Pedagang pengumpul 3	Harga beli : 10.500 Harga jual : 11.500 Margin pemasaran : 1.000
5	<i>Home industry</i>	Harga beli : 11.500 Harga jual : 12.500 Margin pemasaran : 1.000

Sumber : Data primer

Source; *Primer data*

Pada tabel diatas terlihat bahwa margin pemasaran yang paling besar diterima oleh pedagang pengumpul 1 yaitu sebesar Rp 6.000,-/kg kulit lemo kering. Sedangkan margin keuntungan masing-masing pelaku pemasaran belum dapat dilakukan karena kesulitan untuk mendapatkan data biaya produksi atau biaya transportasi pada masing-masing pedagang pengumpul.

B. Kelayakan Budi Daya Tumbuhan Lemo

Tumbuhan Kilemo tumbuh di hutan alam dimana pengembangbiakannya melalui anakan yang berasal dari biji yang diterbangkan lewat angin atau burung. Hingga saat ini, budidaya tumbuhan lemo belum dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan karena persentase tumbuh tumbuhan lemo relatif kecil apabila disemai dari bijinya, sehingga sulit untuk menganalisis kelayakan usaha budidaya tumbuhan lemo. Pohon lemo rata-rata memiliki daur 8 tahun, dimana pada daur tersebut sudah dapat diambil kulit batangnya untuk obat tradisional. Sedangkan untuk daun diduga sama dengan pohon kayu putih dimana pada usia 5 tahun sudah dapat dipanen. Rata-rata setiap pohon lemo dapat menghasilkan 15 kg kulit lemo

(basah). dan daun dapat dipanen sebanyak 1 ton/ha. Namun apabila diasumsikan tumbuhan lemo ditanam tanpa campuran (murni) seperti yang dilakukan oleh Puslitbang Hutan Tumbuhan Badan Litbang Kehutanan di Kabupaten Cikole Kabupaten Bandung Utara , dengan jarak tanam 3 x 4 dalam 1 ha, maka jumlah pohon yang ada kurang lebih 833 pohon. Biaya budidaya tumbuhan lemo yang dilakukan melalui persemaian pada lahan seluas 1ha terdiri dari biaya penyiapan lahan, kebutuhan bibit, persemaian dan saprodi pada tahun pertama sebesar Rp 7.300.000. Biaya tahun ke 2 s/d tahun ke 7 yang terdiri dari biaya pemeliharaan dan biaya pemungutan daun sebesar Rp 13.700.000,-

Pada tahun ke 8 dapat dilakukan penebangan terhadap pohon lemo, dimana setiap pohon lemo akan menghasilkan rata-rata 15 kg kulit batang lemo basah, atau setara dengan 3 kg kulit batang yang kering. Sementara harga rata-rata kulit batang lemo kering Rp 3.500,-/kg. Dalam 1 ha tumbuhan lemo akan menghasilkan kulit batang lemo kering sebesar 3 kg x 833 pohon x Rp 3.500 adalah Rp 14.577.500. Sedangkan batangnya hanya dapat dimanfaatkan untuk kayu bakar, dimana apabila diasumsikan bahwa setiap pohon lemo yang kulitnya sudah diambil nilai kayu bakarnya rata-rata Rp 25.000/pohon, maka pendapatan dari kayu bakar adalah 833 X Rp 25.000 sebesar Rp 20.825.000. Pendapatan dari pemungutan daun sebesar Rp 6.000.000,-. Sehingga total pendapatan yang dapat diperoleh dari nilai kulit batang, kayu bakar dan daun adalah sebesar Rp 41.402.500,- (Tabel 4).

Tabel 3. Komponen Biaya Budidaya Lemo

Table 3. Cost component of cultivation Lemo

No	Komponen kegiatan	Biaya (Rp/ha/tahun)	Keterangan
1	Tahun 1		
	Kebutuhan bibit	1.500.000	@Rp1.500/bibit
	Persiapan lahan	1.200.000	
	Buat bedeng persemaian	1.200.000	
	Pemeliharaan (3x)	1.200.000	
	Biaya pembabadian 2x	700.000	@350.000
	Pupuk NPK	1.400.000	1 phn membutuhkan 100gr NPK
	Saprodi (Gолоk,arit)	100.000	
2	Tahun 2		
	Pendangiran	1.200.000	
	Biaya pembabadian 2x	700.000	@350.000
	Pupuk NPK	1.400.000	1 phn membutuhkan 100gr NPK
3	Tahun 3		
	Pendangiran	1.200.000	
	Biaya pembabadian 2x	700.000	@350.000
	Pupuk NPK	1.400.000	1 phn membutuhkan 100gr NPK
4	Tahun 4		
	Biaya pembabadian 2x	700.000	@350.000

No	Komponen kegiatan	Biaya (Rp/ha/tahun)	Keterangan
5	Tahun 5		
	Biaya pembabadian 2x	700.000	@350.000
	Biaya pemungutan daun	50.000	
6	Tahun 6		
	Biaya pembabadian 2x	700.000	@350.000
	Biaya pemungutan daun	50.000	
7	Tahun 7		
	Biaya pembabadian 2x	700.000	@350.000
	Biaya pemungutan daun	50.000	
8	Tahun 8 (Panen)		
	Biaya P emungutan kulit dan kayu bakar	4.000.000	
	Biaya pemungutan daun	50.000	
	Total biaya	21.000.000	

Sumber : data primer

Source. Primer data

Apabila minyak atsiri yang disuling dari daun pohon lemo dapat diketahui nilainya, maka pendapatan dari pemanfaatan pohon lemo akan lebih besar, namun dalam kajian ini nilai daun lemo belum dapat dihitung.

Tabel 4. Komponen Pendapatan budidaya lemo

Table 4. Revenue component of Lemo cultivation

No	Komponen kegiatan	Pendapatan (Rp/ha)
	Tahun 8	
1	Panen kulit lemo	14.577.500
2	Kayu bakar	20.825.000
3	Daun	6.000.000
	Total	41.402.500

Sumber : data primer

Source. Primer data

Untuk mengetahui kelayakan suatu usaha perlu diketahui analisa finansial dengan menggunakan beberapa kreteria NPV, BCR dan IRR dengan beberapa asumsi antara lain besarnya tingkat suku bunga. Apabila diassumsikan tingkat suku bunga sebesar 10%, daur 8 tahun maka NPV budidaya tumbuhan lemo sebesar Rp 4.278.764,- dan nilai BCR 1,89 dan IRR 15% (lampiran 1). Dengan mengetahui nilai-nilai kreteria tersebut menunjukkan bahwa budidaya usaha tumbuhan lemo layak dilakukan. Selanjutnya apabila tingkat suku bunga dinaikkan menjadi 12% hasil perhitungan menunjukkan nilai-nilai yang masih layak untuk dilakukan usaha budidaya dimana nilai NPV sebesar Rp 2.471.045 ; BCR 1,17 dan IRR 15%. (lampiran 2) Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha budidaya tumbuhan lemo layak untuk dikembangkan, walaupun belum memasukkan pemanfaatan akar dan buah untuk minyak atsiri.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Tumbuhan kilemo (*litsea cubeba*) merupakan tumbuhan langka yang tumbuh di hutan alam dengan ketinggian 700 s/d 2300 m dari permukaan laut. Sebaran tumbuhan ini sudah semakin berkurang karena dalam pemanfaatan kulit batang lemo pohon harus ditebang.
2. Potensi tumbuhan lemo yang masih ada melalui sebaran secara sporadis oleh angin dan burung adalah di kawasan hutan lindung Perum Perhutani Unit III Jawa Barat seperti di KPH Bandung Selatan. Sementara itu di Jawa Tengah potensinya sudah berkurang bahkan langka sehingga masyarakat yang memanfaatkan kulit batang lemo mencari ke wilayah lain yaitu Jawa Barat.
3. Pemanfaatan tumbuhan lemo yang banyak digunakan oleh industri jamu (hilir) sebagai bahan pengharum jamu adalah kulit batang lemo yang diperoleh dari masyarakat (hulu) melalui pedagang pengumpul.
4. Pedagang pengumpul yang masih melakukan aktifitas pemasarannya berasal dari Jawa Tengah antara lain dari Wonogiri dan Solo. Berdasarkan informasi dari pedagang pengumpul mengatakan bahwa kulit batang lemo diperoleh dari masyarakat di wilayah Jawa Barat di sekitar kawasan hutan lindung KPH Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.
5. Setiap pohon lemo dapat menghasilkan \pm 15 kg kulit basah atau 3 kg kulit kering dengan harga di tingkat masyarakat rata-rata Rp 3500 dan sampai ke konsumen bisa mencapai rata-rata Rp 12 500 melalui beberapa pedagang pengumpul. Margin pemasaan yang tertinggi berada pada tingkat pedagang pengumpul 1 yaitu sebesar Rp 6000.
6. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan yang dapat diperoleh dari setiap ha tumbuhan lemo pada saat panen tahun ke 8 adalah sebesar Rp 41.402.500 yang terdiri dari nilai kulit batang Rp 14.577.500, nilai kayu bakar Rp 20.825.000, dan nilai daun Rp 6.000.000,-
7. Analisis finansial dengan tingkat suku bunga 12% nilai NPV menunjukkan nilai yang positif dan BCR lebih besar dari 1, dan nilai IRR lebih dari suku bunga; hal ini menunjukkan bahwa budidaya usaha tumbuhan lemo layak dilaksanakan.
8. Dengan usaha budidaya tumbuhan lemo yang sudah langka ini diharapkan pengembangan pemanfaatan tumbuhan lemo dimasa yang akan datang mulai dari kulit batang, daun, buah dan akar dapat ditingkatkan. Dan penanaman dapat dilakukan di kawasan dengan tingkat ketinggian tertentu dan kesesuaian lahan.
9. Melihat prospek kegunaan dari tumbuhan lemo untuk bahan baku produk jamu di Indonesia cukup baik, diharapkan pengolahan bagian-bagian dari tumbuhan lemo dapat dilakukan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. 2008. Teknik silvikultur jenis Lemo dan peningkatan produktivitas jenis Kemenyan. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli.
- Alrasyid,H ; Sumarhani dan Yetti Haryati.2000.Percobaan Penanaman Padi Gogo Dibawah Tegakan Hutan Tumbuhan Acacia mangium di BKPH Parung Panjang, Jawa Barat.Buletin Penelitian Hutan. no.621. Hal. 27-54.

- Budiman. 2008. Mengenal Kilemo budibudiman.blogspot.com/.../mengenal-kilemo-litsea-cubeba-pers.html.
- Buku DOA . 1999. Daftar Obat Alam (Jilid I). BPOM Jawa Tengah. Semarang.
- Durahim dan Hendromono. 2001. Kemungkinan Penggunaan Limbah Organik Sabut Kelapa Sawit dan Sekam Padi Sebagai Campuran Top Soil Untuk Media Pertumbuhan Bibit Mahoni (*Swietenia macrophylla* King). Buletin Penelitian Hutan no.628.Hal.13-26.
- Gittinger, J. P. 1982. *Economic Analysis of Agricultural Projects*, Baltimore; Johns Hopkins University Press.
- Hendromono, 1994. Pengaruh Media Organik dan Tanah Mineral Terhadap Mutu Bibit *Pterygota alata* Roxb. Buletin Penelitian Hutan no.617 : 55-64.
- Herawati, T., N. Hadjib., P. Sutigno. 2005. Lemo (*Litsea cubeba* L. Persoon) sebagai jenis pohon serbaguna. Majalah Kehutanan Edisi I: 16 -20.
- Heryati, Y., R. Kurniaty dan N. Mindawati. 2006. Pertumbuhan Bibit Lemo (*Litsea cubeba* L. Persoon) asal cabutan pada beberapa media. (Belum diterbitkan).
- Heyne, K. 1997. Tumbuhan Berguna Indonesia III. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- KPH Bandung Selatan. 2009. Data sebaran tumbuhan Kilemo. Perum Perhutani Unit III. Bandung.
- Lina. 2003. *Litsea cubeba*, Litsea cubeba Oil Chapter 7. [file:///D:/LINA/e-mail/Litsea cubeba essential/Chapter 7.htm](file:///D:/LINA/e-mail/Litsea%20cubeba%20essential/Chapter%207.htm). 4/27/03.
- Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. 2008. Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Hutan tumbuhan. Bandung.
- Perhutani. 2009. Laporan Buku Obor Triwulan II Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bogor. Bogor.
- Statistik Balai KSDA Jawa Tengah (2008). Inventarisasi Flora dan Fauna Di Kawasan Konservasi di Jawa Tengah. Semarang.
- Zulnely 2003. Sifat fisiko kimia minyak kilemo (*Litsea cubeba*) asal Kuningan, Jawa Barat. (Physico-chemical properties of essential oil of *Litsea cubeba* (Kilemo) originated from Kuningan, West Java). □ Jurnal Penelitian Hasil Hutan.
- Tomek, W.E and Kenneth L. Robinson. 1990. *Agricultural Product Prices*, Second Edition Cornell University Press, Ithaca.

Lampiran 1. Hasil analisis Finansial (tingkat suku bunga 10%)
Appendix 1. Financial analysis results (interest rate of 10%)

Uraian	Tahun ke-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Biaya Operasional								
Thn 1								
Pengadaan Bbit	1500000							
persiapan lahan	1200000							
bedeng persediaan	1200000							
pemeliharaan	1200000							
pembabadian	700000							
pupuk npk	1400000							
golok, sabit	1000000							
Thn 2								
pendangiran		1200000						
pembabadian		700000						
NPK		1400000						
Thn 3								
pendangiran			1200000					
pembabadian			700000					
NPK			1400000					
Thn 4 Pembabadian				700000				
Thn 5 Pembabadian					700000			
Thn 6 Pembabadian						700000		
Thn 7 Pembabadian							700000	
Thn 8								
Biaya pemungutan daun					50000	50000	50000	50000
Panen								4000000
Total biaya	7300000	3300000	3300000	700000	750000	750000	750000	4050000
2. Pendapatan					1500000	1500000	1500000	36902500
3. Pendapatan bersih	-7300000	-3300000	-3300000	-700000	750000	750000	750000	32852500
Discount factor	0.909090909	0.826446281	0.751314801	0.683013455	0.620921323	0.56447393	0.513158118	0.46650738
NPV	-6636363.6	-2727272.727	-2479338.843	-478109.4188	465690.9923	423355.4475	384868.5887	15325933.71
kumulatif	4278764.1							

Lampiran 2. Hasil Analisa Finansial pada Tingkat suku Bunga 12%
 Appendix.2. *Financial analysis results (interest rate of 12%)*

Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Biaya Operasional								
Thn 1								
Pengadaan Bbit	1500000							
persiapan lahan	1200000							
bedeng persemaian	1200000							
pemeliharaan	1200000							
pembabadian	700000							
pupuk npk	1400000							
golok, sabit	100000							
Thn 2								
pendangiran		1200000						
pembabadian		700000						
NPK		1400000						
Thn 3								
pendangiran			1200000					
pembabadian			700000					
NPK			1400000					
Thn 4 Pembabadian				700000				
Thn 5 Pembabadian					700000			
Thn 6 Pembabadian						700000		
Thn 7 Pembabadian							700000	
Thn 8								
Biaya pemungutan daun					50000	50000	50000	50000
Panen								40000000
Total biaya	7300000	3300000	3300000	700000	750000	1500000	1500000	36902500
2. Pendapatan								
	-7300000	-3300000	-3300000	-700000	750000	750000	750000	32852500
3. Pendapatan bersih	0.892857143	0.797193878	0.711780248	0.635518078	0.567426856	0.5066631121	0.452349215	0.403883228
Discount factor								
NPV	-6517857.1	2630739.796	2348874.818	444862.6549	425570.1418	379973.3409	339261.9115	13268573.75
kumulatif	2471044.7							

PETUNJUK PENULISAN NASKAH “JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN”

1. Judul, harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas tidak lebih dari 2 baris, ditulis dengan Times New Roman font 14 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
2. Naskah yang dikirim terdiri dari 15-30 halaman, 2 spasi, ukuran kertas A4 dan font ukuran huruf 12.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul dan dicantumkan tanpa gelar, dicantumkan pula alamat instansi, No. Telp/faks serta alamat e-mail penulis (jika ada).
4. *Abstract*/abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, tidak lebih dari 200 kata, berisi intisari permasalahan secara menyeluruh, bersifat informatif mengenai hasil yang dicapai, diketik dengan font 10, spasi satu.
5. *Key words*/Kata kunci ditulis di bawah abstrak dan tidak lebih dari lima entri.
6. Tubuh naskah, diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten sesuai dengan kebutuhan. Semua nomor ditulis rata dibatas kiri tulisan, seperti:
I, II, III, dst. untuk Bab
A, B, C, dst. untuk Sub Bab
1, 2, 3, dst. untuk Sub subbab
a, b, c, dst. untuk Sub sub subbab
7. Sistematik Penulisan adalah sebagai berikut:
Judul : Bahasa Indonesia dan Inggris
Abstract : Bahasa Inggris
Abstrak : Bahasa Indonesia
I. Pendahuluan
II. Bahan dan Metode
III. Hasil dan Pembahasan
IV. Kesimpulan dan Saran
Daftar Pustaka
8. Tabel, gambar, grafik dan sejenisnya diberi nomor, judul dan keterangan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
9. Daftar Pustaka merupakan referensi yang dirujuk dalam naskah dan disajikan secara alphabetik nama belakang penulis pertama. Pustaka yang dirujuk diusahakan terbitan paling lama sepuluh tahun terakhir. Pustaka dapat berasal antara lain dari buku, jurnal, prosiding dan internet, dengan contoh cara penulisan sebagai berikut:
 - Gidden, A. 1979. *Central Problems in Social Theory*. Macmillan. London.
 - Doornbos, M. and L. Gertsch. 1994. Sustainability, technology and corporate interest: resources strategies in India's modern diary sector. *Journal of Development Studies* 30(3):916-50
 - Purnomo. 2004. Potensi dan peluang usaha perlebahan di Propinsi Riau. *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Litbang Hasil Hutan*, tanggal 14 Desember 2004 di Bogor. Hlm. 133-141 Pusat Litbang Hasil Hutan. Bogor.
 - Agarwal, A. and S. Narain. 2000. *Community and water management : the key to environment regeneration and proverty allevation*. Website: <http://www.undp.org/seed/pei/publication/water.pdf>. diakses 14 Januari 2002

